



Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem

2023

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

TAHUN 2023



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Jakarta
2024

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2023

Tim Penyusun:

Penanggungjawab : Direktur Jenderal KSDAE
Pengarah : Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
Ketua : Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Penyunting : Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Desain grafis : Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan, Tim Kerja Data dan Informasi
Ilustrasi Cover : Tim Kerja Data dan Informasi

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Alamat:

Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 8
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Telp. 021 5730301, 5730316, fax: 021 5733437
Email. setditjenksdae@menlhk.go.id

KALEIDOSKOP

DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

2023



JANUARI

Kelahiran Orangutan
Rapat Kerja Tematik
Direktorat Jenderal KSDAE



APRIL

Kelahiran Gajah
di Way Kambas
dan Riau



FEBRUARI

Kelahiran Anoa di ABC,
BKSDA Sulawesi Utara
Pelepasliaran
Orangutan



MEI

Pelepasliaran
Orangutan di Kalimantan



MARET

Sosialisasi
Pelepasliaran Komodo



JUNI

Sindiket Perdagangan
Satwa Liar Ditangkap



KALEIDOSKOP

DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

2023



JULI

Kelahiran Anoa dan
Kelahiran Orangutan



AGUSTUS

Penemuan 3 Spesies Baru
& Potensi 16 Spesies Baru

Observasi Kawasan
Konservasi di TNUK



SEPTEMBER

Kelahiran Badak Jawa
di SRS Way Kambas

Persiapan Menuju
Puncak HKAN



OKTOBER

Upaya Bayi Tabung Badak
Sumatera di Kalimantan

Pertemuan CBD-SBSTTA 25
dan Resumed Session COP 15
CBD

Rakornis Ditjen KSDAE 2023

NOVEMBER

Kelahiran
Badak Jawa dan Gajah
di Way Kambas

Puncak HKAN dan
Penyerahan Anugerah Konservasi
Alam



DESEMBER

BTNGGP menerima
penghargaan dari Anugerah
Revolusi Mental (ARM) Tahun
2023

Sosialisasi Permen LHK 14/2024
tentang Penyelesaian
Usaha/Kegiatan Terbangun di
KSA/KPA/TB





CAPAIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

2023

6 INDIKATOR KINERJA PROGRAM

RATA-RATA CAPAIAN IKP 101,69%

SASARAN PROGRAM
Meningkatnya pengelolaan
kawasan ekosistem
esensial

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Luas kawasan yang
diinventarisasi dan
diverifikasi dengan nilai
keanekaragaman hayati
tinggi secara partisipatif
di luar Kawasan
Konservasi

TARGET 10.000.000
HEKTAR

REALISASI 15.611.293,24 HEKTAR

150%
(156,11%)

SASARAN PROGRAM
Meningkatnya pengelolaan
kawasan konservasi

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Luas kawasan hutan
yang diinventarisasi dan
diverifikasi dengan nilai
keanekaragaman tinggi
secara partisipatif

TARGET 12.000.000
HEKTAR

REALISASI 13.020.000
HEKTAR

108,50%

SASARAN PROGRAM
Meningkatnya Nilai Ekspor
Pemanfaatan Tumbuhan
dan Satwa Liar yang
lestari dan berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Nilai Ekspor Pemanfaatan
Tumbuhan dan Satwa
yang lestari dan
berkelanjutan

TARGET 2,15 TRILIUN
RUPIAH

REALISASI 1,73
TRILIUN RUPIAH

80,58%

SASARAN PROGRAM
Meningkatnya PNPB dari
Pengelolaan Jasa
Lingkungan Kawasan
Konservasi dan
Pemanfaatan TSL secara
Lestari

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Nilai PNPB dari
Pengelolaan Jasa
Lingkungan Kawasan
Konservasi dan
Pemanfaatan TSL secara
Lestari

TARGET 230 MILYAR
RUPIAH

REALISASI 185,75
MILYAR RUPIAH

80,76%

SASARAN PROGRAM
Meningkatnya kemitraan
konservasi dalam
pengelolaan Kawasan
konservasi

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Jumlah desa di kawasan
konservasi yang
mendapatkan
pendampingan dalam
rangka pemberdayaan
masyarakat

TARGET 1.000 DESA

REALISASI 879 DESA

87,90%

SASARAN PROGRAM
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah Ditjen
Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem

TARGET 78 POIN

REALISASI 79,88 POIN

102,41%

Kata Pengantar

Kawasan Konservasi merupakan benteng terakhir perlindungan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) menghadapi berbagai tantangan dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati, diantaranya adanya fenomena *el nino* yang memicu kekeringan dan minimnya curah hujan, sehingga rawan menyebabkan terjadinya kebakaran di sebagian kawasan konservasi di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan rencana strategis dalam mengelola, melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di dalamnya baik pada kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi.

Tugas Ditjen KSDAE dilaksanakan melalui 3 program yaitu program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Kualitas Lingkungan Hidup, dan Dukungan Manajemen. Ketiga program tersebut memiliki tujuh sasaran yang diukur menggunakan satu indikator kinerja program untuk setiap sasaran.

Sasaran program pertama yaitu meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial dengan indikator kinerja berupa luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi seluas 10 juta hektar. Sasaran program kedua, yaitu meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi, dengan indikator kinerja berupa luas kawasan hutan yang



diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif seluas 12 juta hektar., Sasaran program ketiga adalah meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan dengan indikator kinerja berupa Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran sebesar 2,15 Triliun Rupiah.

Sasaran program keempat adalah meningkatnya PNBPN dari pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari dengan indikator kinerja berupa jumlah nilai PNBPN dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL sebesar 230 Miliar Rupiah. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai dalam program kelima adalah meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan indikator berupa jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif sebanyak 1.000 desa. Terakhir, sasaran program ke enam adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal KSDAE dengan indikator

kinerja berupa nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 78 poin.

Pertanggungjawaban atas capaian dari indikator kinerja tersebut, dituangkan dalam Laporan kinerja. Dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja dan upaya

pengelolaan kawasan konservasi yang telah dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan semua pihak yang berperan serta dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Jakarta, 24 Januari 2024
Direktur Jenderal KSDAE,



Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut, M.Sc.
NIP. 19710809 199512 1 001



Pembukaan Acara Hari Konservasi Alam Nasional di TWA Bukit Tangkiling, BKSDA Kalimantan Tengah pada 8 November 2023 oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Ringkasan Eksekutif

Ditjen KSDAE mendukung 3 program yaitu Program Dukungan Manajemen, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Kualitas Lingkungan Hidup. Ketiga program tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan hutan konservasi yaitu 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan Kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati; 2) Meningkatkan manfaat ekonomi dari Kawasan konservasi melalui pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor; 3) Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi; 4) Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan 6) Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi. Sedangkan sasaran yang ditetapkan pada Ditjen KSDAE yaitu 1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati; 2) Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL; 3) Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari; 4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; 5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan 6) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Ditjen KSDAE tersebut diukur melalui 6 indikator kinerja program yaitu 1) luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi seluas 10 juta hektar; 2) luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 12 juta hektar; 3) Nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan sebesar 2,15 Triliun Rupiah; 4) Nilai PNBP dari pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari sebesar 230 Miliar Rupiah; 5) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebanyak 1.000 desa; dan 6) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen KSDAE sebesar 78 Poin.

Penetapan target indikator kinerja program setiap tahunnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2023, dari 6 indikator kinerja program, terdapat 2 indikator kinerja yang telah tercapai melebihi target, sedangkan 4 indikator kinerja yang tercapai kurang dari target.

Capaian indikator kinerja program tersebut yaitu: 1) Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi

dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi terealisasi seluas 15.611.293,24 hektar atau 150% (156,11%) dari target 10 juta hektar; 2) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif terealisasi seluas 13.020.000 hektar atau 108,5% dari target 12 juta hektar; 3) Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa yang lestari dan berkelanjutan terealisasi Rp 1,73 Triliun atau 80,56% dari target Rp 2,15 Triliun; 4) Nilai PNBK dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari terealisasi Rp 185,75 Miliar atau 80,76% dari target Rp 230 Miliar; 5) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terealisasi 879 desa atau 87,90% dari target 1.000 desa; dan 6) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terealisasi 79,88 poin atau 102,41% dari target 78 poin. Rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 101,69%.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023, Ditjen KSDAE mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.670.370.392.000,-, sampai dengan akhir tahun terealisasi Rp 1.643.990.813.378,- atau **98,42%**. Berdasarkan perbandingan persentase penyerapan anggaran dengan persentase rata-rata capaian kinerja sebesar **101,69%**, diperoleh nilai **0,97**, yang berarti Ditjen KSDAE efisien dalam penggunaan anggarannya untuk pencapaian kinerja.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, Ditjen KSDAE menghadapi kendala antara lain adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan akibat pengaruh *El Nino*, yaitu pada 11 provinsi rawan karhutla khususnya Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Telah dilakukan upaya-upaya untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2023, yaitu monitoring *hot spot*, penyadartahuan, patroli pemadaman, patroli *ground check*, TMC seperti pada kawasan konservasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan *water bombing* di TN Sebangau.



Air Terjun Karawawi di CA. Peg. Kumawa,

@Gusta Fitria Adi

Glosarium

ABKT	: Areal Bernilai Konservasi Tinggi	KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
ASN	: Aparatur Sipil Negara	KSA	: Kawasan Suaka Alam
APL	: Areal Penggunaan Lain	KSDAE	: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	KPA	: Kawasan Pelestarian Alam
BA BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara	LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BBKSDA	: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam	PJLKK	: Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
BBTN	: Balai Besar Taman Nasional	PK	: Perjanjian Kinerja
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam	PKK	: Pengelolaan Kawasan Konservasi
BPPE	: Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	PKTL	: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
BTN	: Balai Taman Nasional	PN	: Prioritas Nasional
CA	: Cagar Alam	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
CITES	: <i>Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna Fauna and Flora</i>	PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
CONSERVE	: <i>Catalyzing Optimum Management Of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species</i>	PPNPN	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
HCV	: <i>High Conservation Value</i>	RKK	: Perencanaan Kawasan Konservasi
HL	: Hutan Lindung	Satker	: Satuan Kerja
HP	: Hutan Produksi	Tahura	: Taman Hutan Raya
HPK	: Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	TB	: Taman Buru
HPT	: Hutan Produksi Terbatas	TMC	: Teknologi Modifikasi Cuaca
IKP	: Indikator Kinerja Program	TN	: Taman Nasional
KK	: Kawasan Konservasi	TSL	: Tumbuhan dan Satwa Liar
KKHSG	: Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	TWA	: Taman Wisata Alam
		UPT	: Unit Pelaksana Teknis
		SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		SM	: Suaka Margasatwa



Daerah Aliran Sungai Embaloh
@BBTN Betung Kerihun dan
Danau Sentarum

Daftar Isi

Kata Pengantar	ix
Ringkasan Eksekutif	xiii
Glosarium	xvi
Daftar Isi	xviii
Daftar Gambar	xix
Daftar Tabel	xxi
Daftar Lampiran	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis 2024	12
B. Rencana Kerja DITJEN KSDAE 2023	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
D. Perjalanan Pagu Anggaran DITJEN KSDAE Tahun 2023	17
E. Pohon Kinerja DITJEN KSDAE	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Indikator Kinerja Program	22
B. Realisasi Anggaran	63
C. Dukungan terhadap PN	67
D. Pemantauan kegiatan Tematik	70
BAB IV Penutup	78
Lampiran	81

Daftar Gambar

Gambar 1.	Luas Kawasan Konservasi	2
Gambar 2.	Peta Kawasan Konservasi di Indonesia	2
Gambar 3.	Anak Badak Sumatera Bernama Anggi yang lahir dari induk Ratu	6
Gambar 4.	Struktur Organisasi DITJEN KSDAE	8
Gambar 5.	Grafik Sebaran Jumlah Pegawai (orang) pada Unit Kerja Pusat dan UPT	9
Gambar 6.	Sebaran Pegawai DITJEN KSDAE berdasarkan Jenis Kelamin	9
Gambar 7.	Tabel Sebaran Pegawai Direktorat Jenderal KSDAE berdasarkan Kelas Jabatan	10
Gambar 8.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DITJEN KSDAE	13
Gambar 9.	Target Kinerja DITJEN KSDAE berdasarkan Renstra 2020-2024	14
Gambar 10.	Target Kinerja Berdasarkan Renja DITJEN KSDAE Tahun 2023	15
Gambar 11.	Perjanjian Kinerja DITJEN KSDAE Tahun 2023	16
Gambar 12.	Perjalanan Pagu Anggaran DITJEN KSDAE Tahun 2023	18
Gambar 13.	Pohon Kinerja DITJEN KSDAE	20
Gambar 14.	Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Perjanjian Kinerja 2023	23
Gambar 15.	Capaian Kinerja Tahun 2020-2023 terhadap target Renstra 2020-2024	23
Gambar 16.	Capaian Inventarisasi dan Verifikasi Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi	26
Gambar 17.	Peta sebaran lokasi Inver Kehati di Luar KSA, KPA dan Taman Buru Tahun 2023	27
Gambar 18.	Pembelajaran Masyarakat BBKSDA Papua	29
Gambar 19.	Jumlah Luas Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	29
Gambar 20.	Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap target Perjanjian Kerja Tahun 2023	30
Gambar 21.	Capaian Kinerja Tahun 2020-2023 terhadap target Renstra 2020-2024	30
Gambar 22.	Capaian luasan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif tahun 2020-2023	32
Gambar 23.	Peta sebaran perjumpaan TSL di Indonesia	32
Gambar 24.	Pembobotan/skoring Species	33
Gambar 25.	Luas cakupan analisis kesesuaian habitat keanekaragaman hayati dari spesies terpilih dengan MaxEnt pada setiap region	34
Gambar 26.	Persentase jumlah luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman kehati tinggi secara partisipatif	36
Gambar 27.	Capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja 2023	37
Gambar 28.	Capaian kinerja tahun 2020-2023 terhadap target Renstra 2020-2024	37
Gambar 29.	Nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar	41

Gambar 30.	Dokumentasi komoditas ekspor TSL	41
Gambar 31.	Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja 2023	42
Gambar 32.	Capaian kinerja tahun 2020-2024 terhadap target Renstra 2020-2024	42
Gambar 33.	Perbandingan PNBPN Tahun 2020-2023 Per Jenis PNBPN	45
Gambar 34.	Jumlah PNBPN TSL Dalam dan Luar Negeri	46
Gambar 35.	Dokumentasi kunjungan wisata TWA Gunung Tangkuban Perahu dan TN Gunung Gede Pangrango	47
Gambar 36.	Jumlah Data Pengunjung Wisata Tahun 2020-2023	47
Gambar 37.	Data pengunjung tahun 2023	49
Gambar 38.	Nilai PNBPN Ditjen KSDAE, Ditjen PHL, Ditjen PKTL Tahun 2023	50
Gambar 39.	Capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja 2023	51
Gambar 40.	Capaian kinerja tahun 2020-2023 terhadap target Renstra 2020-2024	51
Gambar 41.	Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	56
Gambar 42.	Kegiatan ekowisata <i>Birdwatching</i> oleh KTH Warkesi binaan BBKSDA Papua Bara	57
Gambar 43.	Pemberian Apresiasi Kelompok Masyarakat Binaan UPT Lingkup KSDAE pada Puncak HKAN 2023	58
Gambar 44.	Pengambilan Aren di zona tradisional TN Bogani Nani Wartabone oleh KTH Modaga No Suangge binaan Balai TN Bogani Nani Wartabone	59
Gambar 45.	Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja 2023	59
Gambar 46.	Capaian kinerja tahun 2020-2024 terhadap target Renstra 2020-2024	59
Gambar 47.	Perbandingan PAGU anggaran dan realisasi anggaran	64
Gambar 48.	Persentase penggunaan anggaran Setditjen KSDAE	65
Gambar 49.	Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran 2023	67
Gambar 50.	3 aspek penilaian IKPA	68
Gambar 51.	Evaluasi Kinerja Anggaran DITJEN KSDAE Tahun 2023	68
Gambar 52.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DITJEN KSDAE 2023	69
Gambar 53.	Tren Nilai Kinerja Anggaran DITJEN KSDAE 5 tahun terakhir	69
Gambar 54.	Pengadaan kapal pengawas wisata BTN Bunaken	71
Gambar 55.	Pembangunan pos media informasi wisata BTN Kepulauan Togean	71
Gambar 56.	Pembangunan Wisma Tinabo BTN Taka Bonerate	71
Gambar 57.	Pagu dan Realisasi Prioritas Nasional Ditjen KSDAE	72
Gambar 58.	Pemulihan mangrove dan terumbu karang di kawasan BTN Wakatobi	74
Gambar 59.	Kegiatan pemadaman kebakaran hutan bersama masyarakat dan mitra di resort sembalun BTN Gunung Rinjani	74

Daftar Tabel

Tabel 1.	Capaian Kinerja DITJEN KSDAE Tahun 2023	22
Tabel 2.	Capaian Kegiatan Per UPT Tahun 2023	25
Tabel 3.	Target dan Realisasi Nilai Ekspor TSL Hasil Penangkaran 2020-2024	39
Tabel 4.	Pengunjung Kawasan Konservasi	48
Tabel 5.	Nilai PNBp pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL Tahun 2020-2023	49
Tabel 6.	Daftar Pemenang Kelompok Masyarakat disekitar Kawasan Konservasi	53
Tabel 7.	Jumlah pendampingan Desa oleh Ditjen KSDAE	54
Tabel 8.	Jumlah desa dalam capain indikator kinerja Jumlah Desa Di Kawasan Konservasi Yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020-2023	56
Tabel 9.	Hasil Penilaian SAKIP pada 4 Komponen Akuntabilitas	60
Tabel 10.	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2018-2022	61
Table 11.	Nilai SAKIP Tahun 2022	62
Tabel 12.	Anggaran berdasarkan jenis belanja	65
Tabel 13.	Pagu anggaran dan persentase realisasi	66
Tabel 14.	Kegiatan Padat Karya Ditjen KSDAE TA 2023	73
Tabel 15.	Dukungan anggaran pada Pengelolaan Perbatasan Ditjen KSDAE TA 2023	76

Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja DITJEN KSDAE Tahun 2023 (Revisi)	81
Lampiran 2.	Realisasi Anggaran Satker Lingkup DITJEN KSDAE Tahun 2023 (Sumber: OMSPAN DITEJN KSDAE)	84
Lampiran 3.	Rekapitulasi Desa di Kawasan Konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan Masyarakat	87
Lampiran 4.	Data penerimaan PNBK dari Tumbuhan dan Satwa Liar Per Satker Ditjen KSDAE Tahun 2023	123



BAB I

PENDAHULUAN

Ditjen KSDAE tengah berupaya untuk memperkuat posisi internal dan jejaring kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan bidang KSDAE dengan program strategis Unit Kerja Eselon I lingkup KLHK dan K/L lain.

Dalam rangka penyelenggaraan kebijakan di bidang konservasi SDAHE, Direktorat Jenderal KSDAE bertanggungjawab mengelola sejumlah kawasan konservasi yang mewakili ekosistem perairan maupun daratan. Sampai dengan tahun 2023 jumlah kawasan konservasi di Indonesia sebanyak 564 unit. Setiap kawasan konservasi mempunyai nomor register sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK. 148/KSDAE/SET.3/KSA.0/8/2023, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Hal ini dimaksudkan sebagai identifikasi kawasan, sebagai

instrumen pengendalian pengelolaan kawasan konservasi, dan sebagai standarisasi basis data kawasan.

Luas Kawasan konservasi keseluruhan mencapai lebih dari 26,91 juta Ha. Saat ini memang terdapat perbedaan penghitungan luas kawasan konservasi di Indonesia. Dalam data KLHK merupakan data yang bersumber dari dari kompilasi luas kawasan konservasi yang tercantum pada SK Provinsi. Sedangkan data Ditjen KSDAE merupakan data yang bersumber dari luas kawasan yang dicantumkan pada SK Penetapan dan penghitungan luas digital dari *shapefile* Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan yang dibagikan oleh Ditjen PKTL melalui Portal SIGAP.

Setiap kawasan konservasi ditunjuk dengan mandat pengelolaan yang beragam, baik aspek potensi keanekaragaman hayati, kondisi ekosistem/*landscape*, dan aspek sosial budaya. Rincian jumlah dan luas kawasan konservasi berdasarkan arahan fungsinya disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, 2024

Gambar 1. Luas kawasan konservasi

Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022, jumlah kawasan konservasi di Indonesia mengalami perbedaan, karena terdapat beberapa perubahan antar fungsi kawasan hutan maupun perubahan di dalam fungsi kawasan konservasi sendiri, salah satunya

adalah perubahan 3 (tiga) kawasan konservasi di NTB yaitu TB Pulau Moyo (RTK 58), TWA Pulau Moyo dan TWA Pulau Satonda menjadi Taman Nasional Moyo Satonda.



Gambar 2. Peta Kawasan Konservasi di Indonesia

Saat ini belum semua kawasan konservasi yang ada di Indonesia, dikelola secara efektif. Keterbatasan anggaran pengelolaan, jumlah dan

kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, luas kawasan dan aksesibilitas kawasan yang sulit dijangkau, menjadi faktor penting

yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Tingginya ancaman atau gangguan kawasan baik oleh faktor alam maupun faktor antropogenik yang disebabkan oleh aktivitas manusia, menyebabkan terjadinya perubahan kondisi kawasan dari saat awal penunjukan atau penetapannya.

Pengelolaan kawasan konservasi dengan pendekatan *Landscape Approach* dan *Resort Based Management* (RBM) juga diaktualisasikan di tingkat tapak. Terobosan secara menyeluruh terkait optimalisasi RBM dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui banyak hal, misalnya peningkatan sarpras, kehadiran petugas di lapangan, peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Selain potensi keanekaragaman hayati, potensi jasa lingkungan di kawasan konservasi menjadi hal penting yang harus di perhatikan, baik terkait wisata alam, jasa lingkungan air maupun karbon. Dalam rangka peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, Ditjen KSDAE mendorong penerapan *booking online*, pembayaran tiket secara *online* atau *E-ticketing*, sehingga diharapkan dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat umum melalui penyediaan *booking on-line* dan *tiket on-line*, tersedianya data pengunjung yang aktual dan dapat dipertanggung-jawabkan, menghemat biaya dan waktu, serta memudahkan pengaturan kuota suatu obyek wisata sesuai daya dukung dan daya tampungnya.

Kawasan konservasi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia. Kawasan konservasi dikenal sebagai kawasan *high forest low deforestation* dan memiliki kemampuan dalam menjaga kelestarian kawasan dan tutupan lahan dimana hal tersebut berarti memelihara dan/atau meningkatkan stok karbon; serta menjamin kelestarian biodiversitas flora dan fauna, ketersediaan jasa lingkungan air termasuk perlindungan daerah aliran sungai/*watershed protection*, juga jasa lingkungan keindahan dan fenomena alam (wisata alam) di dalamnya. Dengan demikian, kawasan konservasi merupakan salah satu aktor penting dalam upaya pencapaian target penurunan emisi nasional yang tertuang pada NDC di sektor kehutanan, terutama melalui kegiatan-kegiatan pemeliharaan stok karbon dan peningkatan stok karbon.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, disebutkan bahwa perdagangan karbon pada sektor kehutanan, termasuk di dalamnya perdagangan karbon pada kawasan hutan konservasi, dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2023, Ditjen KSDAE berperan aktif dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai upaya penguatan Undang-

Undang tersebut, Undang-undang No.5 tahun 1990 yang menggantikan beberapa produk peraturan kolonial pra-kemerdekaan ini telah berumur lebih dari 30 tahun. Dalam rentang waktu tersebut telah terjadi banyak sekali perubahan lingkungan strategis nasional, seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan demokratisasi. Selain itu, telah terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sektoral, perubahan pada tataran global berupa bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam kegiatan konservasi, sebagaimana tertuang dalam hasil-hasil konvensi yang terkait dengan keanekaragaman hayati, atau hasil-hasil kesepakatan baik bilateral, regional maupun multilateral. Proses perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 saat ini diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan naskah rancangan undang-undang telah disampaikan kepada Pemerintah. Dokumen ini telah ditindaklanjuti dengan penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas rancangan undang-undang tersebut serta telah dilaksanakan serangkaian pembahasan terhadap DIM tersebut. Hal-hal yang disampaikan dalam DIM tersebut antara lain bahwa saat ini cukup dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan melakukan penguatan substansi-substansi yang telah mengalami dinamika. Substansi sebagaimana dimaksud khususnya dalam konteks pengelolaan kawasan, pengawetan keanekaragaman genetik, pengaturan pendanaan KSDAHE yang berkelanjutan,

ketentuan PPNS, administrasi penyidikan, barang bukti, serta penguatan norma dan pemberatan sanksi.

Pasca terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengubah paradigma kelola kawasan konservasi dan kegiatan lain yang terkait KSDAE, sehingga pada tahun 2023 dilakukan penataan regulasi bidang KSDAE. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KLHK bersama Direktorat Jenderal KSDAE dari 37 (tiga puluh tujuh) Peraturan Menteri yang diidentifikasi, dihasilkan daftar 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Menteri LHK bidang KSDAE yang akan disusun dan dibahas pada tahun 2023-2024. Daftar regulasi tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri LHK Nomor SK.12786/MENLHK-SETJEN/ROKUM/KUM.I/11/2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023-2024.

Sampai dengan tahun 2023 telah diundangkan 2 (dua) Peraturan Menteri LHK yang merupakan hasil dari penataan regulasi bidang KSDAE, yaitu:

1. Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka

Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

2. Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha Dan/Atau Kegiatan Terbangun Di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru, bertujuan untuk: memberikan kepastian hukum bagi kegiatan terbangun; mempertahankan keberadaan dan menjaga fungsi kawasan secara optimal; mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan; dan melaksanakan penguatan fungsi dan tata kelola kawasan dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayatinya. Sampai dengan tahun 2023 tercatat seluas 866.633 Ha *opened area* terindikasi konflik yang harus ditangani. Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa areal ladang/perkebunan, pertambangan, tambak, sawah, bangunan/kawasan permukiman, yang dikategorikan sebagai kegiatan terbangun.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, keberadaan masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan konservasi dipandang sebagai mitra strategis dalam menjaga sumber daya alam.

Selama ini kerja sama dengan masyarakat sekitar dalam pemanfaatan kawasan konservasi mengacu pada Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi, yang terdiri dari kerja sama kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat. Pasca Permen LHK Nomor 14 Tahun 2023, nomenklatur kemitraan konservasi merujuk pada kegiatan dalam skema penyelesaian usaha/kegiatan terbangun di dalam KSA/KPA/TB. Jika sebelumnya yang dimaksud kerjasama kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang memberikan akses kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk memanfaatkan potensi berupa pemungutan HHBK, budidaya tradisional, perburuan tradisional dan pemanfaatan sumber daya perairan terbatas untuk jenis tidak dilindungi, dengan terbitnya peraturan baru ini berubah menjadi kerjasama pemberian akses pemanfaatan tradisional. Untuk itu perlu Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA dan KPA.



Gambar 3. Anak Badak Sumatera Bernama Anggi yang lahir dari induk Ratu

Pada tahun 2023 Indonesia menjadi sorotan dunia karena kelahiran 2 individu Badak Sumatera di Suaka Rhino Sumatera (SRS) Taman Nasional Way kambas. Dua Badak Sumatera yang lahir berjenis kelamin betina dan jantan. Anak Badak Sumatera yang betina diberi nama Anggi, lahir pada 30 September 2023 dari induk yang bernama Ratu. Sedangkan anak Badak Sumatera yang jantan diberi nama Indra, lahir pada 25 November 2023 dari induk bernama Delilah.

Kelahiran individu baru Badak Sumatera menjadi indikator membaiknya lingkungan di SRS. Keberhasilan badak bereproduksi secara semi alami membuktikan habitat dan sumber makanan cukup mendukung. Hal ini menjadi dasar optimisme untuk kelanjutan program konservasi kedepannya.

Meski kabar gembira masih bergema, tantangan dalam pengelolaan kehati secara umum masih membayangi, seperti faktor fragmentasi habitat, perubahan iklim yang berubah sangat cepat, dan konflik satwa liar. Selama tahun 2023, telah dilakukan upaya penyelamatan satwa liar sebanyak 2.490 kejadian, diantaranya adalah pemulangan satwa Indonesia yang berada di luar negeri kembali ke Indonesia. Pada tahun 2023 telah berhasil melakukan repatriasi satwa sebanyak 4 kali yaitu 1 individu monyet Yaki (Malaysia-Sulawesi Utara), 33 individu kura-kura leher ular rote (Singapura-NTT), 73 individu burung (Filipina-Sulawesi Utara), dan 3 individu orangutan Sumatera (Thailand-Jambi). Repatriasi merupakan bukti negara hadir, terlibat aktif dan tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Tindakan ini mencerminkan

komitmen negara terhadap pelestarian alam dan perlindungan satwa liar.

Kegiatan penyelamatan satwa liar sangat relevan dengan pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2023 karena merupakan bagian integral dari keanekaragaman hayati. Melindungi dan melestarikan satwa liar tidak hanya tentang mempertahankan spesies individu tetapi juga menjaga integritas dan keberlanjutan ekosistem sebagai penyangga kehidupan bagi manusia.

Selanjutnya untuk mendukung peningkatan populasi satwa liar khususnya satwa liar terancam punah seperti Badak, KLHK melalui Ditjen KSDAE cq Direktorat KKHSG telah menginisiasi penerapan sains dan teknologi baru dengan *Assisted Reproductive Technology (ART)* dan *Bio Banking*. Dalam 5 tahun kedepan kegiatan pengembangbiakan satwa liar terancam punah dengan menggunakan *Assisted Reproductive Technology (ART)* dan *Bio Banking* menjadi salah satu kegiatan prioritas di bidang konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik.

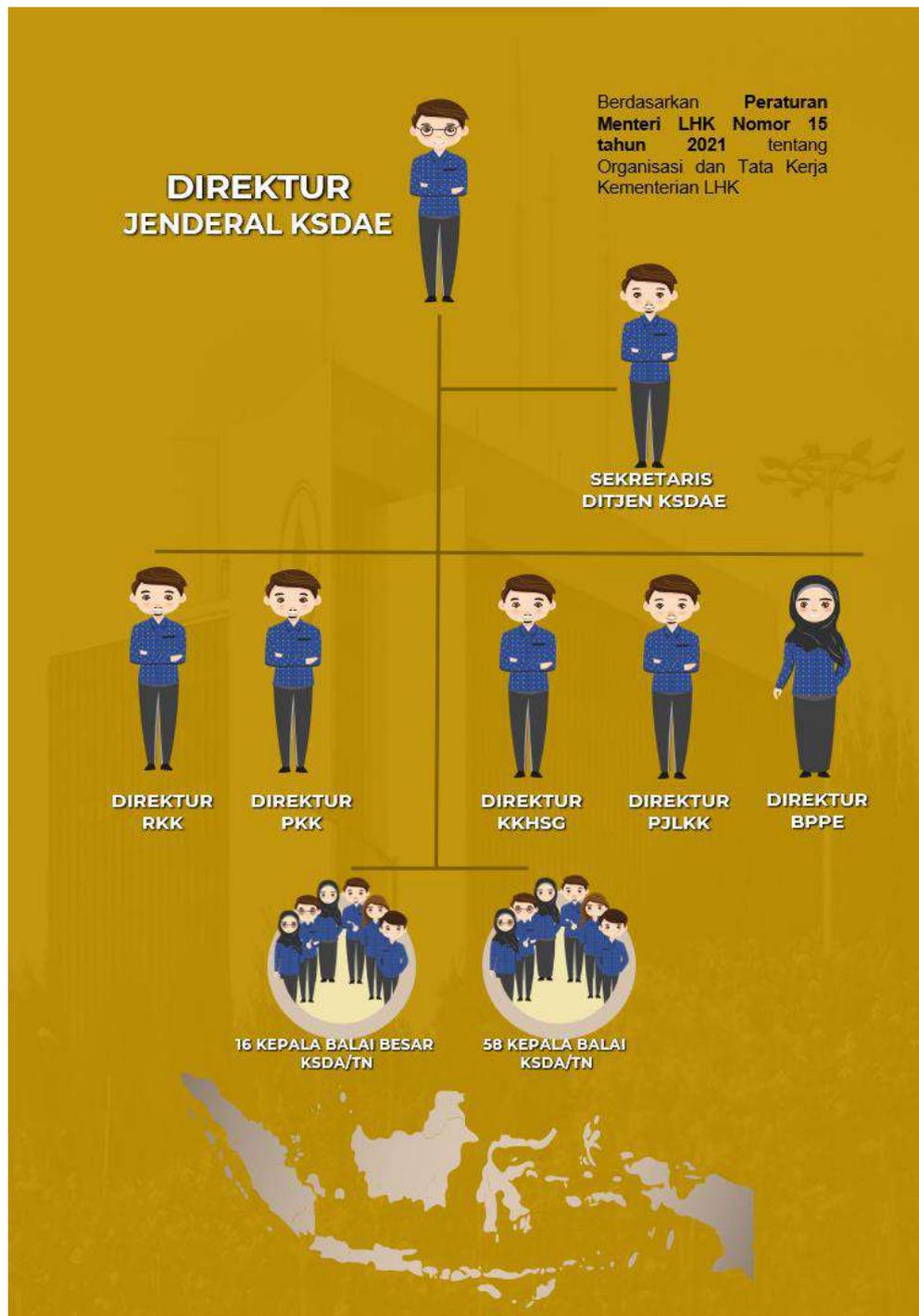
Saat ini juga tengah banyak dikembangkan potensi bioprospeksi di Indonesia. Bioprospeksi merupakan upaya untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi (*added value*) dengan mengedepankan kolaborasi dan kerjasama. Pemanfaatan sumber daya genetik untuk bioprospeksi tidak dapat dipisahkan dengan penelitian,

karena diawali dengan penelitian dan biasanya industri menggandeng Lembaga Riset untuk penelitian dan pengembangan produk. Tahapan dalam pengembangan bioprospeksi yaitu eksplorasi, penelitian, pengujian, penyediaan bahan baku, produksi, dan promosi.

Beberapa potensi pengembangan bioprospeksi yaitu bajakah (*Spatholobus littoralis*) sebagai senyawa anti kanker di KSDA Kalimantan Tengah, jernang (*Daemonorops draco*) sebagai bahan baku kosmetik di TN Bukit 12, *heels cream (Climedia hirta)* di TN Gunung Merapi, dan kedawung (*Parkia timoriana*) sebagai bahan baku jamu dan anti bakteri di TN Meru Betiri.

Adanya sumber daya genetik yang melimpah di Indonesia, dan besarnya pasar akan kebutuhan sumber daya genetik, merupakan peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan bangsa tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE terdiri dari 80 Satker, yaitu 6 unit kerja pusat dan 74 UPT. Unit kerja pusat terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 Direktorat, sedangkan UPT terdiri dari 16 Balai Besar (setingkat Eselon II) meliputi 8 UPT Balai Besar Taman Nasional, 8 UPT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, serta 58 Balai (setingkat Eselon III), yang terdiri dari 18 UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan 40 UPT Balai Taman Nasional.



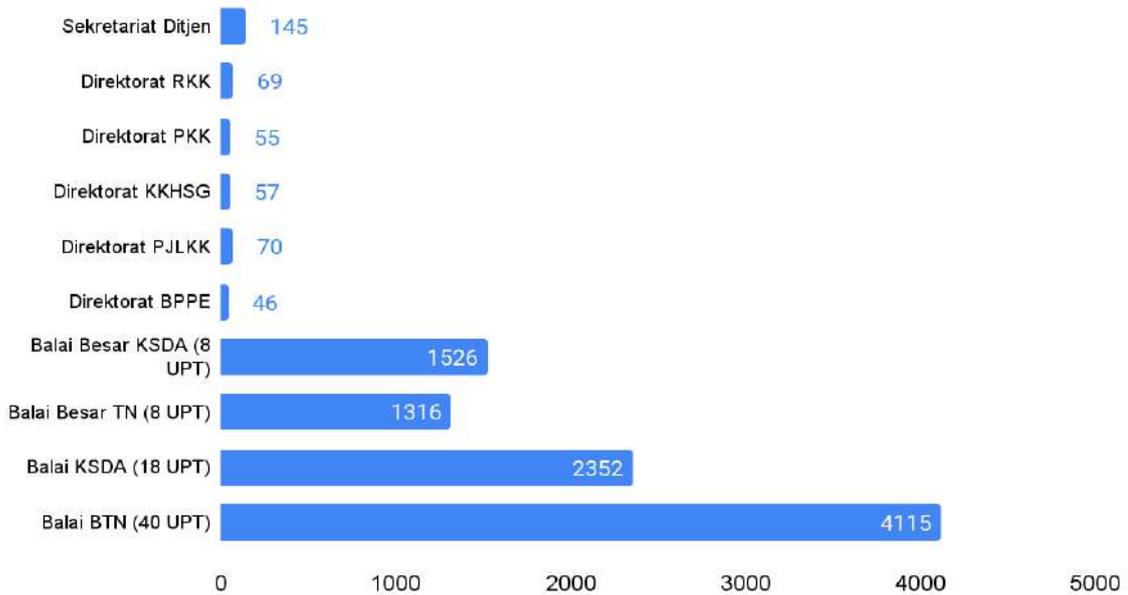
Gambar 4. Struktur Organisasi Ditjen KSDAE

Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki pegawai sebanyak 9.751 orang yang terdiri dari 5.872 orang ASN, 1.488 orang PPPK dan 2.391 orang PPNPN, yang tersebar di unit kerja pusat dan UPT. Apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai pada tahun 2022

(9.413 orang) mengalami peningkatan sebesar 338 orang. Kenaikan jumlah ASN dikarenakan adanya rekrutmen PPPK yang dibuka untuk umum dan khusus. Rekrutmen secara khusus diperuntukkan bagi PPNPN yang sudah mengabdikan diri di Ditjen KSDAE. Jumlah pegawai pada unit kerja pusat sebanyak 442 orang

pegawai yang terdiri dari 383 orang ASN dan 59 orang PPNPN. Sedangkan di UPT jumlah pegawai sebanyak 9.309 orang pegawai yang terdiri dari 6.978 orang ASN dan 2.331 orang

PPNPN. Adapun sebaran jumlah pegawai Direktorat Jenderal KSDAE Unit Kerja Pusat dan UPT ditampilkan dalam gambar berikut.



Sumber: Setditjen KSDAE, 2024

Gambar 5. Grafik Sebaran Jumlah Pegawai (Orang) pada Unit Kerja Pusat dan UPT



Gambar 6. Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE berdasarkan jenis kelamin

Sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin, pegawai Ditjen KSDAE didominasi pegawai laki-laki sebanyak 7.660 orang atau 78,56%, dan pegawai perempuan sebanyak 2.091 orang atau 21,44%.



**JUMLAH PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL KSDAE
BERDASARKAN KELAS JABATAN**

JABATAN	JUMLAH
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)	1
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	22
Pejabat Administrator (Eselon III)	76
Pejabat Pengawas (Eselon IV)	63
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	2.050
Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	1.655
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan	638
Jabatan Fungsional Manggala Agni	387
Jabatan Fungsional Perencana	111
Jabatan Fungsional Arsiparis	92
Jabatan Fungsional Pranata Komputer	91
Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	88
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	57
Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	37
Pelatih dan Pawang Hewan	178
Pengolah data	330
Analis Konservasi	111
Pengadministrasi Umum	70
Jabatan Lainnya	1.303
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	2.391
Jumlah	9.751

Gambar 7. Tabel sebaran pegawai Direktorat Jenderal KSDAE berdasarkan kelas jabatan



Anak Badak Sumatera yang Jantan
diberi nama Indra, lahir pada 25
November 2023 dari induk bernama
Delilah_@Taman Nasional Way Kambas

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk menjamin bahwa seluruh elemen masyarakat mendapatkan masyarakat mendapatkan manfaat dari sumber daya ini. Ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya secara tepat, yaitu: konservasi, pemanfaatan secara lestari dan pembagian yang adil atas manfaat dari penggunaan sumber daya tersebut. Kawasan Konservasi merupakan benteng terakhir perlindungan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Tujuan Pemerintah adalah untuk menjamin bahwa kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di dalamnya dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara lestari untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia di

Indonesia. Rencana strategis diperlukan untuk mengelola, melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di dalamnya baik pada kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.1/KSDAE/SET.3/REN.2/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024, **Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah "Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk Kesejahteraan Masyarakat yang mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**.



3 (TIGA) ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA SECARA TEPAT

- KONSERVASI**
- PEMANFAATAN SECARA LESTARI**
- PEMBAGIAN YANG ADIL ATAS MANFAAT DARI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

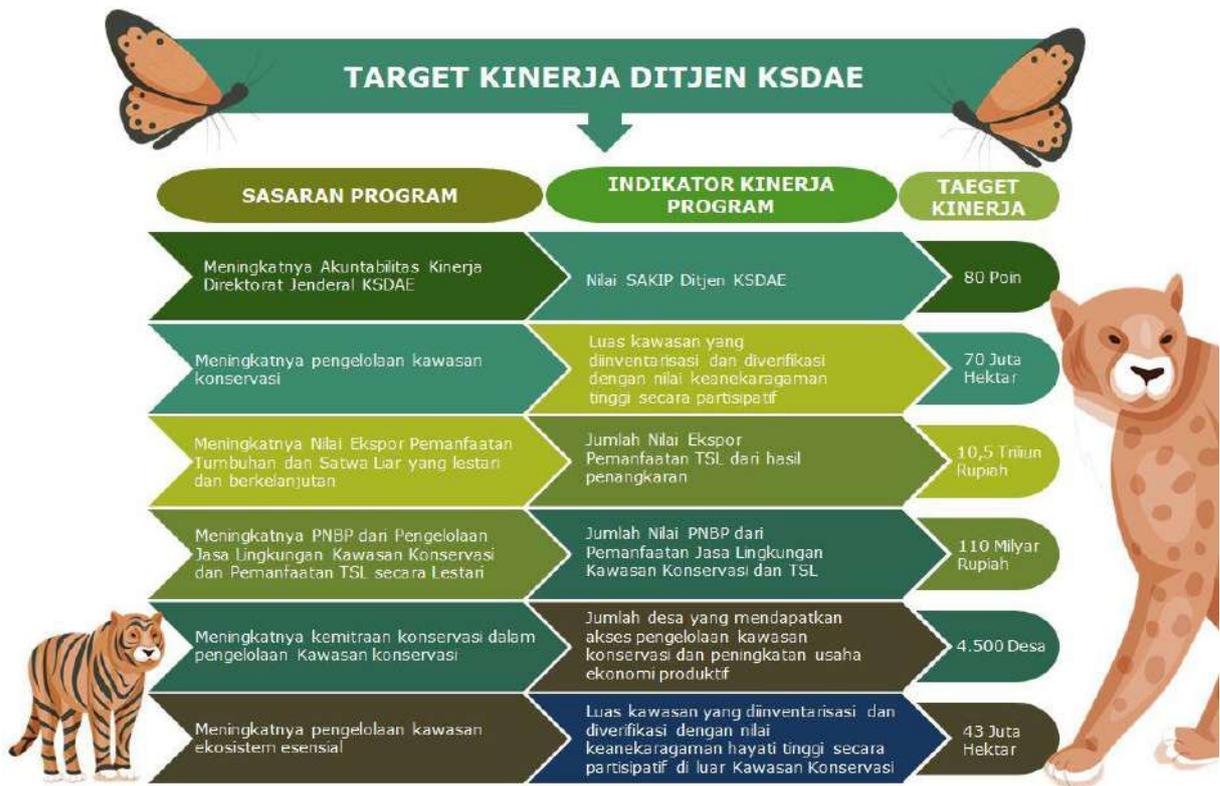
VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN HUTAN KONSERVASI

VISI DIREKTORAT JENDERAL KSDAE ADALAH "KELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MENDUKUNG KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG "TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG "

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.1/KSDAE/SET.3/REN.2/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024



Gambar 8. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DITJEN KSDAE



Gambar 9. Target Kinerja DITJEN KSDAE berdasarkan Renstra 2020-2024

B. RENCANA KERJA DITJEN KSDAE TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja) merupakan turunan dari Renstra dan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun. Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 yang melanjutkan pelaksanaan arah pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekosistem pada periode tersebut. Sasaran Pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, terbagi dalam 3 program dengan 6 sasaran program yang didukung dengan indikator kinerja program dengan target pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 10. Target Kinerja berdasarkan Renja DITJEN KSDAE Tahun 2023

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Penugasan untuk pelaksanaan program dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur Jenderal KSDAE telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE tahun 2023. Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE tahun 2023 mengalami satu kali revisi dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran dan adanya perubahan

pimpinan Eselon I. Sedangkan pada target kinerja tidak mengalami perubahan, dimana target kinerja pada seluruh dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Eselon I tahun 2023 disesuaikan dengan Renja KLHK tahun 2023. Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE tahun 2023 terdiri dari 6 sasaran program dan 6 indikator kinerja program.



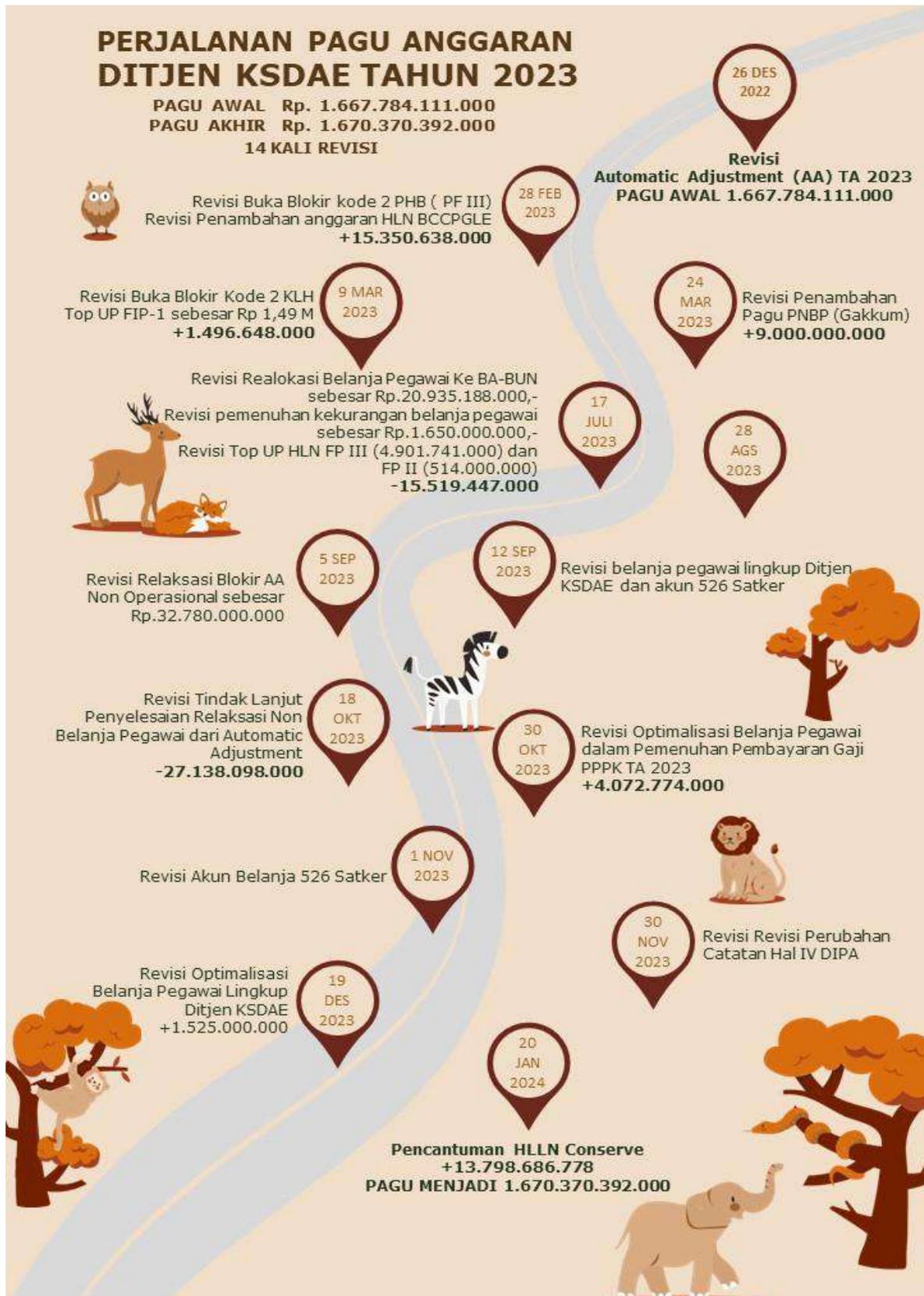
Gambar 11. Perjanjian Kinerja DITJEN KSDAE Tahun 2023

D. PERJALANAN PAGU ANGGARAN DITJEN KSDAE TAHUN 2023

Penerapan kebijakan *Automatic Adjustment* pada Kementerian LHK, khususnya pada Direktorat Jenderal KSDAE telah mempengaruhi alokasi anggaran pada 7 kegiatan. Pada awal tahun 2023, Direktorat Jenderal KSDAE (Pusat dan UPT) mendapatkan alokasi anggaran Rp 1.667.784.111.000,-.

Dalam perjalanan anggaran tahun 2023, pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE mengalami 14 kali revisi anggaran, antara lain revisi

Automatic Adjustment sebesar Rp 80,85 M, revisi penambahan pagu sumber dana PNBPN sebesar Rp 9 M, revisi realokasi belanja pegawai ke BA-BUN sebesar Rp 20,93 M, revisi Top Up HLN FP III sebesar Rp 4,90 M, revisi optimalisasi belanja pegawai PPPK sebesar Rp 4,07 M, dan revisi optimalisasi belanja pegawai sebesar Rp 1,5 M, sehingga pada akhir tahun 2023, pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE menjadi sebesar Rp 1.670.370.392.000,-.



Gambar 12. Perjalanan Pagu Anggaran DITJEN KSDAE Tahun 2023

E. POHON KINERJA DITJEN KSDAE

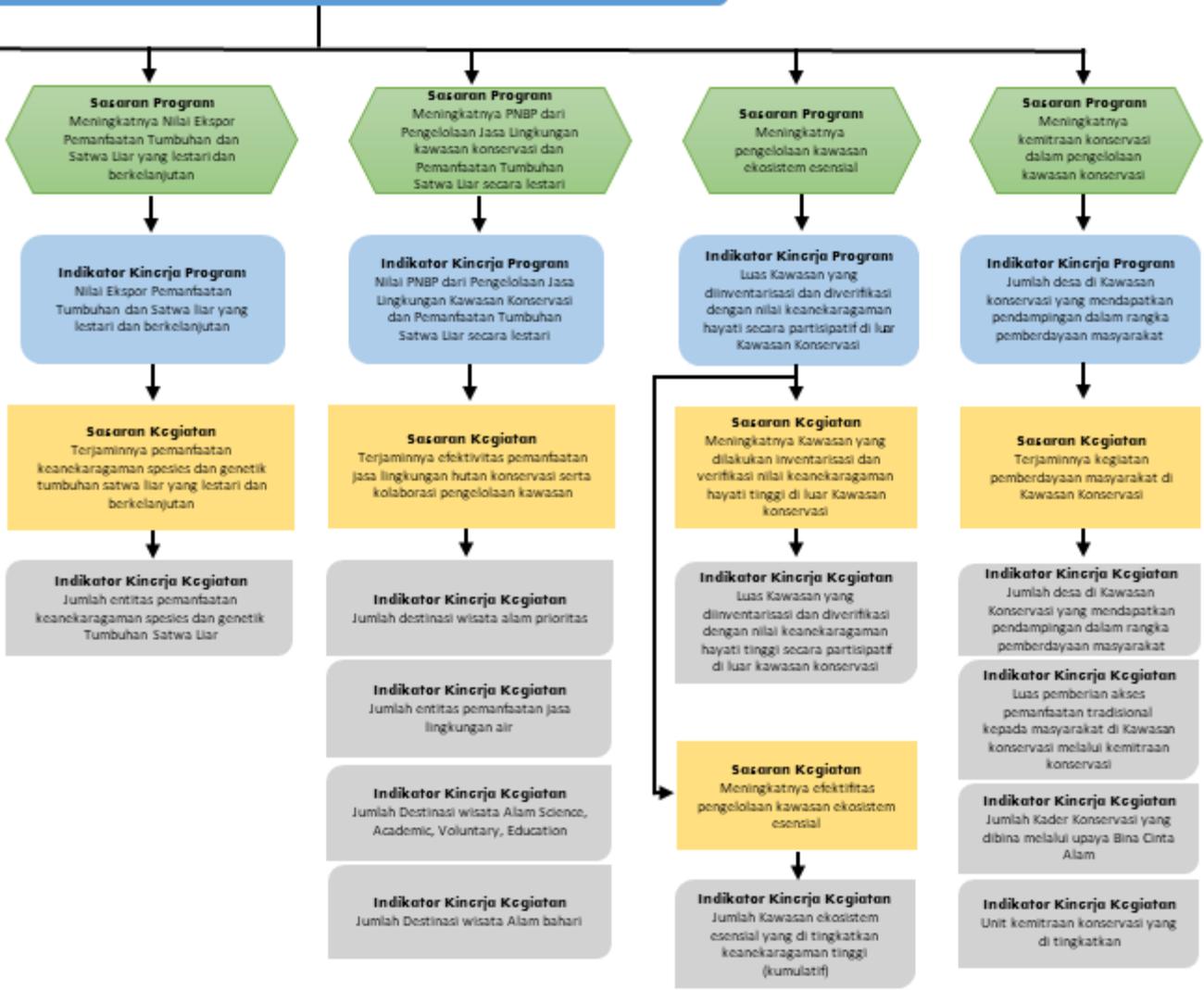
Pohon kinerja merupakan salah satu alat yang digunakan dalam sistem pengukuran kinerja strategis. Pohon kinerja menggambarkan sasaran yang akan dicapai dan indikator kinerja yang ditetapkan untuk

mencapai sasaran tersebut. Pada Ditjen KSDAE, terdapat 6 sasaran strategis dan indikatornya yang digambarkan dalam pohon kinerja sebagai berikut.

POHON KINERJA DITJEN KSDAE



REKTORAT JENDERAL KSDAE



Gambar 13. Pohon Kinerja DITJEN KSDAE



TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI - PLUNYON

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Pencapaian kinerja Ditjen KSDAE tahun 2023 diukur melalui pelaksanaan 6 indikator kinerja program sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri LHK. Pada tahun 2023 rata-rata capaian IKP Ditjen KSDAE adalah sebesar 101,69%.

Tabel. 1 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Hektar	10.000.000	15.611.293,24	150,00% (156,11%)
2	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Hektar	12.000.000	13.020.000	108,50%
3	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa yang lestari dan berkelanjutan	Triliun Rupiah	2,15	1,73	80,56%
4	Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	Milyar Rupiah	230	185,75	80,76%
5	Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Desa	1.000	879,00	87,90%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	78	79,88	102,41%
Rata-rata Capaian Kinerja						101,69%

Dari 6 indikator kinerja program, terdapat 3 indikator yang capaiannya melebihi target yaitu 1) Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi, 2) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif, dan 3) Nilai SAKIP Ditjen KSDAE. Sedangkan 3 indikator kinerja lainnya belum tercapai sesuai

target yaitu 1) Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa yang lestari dan berkelanjutan, 2) Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari, dan 3) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Penjelasan capaian setiap indikator kinerja program sebagai berikut.

1. IKP LUAS KAWASAN YANG DIINVENTARISASI DAN DIVERIFIKASI DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI SECARA PARTISIPATIF DI LUAR KAWASAN KONSERVASI



Gambar 14. Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kinerja 2023



Gambar 15. Capaian Kinerja Tahun 2020-2023 terhadap target Renstra 2020-2024

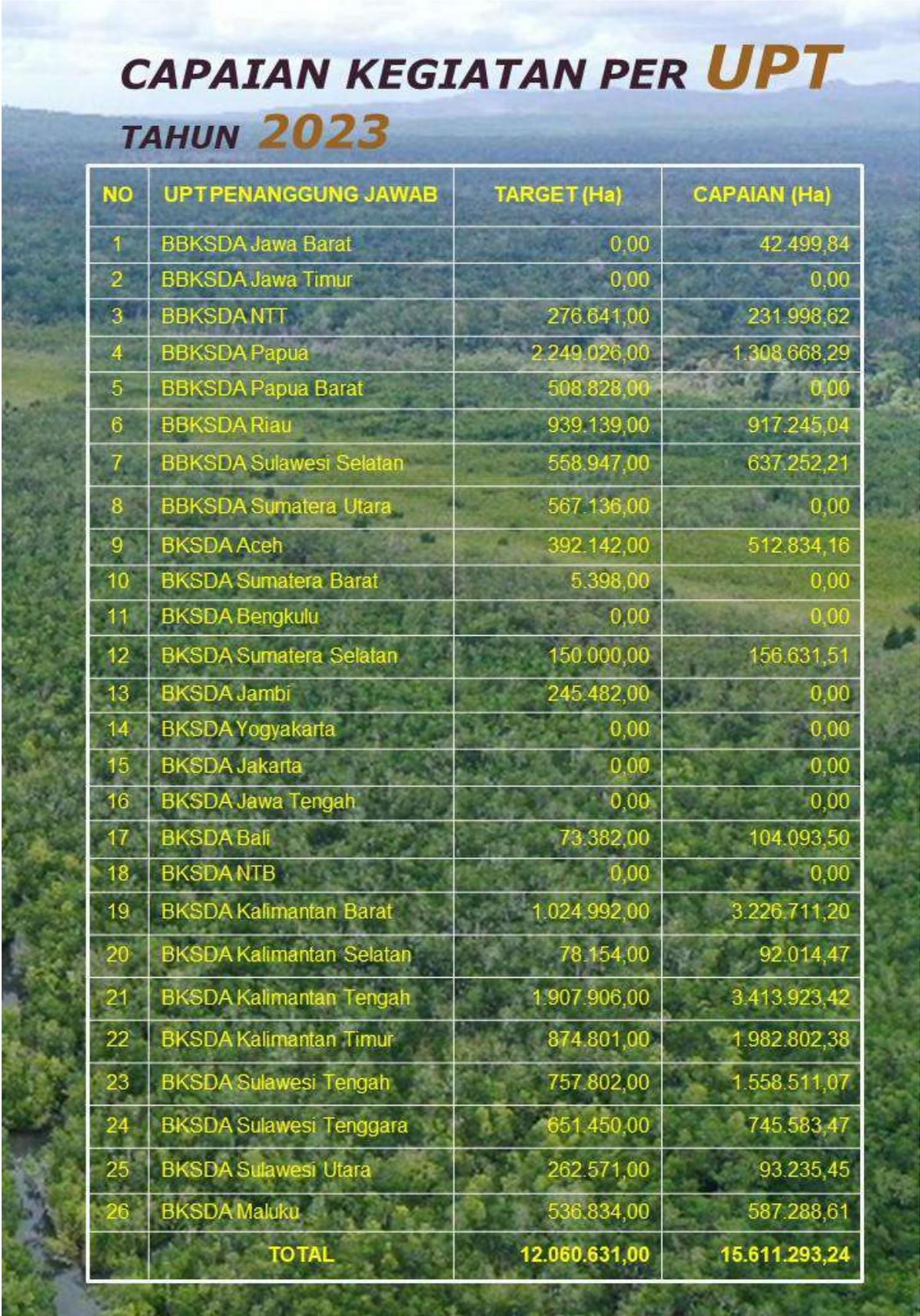
Sebagian besar satwa liar dijumpai di luar kawasan konservasi yaitu di kawasan hutan produksi dan atau

hutan lindung. Di sisi lain, diduga terdapat sekitar 57 Juta hektar areal yang memiliki

keanekaragaman hayati yang tinggi di luar kawasan konservasi berupa kawasan hutan produksi (HP), hutan lindung (HL), dan Areal Penggunaan Lain (APL), dimana 43,2 juta hektar diantaranya ada di sebelah barat Garis Weber yang harus dipertahankan (RPJMN 2020-2024). Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan amanat Rencana Strategis KLHK dan Ditjen KSDAE 2020-2024, perlu dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap kawasan-kawasan penting bagi keanekaragaman hayati, khususnya pada areal di luar kawasan konservasi.

Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi. Target pada tahun 2023, sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri KLHK adalah sebesar 10 juta hektar. Sampai dengan akhir tahun 2023, kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi seluas 15.611.293,24 hektar, realisasi ini telah tercapai melebihi target atau 156,11%. Data capaian per UPT sebagai berikut.

Tabel 2. Capaian kegiatan per UPT tahun 2023



CAPAIAN KEGIATAN PER UPT TAHUN 2023

NO	UPT PENANGGUNG JAWAB	TARGET (Ha)	CAPAIAN (Ha)
1	BBKSDA Jawa Barat	0,00	42.499,84
2	BBKSDA Jawa Timur	0,00	0,00
3	BBKSDA NTT	276.641,00	231.998,62
4	BBKSDA Papua	2.249.026,00	1.308.668,29
5	BBKSDA Papua Barat	508.828,00	0,00
6	BBKSDA Riau	939.139,00	917.245,04
7	BBKSDA Sulawesi Selatan	558.947,00	637.252,21
8	BBKSDA Sumatera Utara	567.136,00	0,00
9	BKSDA Aceh	392.142,00	512.834,16
10	BKSDA Sumatera Barat	5.398,00	0,00
11	BKSDA Bengkulu	0,00	0,00
12	BKSDA Sumatera Selatan	150.000,00	156.631,51
13	BKSDA Jambi	245.482,00	0,00
14	BKSDA Yogyakarta	0,00	0,00
15	BKSDA Jakarta	0,00	0,00
16	BKSDA Jawa Tengah	0,00	0,00
17	BKSDA Bali	73.382,00	104.093,50
18	BKSDA NTB	0,00	0,00
19	BKSDA Kalimantan Barat	1.024.992,00	3.226.711,20
20	BKSDA Kalimantan Selatan	78.154,00	92.014,47
21	BKSDA Kalimantan Tengah	1.907.906,00	3.413.923,42
22	BKSDA Kalimantan Timur	874.801,00	1.982.802,38
23	BKSDA Sulawesi Tengah	757.802,00	1.558.511,07
24	BKSDA Sulawesi Tenggara	651.450,00	745.583,47
25	BKSDA Sulawesi Utara	262.571,00	93.235,45
26	BKSDA Maluku	536.834,00	587.288,61
	TOTAL	12.060.631,00	15.611.293,24

Sumber: Direktorat BPPE

Jika dibandingkan dengan target Renstra 2020 - 2024 sebesar 43 juta hektar, capaian IKP ini secara kumulatif selama 4 tahun (2020-2023) seluas 39.266.613,08 hektar atau 91,32%, sehingga masih terdapat sisa seluas 3.733.386,92 hektar yang akan menjadi target inventarisasi dan verifikasi dengan

nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi tahun 2024. Dengan demikian, sampai dengan tahun keempat periode Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024 ini pencapaian IKP ini telah berjalan sesuai dengan target.

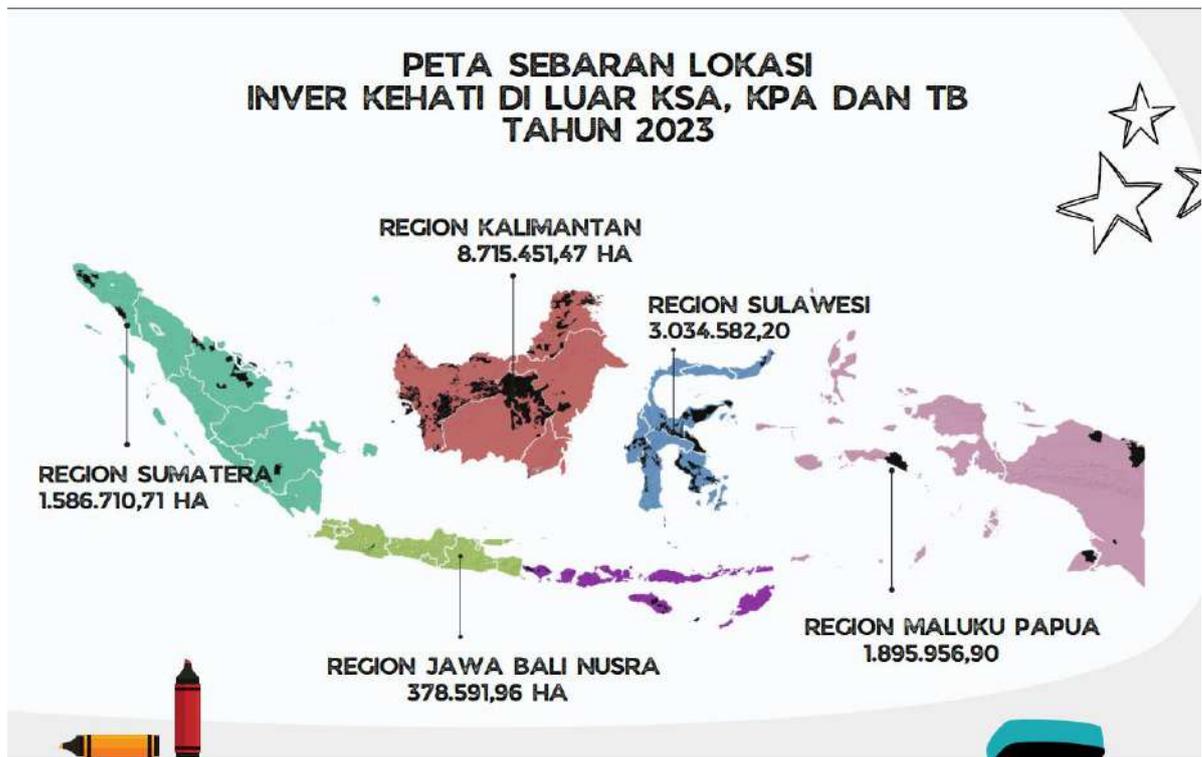


Sumber: Direktorat BPPE, 2024

Gambar 16. Capaian Inventarisasi dan Verifikasi Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Konservasi

Kegiatan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi pada tingkat UPT berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di Luar KSA, KPA dan TB, dimana inventarisasi dan verifikasi

keanekaragaman hayati tinggi dilakukan pada 2 variabel yaitu variabel utama dan penunjang. Tiga variabel utama adalah tutupan lahan, ketersediaan air, dan tumbuhan dan satwa liar. Sedangkan variabel penunjang terdiri dari tipe ekosistem, keanekaragaman hayati, topografi, jenis tanah, stok karbon, dan variabel pendukung lainnya.



Gambar 17. Peta sebaran lokasi Inver Kehati di luar KSA, KPA dan Taman Buru Tahun 2023

Jika dilihat dari capaian per Region maka dapat dilihat jika Region Kalimantan memiliki capaian paling besar yaitu seluas 8.715.451,47 Ha. Hal ini dikarenakan adanya capaian kumulatif dari BKSDA Kalimantan Barat serta adanya capaian yang melebihi target dari BKSDA Kalimantan Tengah. Seluruh UPT BKSDA di Kalimantan juga menyumbang angka yang tidak sedikit. Spesies kunci yang menjadi indikator kehati tinggi di region ini adalah Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), bekantan (*Nasalis larvatus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), rangkong badak (*Buceros rhinoceros*) dan meranti (*Shorea macrophylla*).

Region yang capaiannya paling kecil adalah Region Jawa Bali

Nusra, dimana capaiannya sebesar 378.591,95 Ha. Hal ini dikarenakan banyak UPT yang tidak dibebankan target seperti BKSDA Jawa Timur, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Yogyakarta, BKSDA DKI dan BKSDA NTB. Hasil capaian ini hanya disumbangkan dari BKSDA Bali, BBKSDA NTT dan BBKSDA Jawa Barat. Spesies kunci yang menjadi indikator kehati tinggi di region ini adalah owa Jawa (*Hylobates moloch*), macan tutul (*Panthera pardus*), lutung jawa (*Trachypithecus auratus*), Komodo (*Varanus komodoensis*), rusa timor (*Cervus timorensis*), elang alap coklat (*Accipiter fasciatus*) dan jalak bali (*Leucopsar rothschildi*).

Capaian Region Sulawesi sudah sesuai dengan target. Semua UPT BKSDA di Sulawesi memiliki

capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BKSDA Sulawesi Tengah memiliki capaian paling besar seluas 1.558.511,07 Ha, hal ini merupakan hasil akumulasi capaian dari tahun 2022. Spesies kunci yang menjadi indikator Kehati tinggi di region ini adalah anoa (*Bubalus depressicornis*), maleo (*Macrocephalon maleo*), babirusa (*Babyrousa babyrussa*), elang Sulawesi, rangkong (*Rhyticeros cassidix*), tarsius, Monyet hitam Sulawesi (*Macaca maura*), eboni (*Diospyros celebica*), gaharu (*Aquilaria malaccensis*) dan anggrek.

Capaian Region Sumatera didapatkan dari hanya dari BBKSDA Riau, BKSDA Aceh dan BKSDA Sumatera Selatan. Ada beberapa UPT yang telah memenuhi target sehingga tidak dibebankan target untuk tahun ini, UPT dimaksud adalah BKSDA Jambi dan BKSDA Bengkulu. BKSDA Sumatera Barat mengalami *refocusing* anggaran, sementara BBKSDA Sumatera Utara datanya belum lengkap sehingga belum dapat diproses. Spesies kunci yang menjadi indikator Kehati tinggi di region ini adalah harimau (*Panthera tigris*), gajah (*Elephas maximus*), badak (*Dicerorhinus sumatrensis*), beruang (*Helarctos malayanus*) dan trenggiling (*Manis javanica*)

Region Maluku Papua mendapatkan capaian sebesar 1.895.956,90 Ha yang berasal dari BBKSDA Papua dan BKSDA Maluku, sementara BBKSDA Papua Barat datanya belum lengkap sehingga belum dapat diproses verifikasinya. Spesies kunci yang menjadi indikator Kehati tinggi di region ini didominasi oleh berbagai jenis burung seperti cendrawasih kuning kecil (*Paradisaea minor*), kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*), kasuari (*Casuarius casuarius*), nuri raja ambon (*Alisterus amboinensis*), Kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*).

Atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati yang tinggi di luar kawasan konservasi, beberapa hal yang dilakukan yaitu sosialisasi dan integrasi data hasil inventarisasi dan verifikasi kepada Pemda/pihak lain yang terkait, publikasi terkontrol terhadap data dan informasi hasil dari inventarisasi dan verifikasi, dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi. *Output* dari indikator ini yaitu tersedianya data dan informasi inver potensi kehati tinggi di luar kawasan konservasi. Sedangkan *outcome* yang diperoleh adalah data dan informasi inver potensi kehati tinggi di luar KK menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tata ruang.

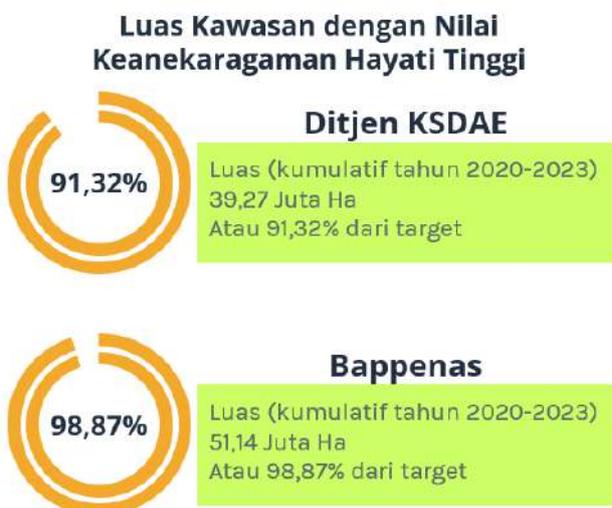


Gambar 18. Pembelajaran Masyarakat BBKSDA Papua

Benchmarking

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan yang efektif pada kawasan di luar kawasan konservasi, maka dilakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi. Melalui kegiatan ini, dapat diketahui potensi dan permasalahan yang dihadapi kawasan.

Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh Ditjen KSDAE, Bappenas juga melakukan upaya serupa. Berdasarkan dokumen Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045, target tersebut dicapai melalui indikator Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan yang efektif di kawasan lindung dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi di ekosistem darat dan perairan, dengan indikator kinerja yaitu Luas kawasan lindung termasuk area preservasi di daratan yang dilindungi dan dikelola.



Gambar 19. Jumlah luas kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi

Pada dokumen IBSAP juga disampaikan bahwa pada tingkatan global, upaya perlindungan ekosistem dapat dilakukan dengan pendekatan pengelolaan kolaboratif melalui kerangka *Other effective area-based Conservation Measures* (OECM). Di Indonesia, hasil inventarisasi dan verifikasi area bernilai keanekaragaman hayati tinggi di areal preservasi dapat menjadi modal untuk

memperluas peran para pihak dalam upaya perlindungan ekosistem. Areal preservasi adalah areal di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. IKP LUAS KAWASAN YANG DIINVENTARISASI DAN DIVERIFIKASI DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN TINGGI SECARA PARTISIPATIF



Gambar 20. Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap target perjanjian Kinerja Tahun 2023



Gambar 21. Capaian kinerja Tahun 2020-2023 terhadap target Renstra 2020-2024

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Nasional, memandatkan KLHK mempertahankan kawasan dengan nilai konservasi tinggi atau Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). Untuk mewujudkannya, KLHK membuat Rencana Strategis 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor

P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020, dengan menetapkan target mempertahankan 70 juta hektar sebagai kawasan *High Conservation Value* (HCV).

Untuk mencapai target tersebut, KLHK menetapkan kegiatan prioritas berupa inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi

secara partisipatif di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Untuk menindaklanjuti mandat tersebut, Direktur Jenderal KSDAE menerbitkan Peraturan Nomor P.1/KSDAE/SET.3/Ren.2/1/2022 tentang perubahan atas Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET.3/Ren.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 yang di dalamnya menetapkan kewajiban inventarisasi dan pencatatan spesies penting ekosistem Indonesia. Dari 70 juta hektar kawasan dengan nilai konservasi tinggi, seluas 27 juta hektar berada di dalam kawasan konservasi dan 43 juta hektar di luar kawasan konservasi.

Sejak tahun 2022, Direktorat KKHSG secara *scientific based* menggunakan referensi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi yang didefinisikan sebagai kawasan yang memiliki kekayaan spesies, khususnya pada satwa liar, dengan kriteria nilai endemisitas, status perlindungan nasional, dan status keterancaman berdasarkan IUCN *Red List* dengan kategori *critically endangered*, *endangered* dan *vulnerable*. Salah satu verifier pencapaian indikator tersebut adalah laporan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kehati tinggi yang mencakup daftar dan peta sebaran spesies baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi.

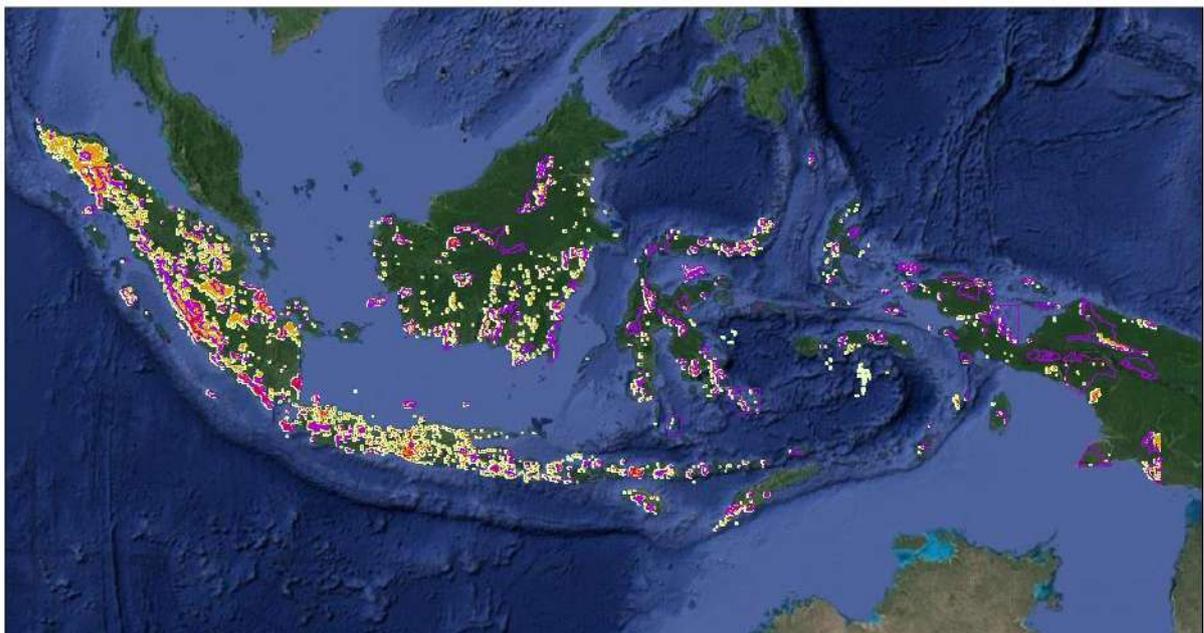
Analisa data dilakukan menggunakan pendekatan Pemodelan Distribusi Spesies (*Species Distribution Model/SDM*). Pada prosesnya cakupan wilayah yang dianalisa dan dipetakan adalah seluruh wilayah daratan (terrestrial) di Indonesia pada skala ekoregion yang mengacu pada Keputusan Menteri LHK Nomor SK.8/MenLHK/Setjen/PLA.3/1/2018. Data yang diolah bersumber dari perjumpaan tumbuhan dan satwa liar (TSL) kegiatan inventarisasi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh UPT Ditjen KSDAE baik Balai Besar/ Balai Taman Nasional maupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam beserta mitra kerja yang terkumpul dalam platform SIDAK KSDAE dan *SMART Tools*. Dalam konteks kegiatan inventarisasi TSL, data ini dimaknai sebagai *sampling plot* sebagai dasar dalam menganalisa dan mengekstrapolasi potensi dan sebaran habitat pada wilayah yang lebih luas.

Target capaian luasan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif tahun 2023 adalah 12 juta hektar. Berdasarkan hasil rekapitulasi data, realisasi pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi tersebut terlaksana pada areal seluas 13,02 juta hektar atau 108,50%, kinerja ini telah tercapai melebihi target yang ditetapkan.

Apabila dilihat capaian 4 tahun terakhir, luasan inver kehati tinggi di kawasan konservasi tercapai melebihi target yang ditetapkan.



Gambar 22. Capaian Luasan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keaneekaragaman Hayati Tinggi Secara Partisipatif Tahun 2020-2023



Gambar 23. Peta Sebaran Perjumpaan TSL di Indonesia

Melalui pendekatan Pemodelan Distribusi Spesies, Direktorat KKHSK telah menghasilkan peta kehati tinggi yang diinterpretasikan

melalui sebaran habitat dan kekayaan jenis TSL pada seluruh wilayah daratan (*terrestrial*) di Indonesia dengan skala ekoregion.

Output hasil analisa ini mengkonfirmasi peta ABKT yang dirilis oleh Bappenas dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Pada analisa lanjutan kesesuaian habitat dan kekayaan spesies pengolahan data dilakukan pada 4 taksa (kelas).

Pemilihan spesies dalam tahap analisa dilakukan melalui pembobotan berdasarkan tingkat endemisitas, perlindungan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, dan tingkat keterancaman yang mengacu pada daftar merah (*red list*) IUCN.

Tingkat endemisitas memakai tiga kategori kelas, yaitu endemik pulau/lokal, endemik Indonesia dan non endemik (global). Artinya, di Indonesia endemisitas ditemukan sebagai subspecies seperti gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), dll. Sementara untuk perlindungan digunakan dua kategori yaitu dilindungi dan tidak dilindungi. Untuk keterancaman memakai tiga kategori IUCN, yaitu *vulnerable* (VU), *endangered* (EN), dan *critically endangered* (CR). Sistem skor dalam kajian ini mengikuti Rodríguez dkk. (2004) dengan memberikan skor dari masing-masing kategori antara 1-3 dan kemudian mengkalikannya sebagai akumulasi skor pada masing-masing spesies.

Pemilihan spesies dalam tahap analisa dilakukan melalui pembobotan berdasarkan tingkat endemisitas, perlindungan nasional berdasarkan

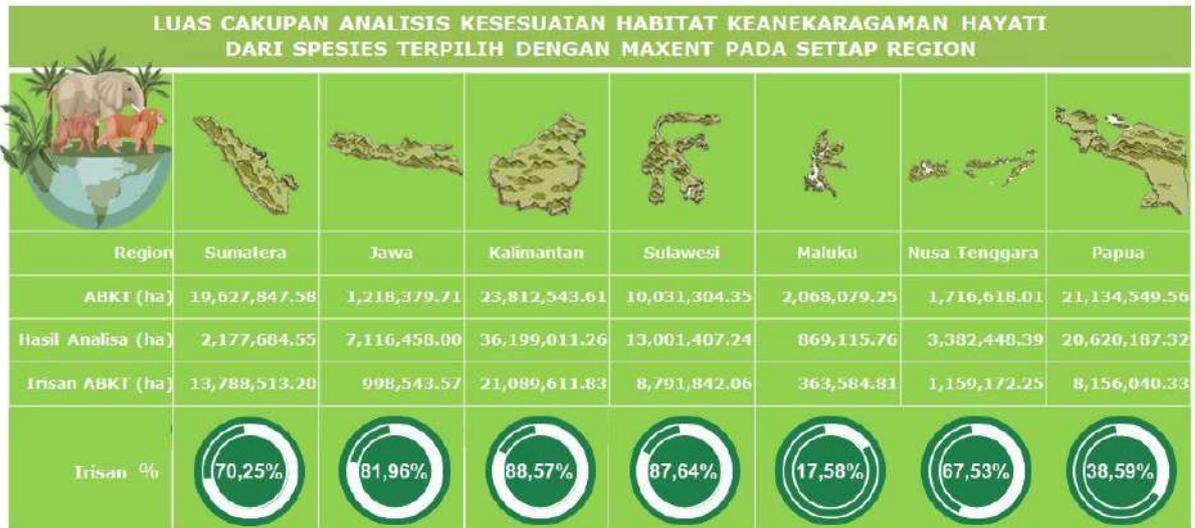
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, dan Tingkat keterancaman yang mengacu pada daftar merah (*red list*) IUCN

Kategori	Kelas	Skor
Endemisitas	Endemik Pulau/ekoregion	3
	Endemik negara	2
	Non endemik	1
Perlindungan Nasional	Dilindungi	2
	Tidak dilindungi	1
Keterancaman	Critical endangered/CR	3
	Endangered/EN	2
	Vulnerable/VU	1



Gambar 24. Pembobotan/skoring spesies



Gambar 25. Luas cakupan analisis kesesuaian habitat keanekaragaman hayati dari spesies terpilih dengan MaxEnt pada setiap region

Berdasarkan hasil analisa pemodelan distribusi spesies tersebut, luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif telah dilaksanakan pada luasan 70 juta hektar. Sehingga capaian hingga 2023 dapat dinyatakan telah tercapai 100%. Selanjutnya, anggaran inventarisasi dan verifikasi di UPT lingkup Ditjen KSDAE tahun 2024 dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan validasi data terhadap hasil analisa pemodelan distribusi spesies dimaksud. Sehingga, pada akhir masa Renstra tahun 2024, Ditjen KSDAE c.q. Direktorat KKHS dapat memproduksi peta sebaran habitat dan kekayaan jenis TSL yang telah tervalidasi secara ilmiah dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Potensi keanekaragaman hayati di Indonesia yang beriklim tropis ini sangat tinggi, *Butler* pada tahun

2016 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara *mega biodiversity* terbesar ketiga setelah Brazil dan Kolombia, dengan 13 tipe ekosistem daratan dan enam tipe ekosistem perairan dan terbagi menjadi 74 tipe vegetasi. Mengacu pada *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*, Indonesia tercatat memiliki 1.605 jenis burung, 723 jenis reptil, 385 jenis amfibi, 720 jenis mamalia, 1.248 jenis ikan air tawar, 197.964 jenis invertebrata 5.137 jenis arthropoda, serta 181.847 jenis serangga. Dalam dunia flora, Indonesia tercatat memiliki 91.251 jenis tumbuhan berspora, 120 jenis *gymnospermae*, serta sekitar 30.000-40.000 jenis tumbuhan berbunga (*Angiospermae*), yang dari perkiraan tersebut, hingga saat ini baru teridentifikasi sekitar 19.112 jenis.

Dengan tingkat keanekaragaman hayati Indonesia yang tinggi,

dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk menjamin bahwa seluruh elemen masyarakat mendapatkan manfaat dari sumber daya ini. Ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya secara tepat, yaitu: konservasi, pemanfaatan secara lestari dan pembagian yang adil atas manfaat dari penggunaan sumber daya tersebut.

Rangkaian rapat koordinasi pembahasan terkait inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan potensi keanekaragaman hayati tinggi telah dilakukan sejak awal tahun 2020 yang melibatkan para pihak dan juga direktorat lain lingkup KSDAE seperti Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat RKK, Direktorat BPPE, Direktorat Jenderal PHPL dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan capaian makro pembangunan nasional, yaitu Prioritas Nasional 6 (PN 6) "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim".

Areal dengan keanekaragaman hayati tinggi ini tidak hanya berada di kawasan konservasi. Namun, wilayah yang teridentifikasi memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagian besar berada pada kawasan hutan dengan fungsi lainnya, dan sebagian kecil berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).

Pada beberapa wilayah, areal yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi berbanding lurus dengan dataran tinggi dengan topografi lereng curam. Hal ini sejalan kondisi faktual bahwa areal pemukiman dan industri umumnya berada pada dataran rendah dengan topografi yang relatif datar. Kedepannya, hasil analisa ini akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan areal preservasi sebagai wilayah perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar.

Pada akhirnya, kawasan yang telah diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi pada tahun 2023, diharapkan akan menciptakan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, meningkatkan ketahanan bencana khususnya bencana alam dan juga antisipasi perubahan iklim secara global.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja ini antara lain:

- Dalam mencapai target IKP, sebaran lokasi kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di UPT belum dilakukan secara merata pada wilayah pemangkuan, beberapa faktor pembatas antara lain akses menuju lokasi karena faktor topografi serta keamanan personil kaitannya beberapa lokasi merupakan *red zone* (contoh: sebagian TN Lorentz

sebagai wilayah Gerakan Papua Merdeka);

- Platform pengumpulan data pada level pusat belum terintegrasi, sehingga data hasil inver yang dilaksanakan oleh UPT masih tersebar;
- Alokasi anggaran pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi yang masih dinilai belum mencukupi dalam melaksanakan pengambilan data lapangan;
- Mengingat kebutuhan di tingkat tapak, kegiatan inventarisasi TSL masih diarahkan pada monitoring TSL prioritas pada

site monitoring. Hal ini dilakukan sebagai salah satu *evidence* untuk melihat tren populasi dalam mengukur efektivitas pengelolaan kawasan. Situasi ini menyebabkan penambahan luasan areal inventarisasi yang tidak signifikan;

- Adanya *refocusing* alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi baik di pusat maupun di UPT sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Benchmarking

Dalam pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi kehati tinggi di kawasan konservasi, Ditjen KSDAE melakukan upaya perbaikan panduan pelaksanaannya. Perbaikan dalam panduannya berisi penjelasan yang lebih terkait objek kegiatan inventarisasi yang dilakukan, khususnya di objek tipe ekosistem. Perbaikan di objek inventarisasi tipe ekosistem dari yang sebelumnya 22 tipe ekosistem (21 tipe ekosistem alami dan 1 ekosistem buatan) menjadi 23 tipe ekosistem (22 tipe ekosistem alami dan 1 ekosistem buatan). Hal ini dilakukan karena menyesuaikan dokumen IBSAP 2025-2045. Sedangkan pada dokumen IBSAP, hal serupa dilakukan melalui target "Terintegrasinya perlindungan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi dan ekosistem dalam tata ruang darat dan laut yang terpadu".



Gambar 26. Persentase jumlah luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif

Dalam dokumen IBSAP, arahan rencana perlindungan kawasan dan pengelolaan keanekaragaman hayati lebih diprioritaskan kepada kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi. Pemerintah Indonesia juga telah memandatkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perencanaan tata ruang nasional dan daerah. KLHS diinisiasi untuk memastikan kebijakan dan perencanaan yang disusun memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perlindungan keanekaragaman hayati dalam pemanfaatan ruang, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

3. IKP NILAI EKSPOR PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN



Gambar 27. Capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja 2023



Gambar 28. Capaian kinerja tahun 2020-2023 terhadap target Renstra 2020-2024

Nilai ekspor TSL terutama dari hasil penangkaran adalah nilai seluruh spesimen TSL yang diperdagangkan ke luar negeri dari hasil penangkaran yang ditentukan oleh permintaan luar negeri. Penghitungan nilai ekspor dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi nilai Data Perdagangan (Data Penyerahan) dan Data Transaksi Ekspor pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Kantor Pabean (Ditjen Bea Cukai). Nilai ekspor yang diinput yaitu nilai yang tertera pada data transaksi *Free on Board* (FOB) dan atau *Cost*

and Freight (CFR).

- b. Rekapitulasi nilai Data perdagangan pada *Invoice* yang dilaporkan oleh perusahaan (eksportir).
- c. Rekapitulasi dari realisasi jumlah unit spesimen yang diekspor dikalikan perkiraan harga pasar

Kontribusi bidang pemanfaatan TSL terhadap sasaran program dan indikator kinerja tersebut di atas sebesar Rp 1.731.937.260.001,- dari target tahun 2023 sebesar Rp 2,15 T atau tercapai sebesar 80,46%. Selama 4 tahun terakhir, nilai ekspor TSL hasil penangkaran terus mengalami penurunan.

Faktor yang menyebabkan penurunan nilai ekspor TSL hasil penangkaran:

- a. Adanya Kebijakan pemindahan pengelolaan (*management authority*) oleh Pemerintah untuk jenis ikan bersirip yang sebelumnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), diantaranya ikan arwana, ikan sapu zebra, dan ikan hias hasil budidaya lainnya. Pemindahan kewenangan pengelolaan ikan bersirip dari KLHK ke KKP sesuai dengan Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor PKS.1/MENLHK/SETJEN/KSA.2/3/2021 dan Nomor 02/MEN-KP/KB/III/2021 tanggal 29 Maret

internasional untuk jenis spesimen dimaksud. Metode ini dilakukan apabila eksportir belum melaporkan transaksi ekspornya baik dalam bentuk rekapitulasi dokumen. PEB maupun rekapitulasi *invoice*.

2021 tentang Pengaturan Koordinasi Otoritas Pengelolaan (*Management authority*) *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) Di Indonesia.

- b. Permintaan dari negara penerima khususnya untuk beberapa komoditi TSL relatif berkurang, belum pulih seperti masa pandemi Covid 19.
- c. Adanya krisis ekonomi global yang berpengaruh terhadap nilai/harga dari komoditi TSL.
- d. Terkendala dalam pemenuhan persyaratan perizinan terkait dengan pemanfaatan TSL khususnya untuk dokumen persetujuan lingkungan.

Meskipun terjadi penurunan nilai ekspor TSL tahun 2023, akan tetapi secara kumulatif nilai ekspor TSL hasil penangkaran selama empat tahun terakhir (2020-2023) telah mencapai Rp 12,56 Triliun sehingga apabila dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 selama 5 tahun (Rp 10,5 Triliun) maka capaian kinerjanya telah melebihi target yaitu sebesar 119,6%. Data target dan realisasi nilai ekspor hasil penangkaran tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi Nilai Ekspor TSL Hasil Penangkaran 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase (%)
2020	2.000.000.000.000	4.884.530.666.059	244,23%
2021	2.050.000.000.000	4.200.486.206.131	204,90%
2022	2.100.000.000.000	1.743.418.485.011	83,02%
2023	2.150.000.000.000	1.731.937.260.001	80,56%
2024	2.200.000.000.000	0	0,00%
Jumlah	10.500.000.000.000	12.560.372.617.202	119,62%

Sumber: Direktorat KKHSG, 2024

Kontribusi terbesar capaian IKP nilai ekspor pemanfaatan TSL hasil penangkaran berasal dari taksa tumbuhan untuk jenis sonokeling, anggrek, gaharu dengan prosentase kontribusi sebesar 64,05% dan taksa burung (burung appendiks CITES, Non Appendiks CITES dan sarang burung walet) dengan kontribusi sebesar 26,28%.

Sesuai fakta pengelolaan di lapangan, jenis Sonokeling yang dibudidayakan sebagian besar berasal dari Perum Perhutani sedangkan yang berasal dari hutan/kebun rakyat tidak dibudidayakan secara murni namun merupakan hasil pemanenan tegakan yang telah ada sejak dulu. Sesuai surat Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI Nomor 3611/IPH.1/KS.02.04/XI/2016 tanggal 30 November 2016, jenis ini dikategorikan sebagai hasil budidaya berdasarkan hasil kajian Otoritas Keilmuan (BRIN) yang menyatakan bahwa jenis dimaksud merupakan jenis non native yang berasal dari Srilanka dan telah

dibudidayakan secara luas sejak dulu.

Sebagaimana capaian tahun 2022, penurunan capaian tahun 2023 ini juga dipengaruhi oleh pemindahan pengelolaan jenis ikan bersirip (*Pisces*) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Kesepakatan bersama antara Kementerian LHK dan KKP Nomor PKS.1/MENLHK/SETJEN/KSA.2/3/2023 dan Nomor 02/MEN-KP/KB/III/2023 tanggal 29 Maret 2023. Hal lainnya yaitu masih lesunya kondisi pasar global pasca pandemi COVID 19.

Nilai ekspor pemanfaatan TSL yang dilakukan tidak hanya berasal dari penangkaran akan tetapi juga berasal dari hasil alam. Untuk tahun 2023, nilai ekspor pemanfaatan TSL dari habitat alam sebesar Rp 9.138.318.451.000,- sehingga apabila digabungkan total keseluruhan nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil alam dan penangkaran sebesar Rp 10.881.736.936.001,- (Rp 10,8 Triliun).

Capaian target nilai ekspor tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan pemindahan pengelola CITES untuk jenis ikan bersirip ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana diketahui bahwa nilai ekspor untuk jenis ikan bersirip termasuk yang terbesar karena banyaknya penangkar atau pembudidaya ikan hias di Indonesia. Selain juga disebabkan oleh kondisi pasca pandemi Covid 19 juga persyaratan untuk penangkar melakukan perdagangan adalah perlunya dilakukan kegiatan audit penangkaran untuk mendapatkan surat keputusan batas maksimal pemanfaatan (BMP). Solusi yang telah dilakukan apabila terjadi kegagalan/ penurunan kinerja:

- a. Memberikan kesempatan kepada para unit penangkar untuk mengajukan permohonan perolehan induk penangkaran atau penambahan induk penangkaran sebagai darah baru *fresh blood*.
- b. Mengajak masyarakat yang telah melakukan penangkaran TSL namun belum memiliki izin untuk berproses mengajukan izin penangkaran.
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan penangkaran serta memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi lebih intensif sehingga masyarakat yg mengajukan izin penangkaran dapat berproses lebih lancar.

Bahwa tahapan unit penangkar sebelum melakukan ekspor, maka harus dilakukan audit kepada penangkar tersebut yang dilakukan oleh tim dari otoritas manajemen dan otoritas ilmiah. Dalam pelaksanaan audit ini diperlukan anggaran yang cukup dalam rangka melihat keberhasilan unit penangkar dimaksud. Anggaran tersebut diperlukan bagi tim untuk melihat langsung fakta di lapangan terkait keberhasilan usaha penangkaran

Bahwa unit penangkar dapat mengedarkan produk hasil penangkaran ke luar negeri, adalah unit penangkar yang memiliki izin pengedar luar negeri. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan pelayanan dalam proses izin pengedar ke luar negeri bagi para penangkar TSL, diantaranya memberikan sosialisasi lebih intensif dalam memenuhi persyaratan perizinan pengedar luar negeri. Selain itu dalam proses audit penangkaran, dimana hal ini merupakan syarat agar penangkar dapat melakukan ekspor, maka SDM tim pelaksana audit akan melibatkan pihak universitas selain dari BRIN sebagai otoritas ilmiah. Hal ini untuk mempercepat pelaksanaan audit dengan jumlah SDM yang sesuai. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan bimbingan teknis dari BRIN kepada pihak universitas terkait metode dan mekanisme audit penangkar.

Benchmarking

Berdasarkan dokumen Renstra Kementerian LHK tahun 2020-2024, dalam mendukung sasaran strategis pada pilar ekonomi yaitu Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan, ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) "Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting".

Pencapaian IKU ini didukung oleh 2 Indikator Kinerja Program pada 2 Eselon I yaitu: nilai ekspor hasil hutan pada Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) dan Ditjen KSDAE. Nilai yang diperoleh dari ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting telah memberikan devisa yang memadai bagi negara. Namun demikian, pemanfaatannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (produk kayu) dan untuk TSL harus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian (precautionary principle) serta memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pemanfaatannya untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi.



Gambar 29. nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

Terkait dengan ekspor produk hasil hutan kayu, KLHK berkomitmen untuk terus menerapkan ketentuan SVLK sebagai suatu sistem untuk mendukung upaya pemberantasan pembalakan liar serta meningkatkan perdagangan kayu legal dalam seluruh produk kayu, termasuk untuk tujuan ekspor.

Pada pemanfaatan TSL dan bioprospecting, selain memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan TSL dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL serta memperhatikan juga prinsip CITES/ the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (sustainability, legality and traceability) yakni memenuhi



ketentuan persetujuan ekspor tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dan termasuk dalam daftar Apendiks CITES (maupun yang tidak termasuk dalam daftar Apendiks CITES).

Gambar 30. Dokumentasi komoditas ekspor TSL

4. IKP NILAI PNBP DARI PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN PEMANFAATAN TSL SECARA LESTARI



Gambar 31. Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja 2023



Gambar 32. Capaian kinerja tahun 2020-2024 terhadap target Renstra 2020-2024

Selain dari devisa melalui pemanfaatan TSL hasil penangkaran, Direktorat Jenderal KSDAE juga menyumbang penerimaan negara yang dihasilkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Jenis dan besaran PNBP yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal KSDAE diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.86 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri. Jenis PNBP yang dihasilkan dari Direktorat Jenderal KSDAE bersumber dari pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/ penangkapan dari habitat alam; pungutan

perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis asli Indonesia, serta pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Tahun 2023, Nilai PNBPN Direktorat Jenderal KSDAE mencapai Rp 185.748.331.359,-, yang terdiri atas PNBPN Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi sebesar Rp 157.381.423.168,- dan PNBPN pemanfaatan TSL sebesar Rp 28.366.908.191,-. Nilai PNBPN mengalami peningkatan sebesar Rp 55.519.204.169,- atau 42,63% apabila dibandingkan dengan PNBPN yang dihasilkan pada tahun 2022, peningkatan tersebut terjadi pada PNBPN jasa lingkungan maupun PNBPN pemanfaatan TSL. Akan tetapi meskipun mengalami peningkatan, PNBPN yang dihasilkan tahun ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam PK Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2023, sehingga capaian kinerjanya hanya sebesar 80,76%. Jika dibandingkan dengan target PNBPN dari jasa lingkungan dan pemanfaatan TSL pada tahun 2023 sebesar 230 M, maka realisasi PNBPN 2023 masih dibawah target. Capaian PNBPN Jasling dan TSL selama 4 tahun, apabila dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 juga masih rendah. Dimana jumlah capaian PNBPN Jasling dan TSL selama tahun 2020-2023 adalah sebesar Rp 469.615.155.259,- atau 54,61% apabila dibandingkan target Renstra sebesar Rp 1.100 M.

Pada tahun 2023 terdapat penyesuaian penetapan target PNBPN sesuai Perpres Nomor 75 tahun 2023 yaitu menjadi sebesar Rp 151.565.816.000,-, apabila dibandingkan dengan target tersebut berdasarkan Perpres tersebut, maka capaian kinerja tercapai melebihi target yaitu sebesar 103,84%.

Beberapa hal yang menyebabkan capaian PNBPN ini tidak tercapai yaitu:

- a. Tujuan utama pengelolaan kawasan konservasi adalah pengawetan dan perlindungan, sedangkan pemanfaatan jasling merupakan fungsi yang dapat dilakukan namun harus tetap memperhatikan upaya-upaya konservasi dalam kelestarian KK. Selain itu, nilai manfaat jasling tidak hanya dilihat dari nilai PNBPN tetapi juga manfaat tambahan (*multiplier effect* berupa peningkatan ekonomi yang diterima oleh masyarakat) dan terjaganya ekosistem Kawasan Konservasi.
- b. Belum harmonisnya ketentuan Peraturan Perundang-undangan berkenaan dengan pemanfaatan air yaitu UUCK, UU Nomor 5 Tahun 1990 dan UU Nomor 17 Tahun 2019 sehingga selama kurun 2023 tidak ada izin baru pemanfaatan air, energi air dan panas bumi.
- c. Perizinan sarpras wisata masih *stagnan* dikarenakan pelaku usaha masih terimbas dampak

Covid-19 dan proses pemenuhan persetujuan lingkungan.

- d. Masih terdapat potensi PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan yang belum dikenakan karena ketentuannya belum tersedia. Pengaturan hal tersebut sudah diusulkan dan masuk dalam revisi PP Nomor 12 Tahun 2014 yang sedang dalam proses penetapan.

Walaupun secara umum capaian kinerja tidak tercapai, akan tetapi PNBP pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 53,67% apabila dibandingkan dengan PNBP

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 102.417.593.840,-. PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi terdiri dari Pungutan masuk obyek wisata alam (MOWA) sebesar Rp 154.681.366.750,-, Pungutan Hasil Usaha Penyediaan sarana wisata alam Rp 526.158.156,-, Pungutan hasil usaha pemanfaatan jasa wisata alam Rp 340.000.000,-, Pungutan usaha pemanfaatan air Rp 422.657.324,-, Pungutan usaha pemanfaatan energi air Rp 35.840.938,-, Iuran izin usaha penyediaan sarana wisata alam Rp 1.329.500.000,-, dan Iuran izin usaha penyediaan jasa wisata alam Rp 45.900.000,-.

Perbandingan PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Per Jenis PNBP Tahun 2020-2023

Nilai PNBP dari pemanfaatan TSL merupakan rekapitulasi PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan TSL di Dalam Negeri atau Luar Negeri

No	JENIS PNBP	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Pungutan masuk obyek wisata alam (MOWA)	45.639.124.250	34.219.489.000	94.876.515.000	154.681.366.750
2	Pungutan Hasil Usaha Penyediaan sarana wisata alam	662.537.097	132.731.145	129.029.898	526.158.156
3	Pungutan hasil usaha pemanfaatan jasa wisata alam	-	12.600.000	188.400.000	340.000.000
4	Pungutan usaha pemanfaatan air	-	-	439.167.458	422.657.324
5	Pungutan usaha pemanfaatan energi air	-	-	242.381.484	35.840.938
6	Iuran izin usaha penyediaan sarana wisata alam	7.319.500.000	9.607.400.000	6.483.300.000	1.329.500.000
7	Iuran izin usaha penyediaan jasa wisata alam	-	3.000.000	58.800.000	45.900.000
Jumlah		53.621.161.347	43.975.220.145	102.417.593.840	157.381.423.168

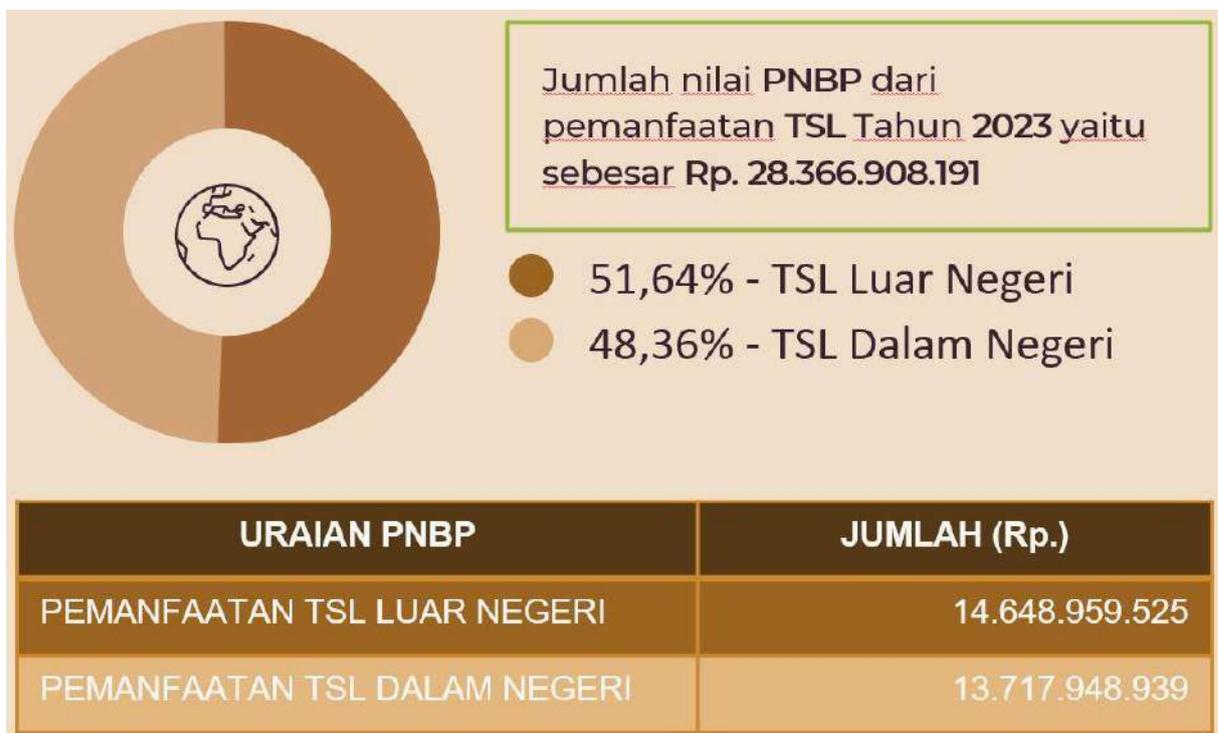
Gambar 33. Perbandingan PNBP Tahun 2020-2023 Per Jenis PNBP

Nilai PNBP dari pemanfaatan TSL merupakan rekapitulasi PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan TSL di Dalam Negeri atau Luar Negeri, dengan detail komponen sebagai berikut:

a. Iuran perizinan pemanfaatan TSL;

- b. Pungutan pengambilan/penangkapan TSL dari habitat alam;
- c. Pungutan perdagangan spesimen TSL (alam dan penangkaran);
- d. Pungutan blanko administrasi (SATS-DN dan SATS-LN);
- e. Denda administrasi pelanggaran peredaran TSL.

Adapun capaian jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan TSL tahun 2023 yaitu sebesar Rp 28.366.908.191,- dengan rincian berdasarkan jenis pemanfaatan TSL (Luar Negeri atau Ekspor dan Dalam Negeri):



Gambar 34. Jumlah PNBP TSL Dalam dan Luar Negeri

Pemanfaatan TSL Luar Negeri diperoleh dari komponen PNBP yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan Direktorat KKHSK untuk kegiatan Iuran Perizinan Berusaha Penangkaran, Iuran

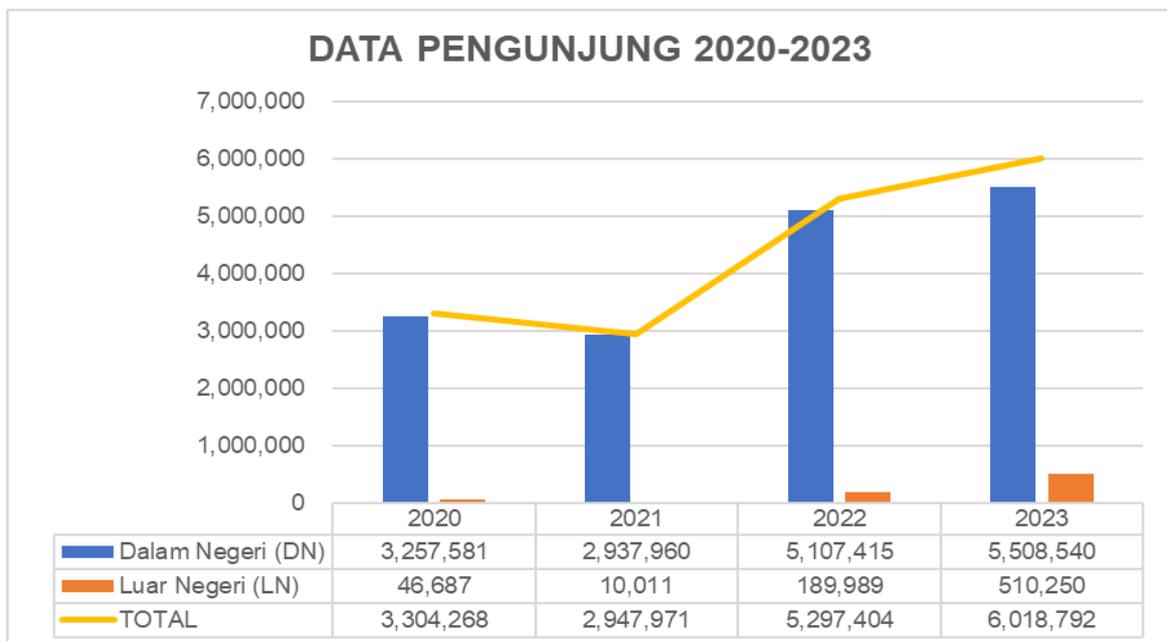
Perizinan Berusaha Peredaran TSL Luar Negeri, Iuran Perizinan Berusaha Peragaan, Pungutan Blanko SATS LN. Sementara PNBP dari kegiatan TSL Dalam Negeri dipungut oleh Bendahara

Penerimaan PNBP di setiap UPT, yaitu pada UPT BBKSDA/BKSDA dari komponen pungutan penangkapan/pengambilan TSL dari alam, penguatan perdagangan spesimen TSL, Iuran Perizinan Pemanfaatan TSL dan Pungutan

Bloka Administrasi SATS DN. Sedangkan PNBP TSL pada UPT TN dari pungutan untuk kegiatan penelitian, pengambilan gambar di wilayah TN. Rincian penerimaan PNBP setiap Satker disampaikan dalam lampiran.



Gambar 35. Dokumentasi kunjungan wisata TWA Gunung Tangkuban Perahu dan TN Gunung Gede Pangrango



Gambar 36. Jumlah Data Pengunjung Wisata Tahun 2020-2023

Tabel. 4. Pengunjung Kawasan Konservasi

No	Tahun	Data Pengunjung										Jumlah Total		
		Taman Nasional		Taman Wisata Alam		Taman Buru		Suaka Margasatwa		Cagar Alam				
		DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	Jumlah
1	2020	1.760.829	32.368	1.490.867	14.260	539	0	4.408	49	938	10	3.257.581	46.687	3.304.268
2	2021	1.472.641	8.743	1.460.129	1.157	3.612	100	1.048	5	530	6	2.937.960	10.011	2.947.971
3	2022	2.604.049	149.908	2.483.609	39.506	4.841	500	13.239	72	1.677	3	5.107.415	189.989	5.297.404
4	2023	2.769.280	367.353	2.720.697	140.793	4.975	4	13.009	2.096	579	6	5.508.540	510.250	6.018.792

Infografis Data Pengunjung Tahun 2020-2023 memperlihatkan terjadinya penurunan pengunjung dari tahun 2020 (3.304.268) -2021 (2.947.971) sebagai dampak dari merebaknya wabah virus Covid-19 yang menyebabkan ditutupnya destinasi-destinasi wisata termasuk di kawasan konservasi. Pembukaan kembali wisata alam (re-aktivasi) Tahap I melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.261/MENLHK/KSDAE/KSA.0/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 dan Surat Edaran Dirjen KSDAE Nomor SE.9/KSDAE/PJLHK/KSA.3/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang tentang Kebijakan Reaktivasi Secara Bertahap di Kawasan TN, TWA, dan SM dalam Kondisi Transisi Akhir Covid-19 (New Normal) pada periode tersebut belum memberikan stimulan bagi para pengunjung karena masih ketatnya peraturan terkait mobilisasi masyarakat pada masa Covid-19. Re-aktivasi wisata alam dilakukan dengan pertimbangan:

1. Kawasan konservasi merupakan penggerak perekonomian dari sektor wisata alam
2. Untuk pemulihan kondisi psikologis masyarakat

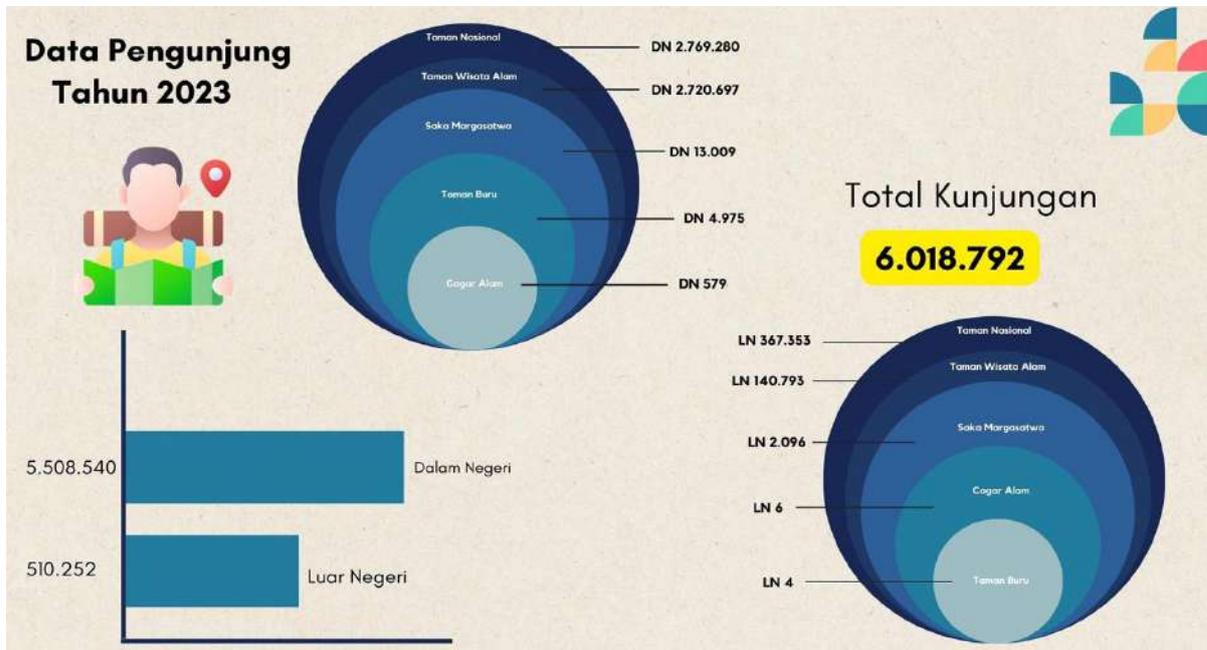
3. Mendorong *multiplier effect*
4. Adanya Rekomendasi BNPB bahwa pariwisata alam termasuk kategori aktivitas resiko rendah
5. Pembukaan hanya pada zona hijau dan kuning.

Namun pada tahun 2021-2022 terjadi kenaikan kunjungan wisata yang cukup signifikan di kawasan konservasi dari 2.947.971 orang menjadi 5.297.404 orang seiring dengan melonggarnya peraturan terkait penanganan pandemi Covid-19. Kenaikan kunjungan ini terus berlanjut hingga tahun 2023 yaitu 6.018.792 orang.

Total kunjungan wisatawan dalam negeri dan luar negeri di kawasan konservasi sebanyak 6.018.792 orang atau dengan komposisi wisatawan dalam negeri adalah 5.508.540 orang dan wisatawan luar negeri sebanyak 510.250 orang. Dengan demikian, kunjungan wisatawan dalam negeri lebih tinggi dibandingkan wisatawan luar negeri pada tahun 2023. Berdasarkan fungsi kawasan, pada tahun 2023 kunjungan wisatawan terbesar adalah ke Taman Nasional dilanjutkan ke Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru

dan Cagar Alam. Kondisi serupa terjadi pada wisatawan luar negeri dengan kunjungan tertinggi ke

Taman Nasional diikuti Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Alam dan Taman Buru.



Gambar 37. Data pengunjung tahun 2023

Kenaikan PNBP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2023 selain disumbang oleh PNBP yang dihasilkan dari jasa lingkungan juga dihasilkan oleh pemanfaatan TSL. PNBP pemanfaatan TSL tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,64% dibandingkan

dengan PNBP tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jenis TSL yang dimanfaatkan sesuai kuota di tingkat unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Tabel 5. Nilai PNBP pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL Tahun 2020-2023

No	Tahun	Nilai PNBP (Rp)		Total Nilai PNBP
		Pemanfaatan Jasling	TSL	
1	2020	53.808.852.413	24.542.795.044	78.351.647.457
2	2021	44.394.783.498	30.891.265.755	75.286.049.253
3	2022	102.361.793.810	27.370.150.233	129.731.944.043
4	2023	157.381.423.168	28.366.908.191	185.748.331.359
Total		357.946.852.869	111.171.119.223	469.117.972.112

Sumber: Dit PJLKK dan Dit KKHSG, 2024

Nilai PNBП pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL selama empat tahun terakhir masa periode Renstra 2020-2024, mengalami kenaikan, terutama PNBП yang berasal dari jasa lingkungan. Kenaikan PNBП jasa lingkungan disokong oleh pendapatan dari

wisata alam. Semenjak tahun 2022 sektor pariwisata terus menggeliat setelah berakhirnya pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah pengunjung wisata yang berdampak secara langsung terhadap peningkatan PNBП.

Benchmarking

PNBП merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. KLHK sebagai satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBП sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai amanat pada Renstra Kementerian LHK, untuk mendukung sasaran strategis Meningkatnya penerimaan negara dari lingkungan hidup dan kehutanan, maka ditetapkan IKU "Nilai PNBП Fungsional KLHK".



Gambar 38. Nilai PNBП Ditjen KSDAE, Ditjen PHL, Ditjen PKTL Tahun 2023

Pencapaian IKU ini didukung oleh 3 Eselon I yaitu Ditjen PHL melalui nilai PNBП dari pemanfaatan hutan, Ditjen KSDAE berasal dari nilai PNBП dari pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari, dan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) melalui seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Realisasi PNBП ini sesuai dengan tujuan makro ekonomi Kementerian LHK, yaitu menyeimbangkan ruang gerak fiskal dan meningkatkan kualitas belanja serta sinergi pendanaan. Hal ini juga sebagai upaya peningkatan value for money termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah di bidang LHK. Selain itu, penerimaan negara yang bersumber dari produksi kayu bulat dan pendapatan jasa lingkungan di taman nasional dan kawasan konservasi lainnya telah menyumbang pemasukan devisa negara.

5. IKP JUMLAH DESA DI KAWASAN KONSERVASI YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Gambar 39. Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja 2023



Gambar 40. Capaian kinerja tahun 2020-2024 terhadap target Renstra 2020-2024

Paradigma pengelolaan kawasan konservasi saat ini menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi melalui kerangka pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Salah satu proses penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Hal ini sejalan dengan salah satu pencapaian Indikator Kinerja "Jumlah Desa di Kawasan Konservasi yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat". Pendampingan dalam rangka pemberdayaan dilakukan

melalui banyak hal diantaranya melalui kesepakatan konservasi, pemberian akses pemanfaatan tradisional, peningkatan unit usaha kelompok masyarakat, serta pemberian pendampingan dalam pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi. Kesepakatan konservasi antara Kepala UPT dengan Kepala Desa sekitar kawasan konservasi menjadi salah satu indikator adanya proses pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Seluruh kegiatan pemberdayaan dimaksud tentu saja

memerlukan kerjasama dari tingkat pusat hingga tapak (UPT).

Kegiatan pendampingan masyarakat oleh UPT Lingkup KSDAE dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini diantaranya dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pengembangan kelembagaan/ kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi dalam bentuk penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat, fasilitasi kesepakatan konservasi, pembentukan kelompok binaan, dan penyusunan rencana kelompok,
2. Pendampingan masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam bentuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait, melakukan peningkatan kapasitas untuk pendamping kelompok.
3. Pengembangan ekonomi kelompok masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan modal, memberikan peningkatan kapasitas untuk kelompok dampingan, studi banding, dan sebagainya.

Sedangkan upaya dalam mendukung kegiatan pendampingan masyarakat tersebut dilakukan di Pusat diantaranya melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Penyusunan konsep revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di sekitar KSA dan KPA. Substansi yang termuat dalam konsep revisi PermenLHK tersebut antara lain terkait

pengembangan kapasitas masyarakat, rencana pemberdayaan masyarakat, pemberian akses pemanfaatan (jenis-jenis akses pemanfaatan tradisional), pembinaan pengawasan dan pengendalian, serta sanksi administratif dan pembiayaan.

2. Fasilitasi pemberian akses pemanfaatan tradisional Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis / supervisi untuk menjamin pemanfaatan yang lestari dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Supervisi dilakukan sejak permohonan akses diajukan melalui proses verifikasi baik subjek, objek, sampai dengan tata cara pemanfaatan.
3. Koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan atas progres pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan koordinasi dan supervisi juga dilakukan terhadap penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat sekitar KSA dan KPA dengan berpedoman pada Perdirjen KSDAE Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA, KPA, dan TB.
4. Pemberian apresiasi kelompok binaan dan pendamping kelompok binaan

Apresiasi tahun 2023 diberikan untuk Kategori Kelompok Masyarakat Binaan UPT Lingkup KSDAE. Penilaian dilakukan terhadap 53 kelompok binaan dari 26 UPT KSDAE. Berikut merupakan 10 kelompok masyarakat binaan beserta pendampingnya yang terpilih sebagai penerima apresiasi Kelompok Masyarakat Binaan

UPT Lingkup KSDAE Tahun 2023. Daftar ini disahkan melalui Surat Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: SK.191/KSDAE/SET.3/PEG.7/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023. Apresiasi diberikan pada Puncak Peringatan HKAN 2023 di TWA Bukit Tangkiling, Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 6. Daftar Pemenang Kelompok Masyarakat disekitar Kawasan Konservasi

Urutan Pemenang	Nama Kelompok	Nama Pendamping	UPT Pendamping
Pertama	Kelompok Tani Hutan Warkesi (Desa Saonek, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya)	Adhityo Kusuma, S.Pi	Balai Besar KSDA Papua Barat
Kedua	Desa Binaan Dambu Kahbrai (Desa Dosay, Kecamatan Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua)	Zsa Zsa Fairuztania, S.Hut	Balai Besar KSDA Papua
Ketiga	KTH Pemuda Konservasi Rismet (Desa Cipaganti, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat)	Efi Rustining Tiyas Pratiwi	Balai Besar KSDA Jawa Barat
Keempat	KTH Bodogol Kampung Hoya (Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)	Maria Kurnia Nugrahani, S.Hut	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
Kelima	KTH Madu Darajat Berkah (Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat)	1. Wawan Kustiawan, S. Hut; 2. Toni Ahmad. S	Balai Besar KSDA Jawa Barat
Harapan	Kelompok Tani Hutan Modaga No Suangge (Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara)	1. Aripin Ali; 2. Aris Setyawan, S.Hut; 3. Ebiprila Hasan,S.Hut	Balai TN Bogani Nani Wartabone
Harapan	Kelompok Sadar Wisata Maima (Desa Lawua, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah)	1. Vina Safinatus Sa'adah, S.Hut 2. Muh. Darmawan Basoka, S.Si	Balai Besar TN Lore Lindu
Harapan	Markisi Nung (Desa Yewena, Kecamatan Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua)	1. Chandra Marbun Lumban Gaol, S.Hut; 2. Taufik	Balai Besar KSDA Papua
Harapan	Kelompok Sadar Wisata Muara Mbaduk (MUMBA) (Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur)	Wahyu Candra Kirana, S.Hut	Balai TN Meru Betiri
Harapan	Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH) Matawai Amahu (Desa Wanggameti, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur)	Suyogia Nur Azis, S.Hut	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti

Kegiatan-kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat

dilakukan sebagai upaya Ditjen KSDAE mencapai target IKP Jumlah

desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sejumlah 1.000 desa selama tahun 2023. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi, pemberian akses pemanfaatan tradisional, peningkatan unit usaha kelompok masyarakat, serta pemberian pendampingan dalam pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, Ditjen KSDAE telah mendampingi total 879 desa di 35 provinsi di Indonesia (rincian terlampir). Hal tersebut di atas dapat terealisasi di antaranya karena didukung oleh faktor-faktor berikut:

1. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di kawasan konservasi;
2. Pendampingan intensif yang dilakukan UPT Lingkup KSDAE;
3. Dukungan dan koordinasi yang baik dengan pemerintah desa sekitar kawasan konservasi;
4. Pemberian akses pemanfaatan tradisional hasil hutan bukan kayu;
5. Dukungan mitra pengelola kawasan konservasi seperti LSM, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, swasta, dan proyek-proyek kerja sama.

Tabel 7. Jumlah pendampingan Desa oleh Ditjen KSDAE

Kegiatan	Jumlah UPT	Jumlah Desa	Jumlah Kec	Jumlah Kab	Jumlah Prov
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan konservasi	48	473	317	152	30
Kegiatan Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional	9	23	12	10	8
Kegiatan Peningkatan Usaha Kemitraan Konservasi	36	273	150	71	25
Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	25	110	63	43	21

Capaian sejumlah 879 desa atau 87,9% dari target IKP tahun 2023 ini dicapai melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Sebanyak 473 desa dari 317 kecamatan, 152 kabupaten, 30 provinsi telah memiliki kesepakatan konservasi dengan 48 UPT Lingkup KSDAE.
2. Akses pemanfaatan tradisional telah diberikan kepada 21 kelompok masyarakat (dengan total anggota sebanyak 483 orang) dari 23 desa, 12 kecamatan, 10 kabupaten, 8 provinsi dengan total luasan 21.996,90 hektar.
3. Sebanyak 370 unit usaha kelompok dari 273 desa, 150 kecamatan, 71 kabupaten,

dan 25 provinsi yang telah diberi akses pemanfaatan tradisional telah menerima upaya peningkatan kualitas usahanya.

4. Selain itu sejumlah kelompok dari 110 desa, 63 kecamatan, 43 kabupaten, 21 provinsi telah menerima pendampingan dalam pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka ekowisata (wisata alam, SAVE, dan Bahari).

Persentase capaian kinerja ini menurun cukup signifikan dari capaian tahun 2022 yang mencapai 122,40% dari target 500 desa. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor di antaranya:

1. Terjadinya *refocusing* anggaran yang berpengaruh terhadap alokasi anggaran dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Perubahan pada personil pemerintahan desa (terutama pergantian kepala desa) di tengah proses fasilitasi kesepakatan konservasi.
3. Kondisi lokasi target yang kurang kondusif sehingga belum dapat dilakukan penandatanganan kesepakatan konservasi.
4. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana untuk menjangkau desa target dan mendampingi kelompok masyarakat yang semakin banyak.
5. Perubahan makna terminologi "Kemitraan Konservasi" pasca terbitnya PermenLHK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau

Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB.

6. Pemberian bantuan ekonomi produktif yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok.

Sebagai tindak lanjut memperbaiki capaian di tahun selanjutnya, berikut upaya yang akan dilakukan:

1. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap PermenLHK Nomor 43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA dan KPA;
2. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar KK;
3. Meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah desa maupun mitra pemberdayaan lainnya;
4. Mengidentifikasi kebutuhan bantuan usaha ekonomi produktif secara lebih rinci;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat;
6. Membentuk pendamping lokal yang bertugas mendampingi kelompok masyarakat binaan selain petugas;
7. Mengumpulkan lebih banyak informasi terkait kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Jumlah desa dalam capaian IKP ini selama 4 tahun terakhir yaitu:

Terdapat 2 kegiatan baru yang pada tahun 2023 masuk dalam pengukuran capaian IKP ini, yaitu kegiatan peningkatan usaha kemitraan konservasi dan

peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi, yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024 revisi, dimana pengukuran capaiannya dimulai tahun 2023.

Tabel 8. Jumlah desa dalam capain indikator kinerja Jumlah Desa Di Kawasan Konservasi Yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020-2023

Kegiatan	Jumlah Desa			
	2020	2021	2022	2023
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan konservasi	515	469	541	48
Kegiatan Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional	67	130	71	9
Kegiatan Peningkatan Usaha Kemitraan Konservasi	-	-	-	36
Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	-	-	-	25
Jumlah	582	599	612	879

Benchmarking

Paradigma pengelolaan kawasan konservasi saat ini menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi melalui kerangka pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Salah satu proses penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Kegiatan ini dapat menopang peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Upaya ini selain dilakukan oleh Ditjen KSDAE, juga dilakukan oleh Eselon I lain yaitu Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) melalui desa berketahanan iklim dan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL).



Gambar 41. Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Pada Ditjen PPI, Program Kampung Iklim merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan, serta mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK. Sedangkan desa mandiri peduli mendukung upaya perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Masyarakat yang berada dalam Desa Mandiri Peduli Gambut punya kesadaran tinggi untuk merestorasi lahan gambut. Perlindungan gambut oleh masyarakat, selain memberikan keuntungan yang cukup baik dari sisi lingkungan, melainkan juga dari sisi ekonomi.



Gambar 42. Kegiatan ekowisata *Birdwatching* oleh KTH Warkesi binaan BBKSDA Papua Barat.



Gambar 43. Pemberian Apresiasi Kelompok Masyarakat Binaan UPT Lingkup KSDAE pada Puncak HKAN 2023



Gambar 44. Pengambilan Aren di zona tradisional TN Bogani Nani Wartabone oleh KTH Modaga No Suangge binaan Balai TN Bogani Nani Wartabone

6. NILAI SAKIP DIREKTORAT JENDERAL KSDAE



Gambar 45. Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja 2023



Gambar 46. Capaian kinerja tahun 2020-2024 terhadap target Renstra 2020-2024

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP.

Evaluasi AKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP tingkat Eselon I dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KLHK, terhadap 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.

Pada tahun 2023 telah dilakukan evaluasi SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE terhadap 4 komponen akuntabilitas kinerja. Implementasi atas SAKIP tahun 2022 dilakukan penilaian pada tahun 2023. Penilaian SAKIP tersebut dilakukan pada tingkat Eselon I dan Eselon II Pusat lingkup Ditjen KSDAE. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Berdasarkan laporan hasil evaluasi tim Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Nomor: SP.57/ITJEN/ITWIL.1/RHS/WAS.3/4/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, secara keseluruhan nilai atas implementasi SAKIP Ditjen KSDAE yaitu 79,88 dengan nilai BB (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan target nilai SAKIP berdasarkan PK Ditjen KSDAE tahun 2023 (78 Poin), maka capaian kinerjanya adalah sebesar 102,41 Poin.

Tabel 9. Hasil Penilaian SAKIP pada 4 Komponen Akuntabilitas

No	Komponen Akuntabilitas	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,53
2	Pengukuran Kinerja	30	20,68
3	Pelaporan Kinerja	15	11,32
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,33
Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP		100	79,88

Sumber: Setditjen KSDAE, 2023

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana dalam Renstra Ditjen

KSDAE 2020-2024 (80 Poin), maka capaian kinerjanya adalah sebesar **99,85%**. Tindak lanjut atas

evaluasi implementasi SAKIP Ditjen KSDAE senantiasa dilakukan perbaikan sehingga diharapkan target 80 poin dapat tercapai pada tahun 2024 sebagai akhir tahun periode Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024.

Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE selama 5 tahun terakhir mempunyai nilai yang berfluktuatif.

Tabel 10. Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2020	78	79,37	101,75
2	2021	78,5	80,02	101,93
3	2022	79	79,12	100,15
4	2023	79,5	79,88	100,57

Sumber: Setditjen KSDAE, 2023

Hal-hal yang mempengaruhi penilaian atas implementasi SAKIP yaitu:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Pengukuran kinerja yang berjenjang dan berkelanjutan serta menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja.
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

Hasil Rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK terhadap SAKIP Ditjen KSDAE 2023 yaitu:

1. Menetapkan pedoman penghitungan capaian IKP-IKK lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan melakukan pengawasan capaian IKP tersebut
2. Lebih cermat dalam menetapkan nilai target kinerja tahunan dalam Perjanjian Kinerja (PK) agar selaras dengan Renja dan Renstra Ditjen KSDAE
3. Bidang dukungan manajemen: melengkapi bukti dokumen bahwa setiap pegawai merumuskan dan menetapkan PK, melengkapi bukti dokumen bahwa setiap pegawai telah menyusun dan menandatangani SKP tahun 2022, dalam pengukuran capaian kinerja agar dapat menggunakan aplikasi yang sudah tersedia ataupun

dibuat oleh pihak lain, dan melengkapi hasil survei dari stakeholder/para pihak.

4. Bidang PJLKK agar: melakukan penelaahan atas metode verified atas capaian IKK yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024 dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing IKK dan capaiannya; menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja untuk capaian masing-masing IKK pada Rencana Strategis 2020-2024; serta meninjau kembali/menentukan *bridging reasoning* lokasi untuk capaian IKK 4 kawasan yang pengelolaannya bukan satker KSDAE yaitu KHDTK Aek Nauli dan Hutan Pendidikan Wanagama; serta menyajikan informasi tentang analisa efisiensi penggunaan sumber daya, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja dalam Laporan Kinerja.
5. Bidang KKHSG agar meningkatkan pengawalan capaian kinerja pada periode berikutnya sesuai dengan target Renstra dan Renja.
6. Bidang Perencanaan Kawasan Konservasi agar melakukan penelaahan atas IKK 3 yang memiliki target yang sama mulai 2023 s.d 2024 yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024.
7. Bidang Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi agar memperbaiki Perjanjian Kinerja tahun 2023 sesuai dengan Renstra 2020-2024 (revisi) dan Renja 2023.

Benchmarking

Optimalisasi implementasi SAKIP menjadi fokus pembenahan dan prioritas instansi pemerintah. SAKIP didorong tidak hanya berorientasi output, tapi juga berorientasi pada hasil (outcome) dan berdampak, serta dapat menyelesaikan masalah nyata di masyarakat.

Nilai SAKIP KLHK mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Begitu juga nilai SAKIP lingkup Eselon I KLHK.

Tabel 11. Nilai SAKIP tahun 2022

LEMBAGA	Nilai
Kementerian LHK	73,07
Inspektorat Jenderal	82,23
Ditjen KSDAE	79,88
Ditjen PKTL	79,29
Ditjen PHL	78,62
Ditjen PHLHK	77,19

Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan komitmen dan antusiasme instansi pemerintah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi.

Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran. Hal ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan RB dan SAKIP ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pada awal tahun 2023 Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 1.667.784.111.000,-. Sejalan dengan adanya berbagai kebijakan dan kebutuhan, terdapat beberapa perubahan pagu anggaran, antara lain yaitu:

1. Pada bulan Februari 2023, telah dilakukan revisi buka blokir PHB dan penambahan anggaran HLN BCCPGLE sebesar Rp 15.350.638.000,-
2. Pada bulan Maret 2023 telah dilakukan revisi buka blokir kode KLH dan top up FIP-1 sebesar Rp 1.496.648.000,-
3. Pada bulan Mei 2023 telah dilakukan revisi penambahan pagu PNB (Gakkum) sebesar Rp 9 M, dengan rincian BTN Karimunjawa (3,5 M), BTN Komodo (500 Juta) dan Kantor Pusat (5 M)
4. Pada bulan Juli 2023 telah dilakukan revisi sebesar Rp 15.519.447.000,- untuk revisi realokasi belanja pegawai ke BA-BUN, revisi pemenuhan kekurangan belanja pegawai pada BKSDA Sulawesi Utara dari kantor

pusat dan revisi top up HLN FP III dan FP II.

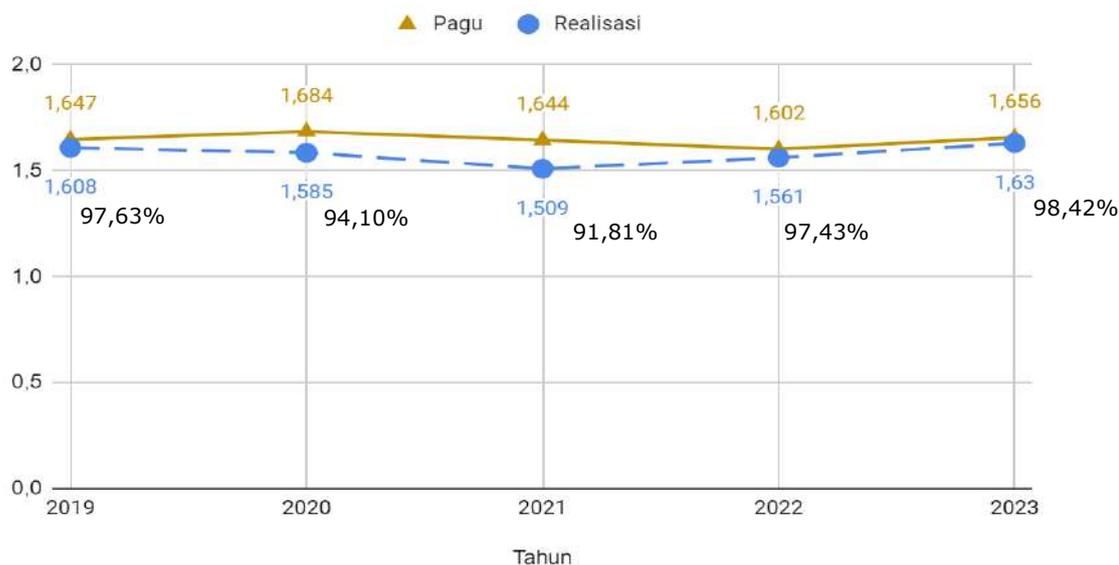
5. Pada bulan Oktober 2023 telah dilakukan revisi terkait tindak lanjut penyelesaian relaksasi non belanja pegawai dari *Automatic Adjustment* sebesar Rp 27.138.098.000,-
6. Pada tanggal 30 Oktober 2023 dilakukan revisi optimalisasi belanja pegawai dalam pemenuhan pembayaran gaji PPPK TA 2023 sebesar Rp 4.072.774.000,-
7. Pada tanggal 19 Desember 2023 dilakukan revisi optimalisasi belanja pegawai Lingkup Ditjen KSDAE sebesar Rp 1.525.000.000,-.

Dengan berbagai perubahan tersebut, pada akhir tahun 2023 pagu Ditjen KSDAE menjadi sebesar **Rp 1.670.370.392.000,-** atau naik 0,15% dari pagu awal.

Berdasarkan hasil pemantauan pada sistem OMSPAN, hingga akhir tahun 2023 Ditjen KSDAE merealisasikan anggaran sebesar **Rp 1.643.990.813.378,-** atau **98,42%** dari pagu Rp 1.670.370.392.000,-. Realisasi anggaran ini meningkat 0,99% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar

Rp 1.561.217.903.467 atau 97,43% dari pagu Rp 1.602.333.693.000,-. Realisasi tersebut menempatkan Ditjen KSDAE Pada peringkat 9 dari

13 Eselon I lingkup Kementerian LHK, dengan rata rata realisasi anggaran seluruh eselon I sebesar 98,40%.

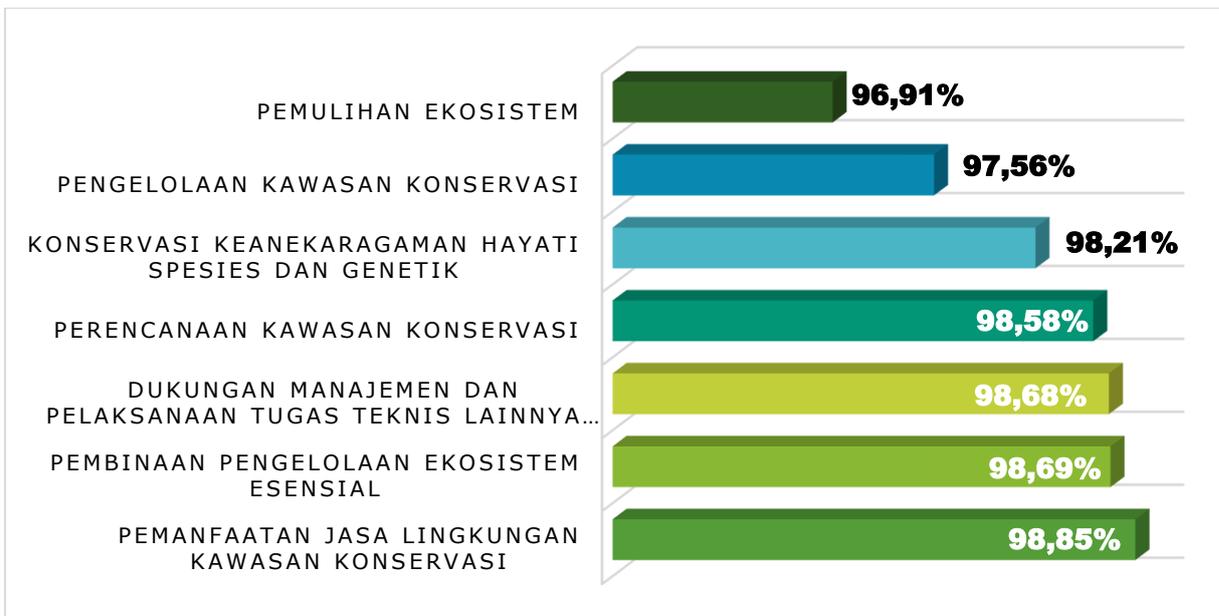


Gambar 47. Perbandingan PAGU anggaran dan realisasi anggaran

Berdasarkan kegiatan yang mendapatkan alokasi pagu anggaran terbesar adalah Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE sebesar Rp 1.089.216.062.000,-, alokasi ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, dukungan manajemen, serta layanan sarana prasarana internal pada 75 satuan kerja Lingkup Ditjen KSDAE. Sedangkan alokasi anggaran terendah pada kegiatan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial sebesar 0,57% anggaran

dialokasikan pada 24 satuan kerja lingkup Ditjen KSDAE yang terdiri dari Direktorat BPPE dan 23 UPT KSDA.

Penyerapan anggaran tertinggi pada kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (98,85%) untuk kegiatan pembangunan infrastruktur wisata alam di TWA Kawah Ijen BBKSDA Jawa Timur, Pembuatan jalur pendakian di BTN Gunung Rinjani, BTN Gunung Merapi.



Gambar 48. Persentase penggunaan anggaran Setditjen KSDAE

Tabel 12. Anggaran berdasarkan jenis belanja

Pagu dan Realisasi	Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja			Total Pagu dan Realisasi
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
Pagu (Rp)	707.841.356.000	827.217.185.000	135.311.851.000	1.670.370.392.000
Realisasi (Rp)	698.402.244.176 98,67 %	810.768.668.713 98,01 %	134.819.900.489 99,64 %	1.643.990.813.378 98,42 %

Alokasi anggaran Ditjen KSDAE berdasarkan jenis belanja, secara berturut-turut proporsi jenis belanja Ditjen KSDAE tahun 2023 yang tertinggi hingga terendah, yaitu belanja modal (8,10%), belanja pegawai (42,37%), dan belanja barang (49,52%). Sedangkan untuk penyerapan anggaran, yang tertinggi adalah belanja modal sebesar 99,64%, kemudian belanja pegawai sebesar 98,67% dan belanja barang

98,01%. Masih terdapat sisa anggaran pada belanja pegawai sebesar Rp 9,6 M dimana merupakan selisih dari cadangan alokasi anggaran untuk kenaikan tunjangan kinerja 80% tetapi tidak terbayarkan, serta masih terdapat juga sisa dana sebesar Rp 16,4 M pada belanja barang dikarenakan tidak terserapnya perjalanan dinas, paket rapat dan honor honor untuk narasumber.

Tabel 13. Pagu anggaran dan persentase realisasi

Anggaran / Sumber Dana	Pagu	Realisasi	
RM	1.430.453.889.000	1.410.086.809.163	98,58%
PNBP	159.000.030.000	154.929.154.504	97,44%
HLN	67.117.707.000	65.176.162.933	97,11%
HLLN	13.798.766.000	13.798.686.778	100%
Jumlah	1.670.370.392.000	1.643.990.813.378	98,42%

Berdasarkan jenis sumber dana Ditjen KSDAE pada tahun 2023 memiliki 4 jenis sumber dana, dengan alokasi terbesar pada sumber dana RM sebesar 85,63% dan yang terendah pada sumber dana HLLN sebesar 0,82%, sedangkan untuk penyerapan anggaran yang tertinggi pada sumber

dana HLLN sebesar 100%. kegiatan yang bersumber dana HLLN pada tahun 2023 dilaksanakan oleh pihak *Conserve* yang dimana masuk kedalam kegiatan dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik yang diluncurkan pada akhir tahun 2022.

C. NILAI KINERJA ANGGARAN

Nilai kinerja anggaran merupakan nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran berdasarkan aspek penyerapan anggaran, pencapaian target kinerja, dan pengelolaan perbendaharaannya. Perhitungan NKA mulai tahun 2023

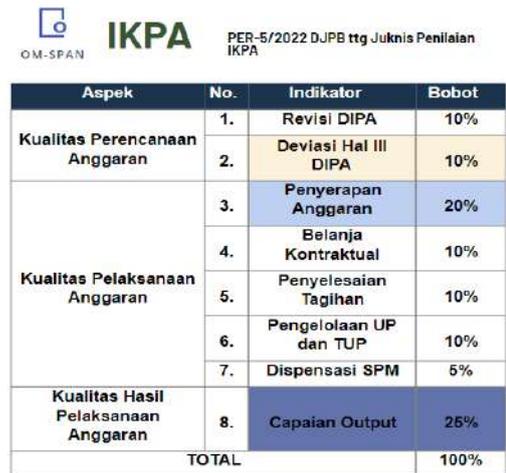
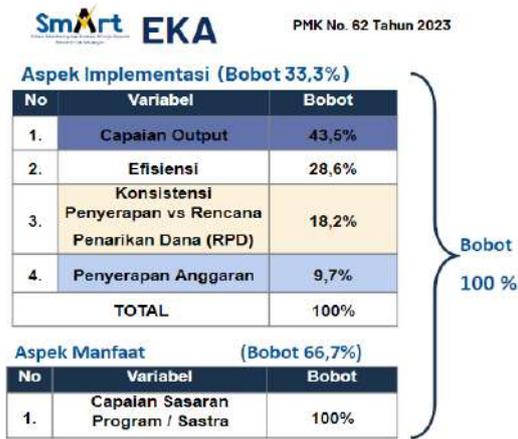
terdapat perubahan bobot ditentukan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 50% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50%.



Gambar 49. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran 2023

Nilai EKA diperoleh melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Nilai ini merupakan salah satu parameter untuk menilai kinerja anggaran. Dalam penilaiannya, nilai EKA menggunakan 6 komponen penilaian yaitu penyerapan anggaran, konsistensi, capaian output program, efisiensi output program, capaian sasaran program, dan rata-rata satker. Sedangkan nilai IKPA diperoleh melalui aplikasi OMSPAN. Nilai ini mencerminkan kualitas perbendaharaan suatu instansi. Dalam penilaiannya, nilai IKPA

menggunakan 3 aspek, yang setiap aspeknya terdapat komponen penilaian lagi yaitu 1) kualitas perencanaan anggaran, dengan komponen 2 penilaian yaitu revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA, 2) kualitas pelaksanaan anggaran, dengan 5 komponen penilaian yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM, dan 3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan komponen penilaian adalah capaian output, bobot variabel penilaian kinerja anggaran seperti gambar dibawah ini.



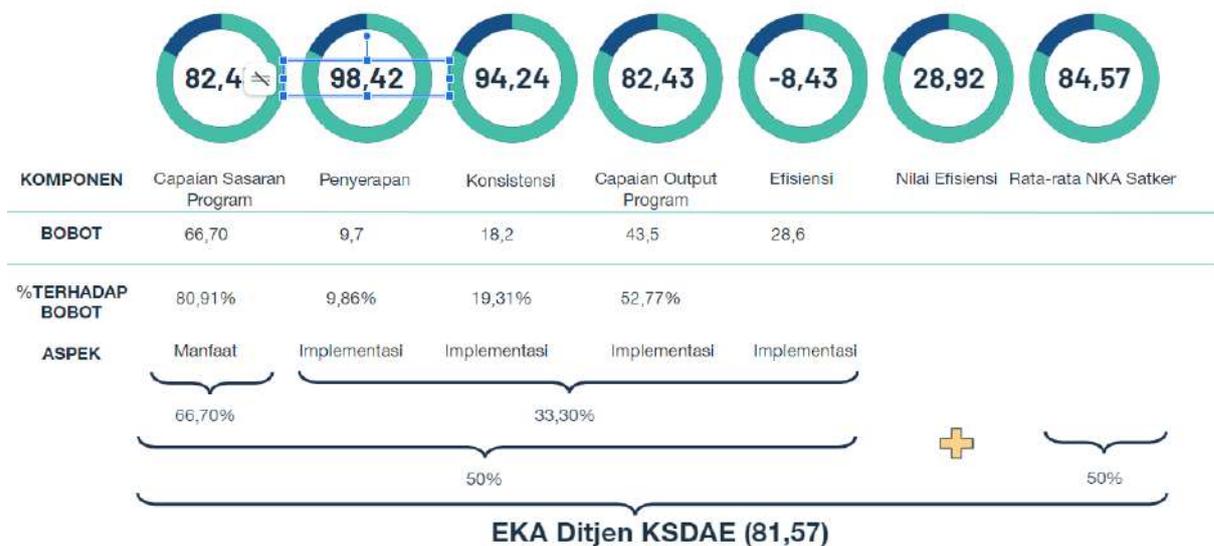
Gambar 50. 3 aspek penilaian IKPA

Nilai EKA Ditjen KSDAE tahun 2023 terpantau sebesar 82,43 yang termasuk dalam kategori Baik. Adapun nilai setiap komponen yaitu penyerapan anggaran dengan nilai 98,42, konsistensi dengan nilai 94,24,

capaian output program dengan nilai 82,43, efisiensi output program dengan nilai -8,43, capaian sasaran program dengan nilai 82,43, dan rata-rata satker dengan nilai 84,57. Lebih detail seperti gambar dibawah ini.

Evaluasi Kinerja Anggaran Ditjen KSDAE tahun 2023

(Aplikasi SMART DJA 2023)



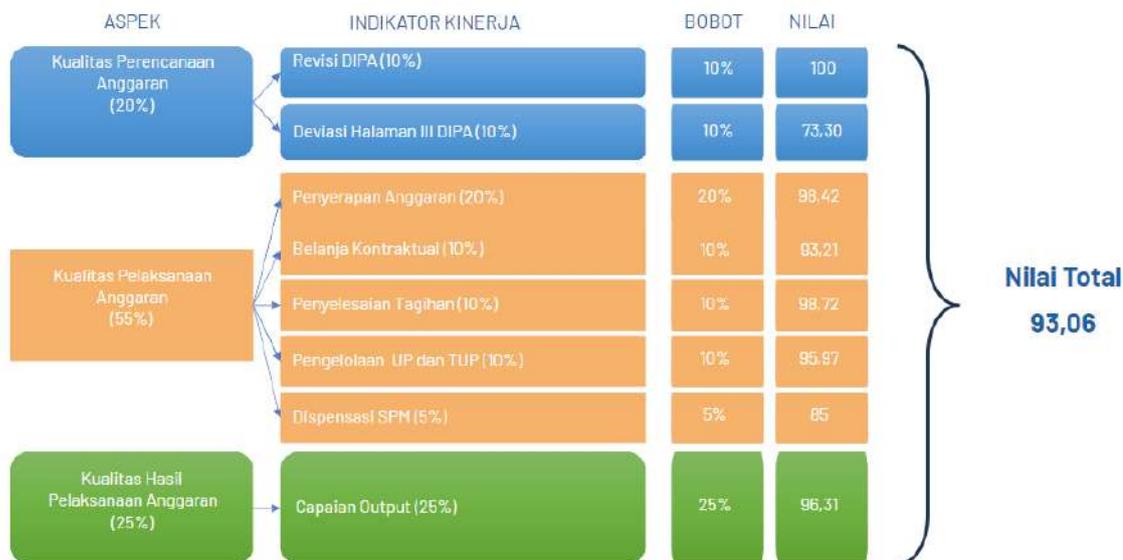
Gambar 51. Evaluasi Kinerja Anggaran DITJEN KSDAE Tahun 2023

Nilai IKPA Ditjen KSDAE tahun 2023 sebesar 93,06, dengan nilai tiap aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran dengan nilai 86,65, kualitas pelaksanaan anggaran dengan nilai

92,93, kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan nilai 96,34. Nilai lebih rinci disampaikan sebagaimana gambar dibawah ini

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen KSDAE tahun 2023

(Aplikasi OM SPAN 2023)

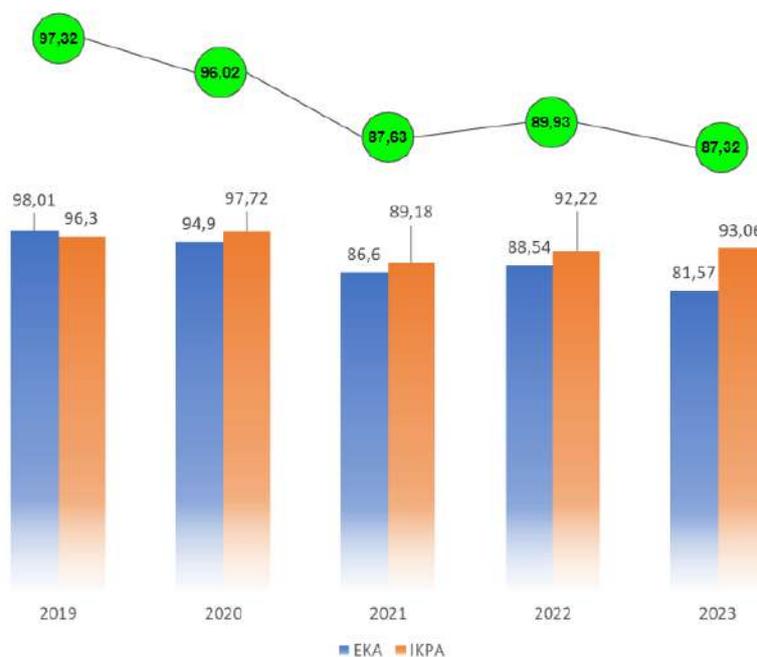


Gambar 52. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DITJEN KSDAE 2023

Berdasarkan nilai EKA dan IKPA tersebut diatas, dapat diketahui NKA Ditjen KSDAE tahun 2023 sebesar 87,32 (per 17 Januari 2024). NKA

pada Ditjen KSDAE mempunyai nilai yang berfluktuasi. Dalam 5 tahun terakhir, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 97,32.

Tren Nilai Kinerja Anggaran Ditjen KSDAE 5 tahun terakhir



Gambar 53. Tren Nilai Kinerja Anggaran DITJEN KSDAE 5 tahun terakhir

D. PEMANTAUAN KEGIATAN TEMATIK

Pada tahun 2023, Ditjen KSDAE mendapatkan mandat untuk turut serta dalam mensukseskan kegiatan yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yaitu kebijakan kelautan Indonesia 2023. Selain kegiatan kebijakan kelautan Indonesia Ditjen KSDAE juga memantau kegiatan aksi tematik KemenLHK yaitu Program Prioritas Nasional, Kegiatan Ibu Kota Negara (IKN), Kegiatan Perbatasan, Kegiatan Padat Karya.

1. Pemantauan Kantor Staf Presiden a) Kegiatan Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2023

Kegiatan ini berdasarkan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2021 - 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 dimana pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan kebijakan kelautan Indonesia disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi secara periodik sesuai dengan Rencana Aksi pada bulan ke-6 (enam), ke-9 (sembilan) dan ke-12 (dua belas) pada setiap tahunnya.

Berkembangnya wisata alam bahari pada kawasan konservasi dan tersedianya dokumen inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi menjadi ukuran keberhasilan dari kegiatan di KLHK khususnya Ditjen KSDAE dimana target yang dibebankan berupa:

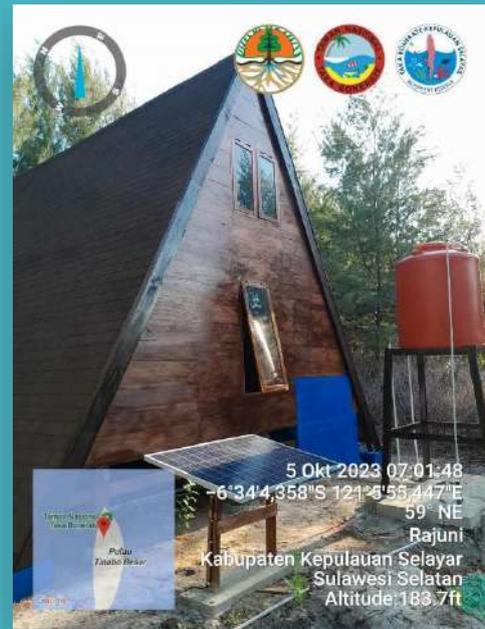
- Jumlah destinasi wisata alam bahari Ditjen KSDAE di 3 lokasi yaitu:
 - 1) BTN Kepulauan Togean terbangunnya pos media informasi wisata
 - 2) BTN Bunaken terdapat kapal pengawas wisata
 - 3) BTN Takabonerate pembangunan Wisma Tinabo
- Tersedianya dokumen inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi Ditjen KSDAE di 7 lokasi yaitu :
 - 1) BTN Bunaken
 - 2) BTN Takabonerate
 - 3) BTN Kepulauan Togean
 - 4) BTN Karimunjawa
 - 5) BTN Wakatobi
 - 6) BBTN Teluk Cendrawasih
 - 7) BTN Kepulauan Seribu



Gambar 54. Pengadaan kapal pengawas wisata BTN Bunaken



Gambar 55. Pembangunan pos media informasi wisata BTN Kepulauan Togean



Gambar 56. Pembangunan Wisma Tinabo BTN Taka Bonerate

2. Program Prioritas Nasional
 Dasar Pemantauan kegiatan ini berdasarkan rencana strategis KemenLHK tahun 2020-2024, ukuran keberhasilan tercapainya program nasional tahun 2023. Dimana Ditjen KSDAE termasuk kedalam 3 prioritas yaitu:

- Prioritas Nasional 1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
- Prioritas Nasional 2 mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- Prioritas Nasional 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Ukuran keberhasilan kegiatan ini tercapainya realisasi

anggaran dan kinerja Ditjen KSDAE pada PN 1, PN 2 dan PN 6, salah satunya peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah dimana sampai dengan tahun 2023 Ditjen KSDAE mendapatkan target sebesar 500 lokasi dengan anggaran sebesar Rp 59.725.941.000,- dimana sampai dengan akhir tahun 2023 sudah tercapai 705 lokasi dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 57.590.761.675,-. Selain itu terdapat kegiatan penanganan konflik satwa sebanyak 749 kegiatan, dengan 5 satwa yang paling banyak berkonflik yaitu gajah sumatera (273 kali), buaya muara (127 kali), harimau sumatera (75 kali), beruang madu (65 kali) dan monyet ekor panjang (57 kali).



Gambar 57. Pagu dan Realisasi Prioritas Nasional Ditjen KSDAE

3. Kegiatan Padat Karya
Pelaksana program padat karya pada Ditjen KSDAE adalah 74 satker yang terdiri dari 26 satker yang terdiri dari 26 satker KSDA dan 48 satker taman nasional. Ukuran keberhasilan untuk program ini adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung yang diketahui melalui jumlah tenaga kerja (HOK).

Selama tahun 2023, kegiatan Ditjen KSDAE yang mendukung kegiatan padat karya yaitu, kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, akses pemanfaatan kemitraan konservasi di

kawasan konservasi, peningkatan perlindungan dan pengamanan di kawasan konservasi, fasilitasi usaha ekonomi produktif di kawasan konservasi, pemulihan ekosistem di kawasan konservasi, ekosistem esensial, koridor hidupan liar, taman kehati, dan ABKT, penyelamatan satwa liar.

Anggaran yang tercatat untuk mendukung kegiatan padat karya pada Satker Ditjen KSDAE sebesar Rp 192.540.804.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp 182.026.462.701,- atau 94,54%.

Tabel 14. Kegiatan Padat Karya Ditjen KSDAE TA 2023

No	Nama RO	Anggaran RO (Rp)	Realisasi RO (Rp)	%	Aliran Dana ke Masyarakat (Rp)	Jumlah Orang yang Terlibat	Serapan HOK
1	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	17.741.642.000	16.741.079.986	94,36	1.130.472.000	1.386	13.793
2	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	5.832.563.000	5.418.971.114	92,91	246.688.000	738	5.241
3	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	107.363.521.000	102.127.562.226	95,12	12.446.854.800	7.255	192.890
4	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	3.601.150.000	3.590.884.463	99,71	62.900.000	237	536
5	Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	36.331.327.000	34.148.163.656	93,99	7.297.422.500	6.560	102.324
6	Penyelamatan Satwa Liar	21.670.601.000	19.999.801.256	92,29	727.935.000	737	7.402
TOTAL		192.540.804.000	182.026.462.701	94,54	21.912.272.300	16.913	322.185



Gambar 58. Pemulihan mangrove dan terumbu karang di kawasan BTN Wakatobi



Gambar 59. Kegiatan pemadaman kebakaran hutan bersama masyarakat dan mitra di resort sembalun BTN Gunung Rinjani

4. Kegiatan Daerah Perbatasan

Pemantauan dilakukan berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Pasal 3 Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Perpres 44 tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dimana kegiatan ini dipantau Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia. Tujuan pemantauan kegiatan daerah perbatasan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan perbatasan sebagai wujud upaya hadirnya negara dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan sosial.

Keberhasilan kegiatan pengelolaan daerah perbatasan merupakan dasar pemantauan untuk mendukung rencana pemerintah dalam rangka efektifitas pengelolaan perbatasan negara sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing dan aman. Pada tahun 2023, Ditjen KSDAE memantau kegiatan perbatasan di wilayah BKSDA Aceh, BBKSDA Riau, BKSDA Kalimantan Barat, BBTN Betung Kerihun Danau

Sentarum, BTN Kayan Mentarang, BTN Bukit Baka Bukit Raya, BBKSDA Nusa Tenggara Timur, BBKSDA Papua dan BBKSDA Papua Barat.

Kegiatan yang dilakukan berupa pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat di sekitar KK, pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar KK, perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, pengendalian kebakaran hutan, fasilitasi pendampingan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa sekitar kawasan konservasi. Pada tahun 2023 Ditjen KSDAE mendapatkan pagu untuk mendukung kegiatan pengelolaan daerah perbatasan sebesar Rp 8.038.926.667,- dengan serapan sebesar Rp 7.321.207.193,- atau 91,07%, anggaran ini merupakan anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada lokasi Kabupaten/Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Tabel 15. Dukungan anggaran pada Pengelolaan Perbatasan Ditjen KSDAE TA 2023

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di sekitar KK	731.180.000	715.480.434	97,85
2	Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK	440.160.000	415.429.703	94,38
3	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	3.864.214.287	3.476.289.861	89,96
4	Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi	202.115.714	198.881.429	98,40
5	Pengembangan Kelembagaan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat	802.220.000	780.731.300	97,32
6	Fasilitasi Pendampingan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	317.939.000	292.535.800	92,01
7	Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK	1.163.190.999	1.025.086.500	88,13
8	Inventarisasi Wilayah dan Verifikasi Kemitraan Konservasi	362.651.667	316.979.226	87,41
9	Fasilitasi Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat	155.255.000	99.792.940	64,28
TOTAL		8.038.926.667	7.321.207.193	91,07



PENUTUP

Laporan Kinerja Ditjen KSDAE 2023 menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2023, sebagai pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri LHK. Pencapaian kinerja diukur melalui enam indikator kinerja program dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,69%.

Capaian setiap indikator kinerja program yaitu 1) Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi terealisasi seluas 15.611.293,24 hektar atau 150% (156,11%) dari target 10 juta hektar; 2) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif terealisasi seluas 13.020.000 hektar atau 108,5% dari target 12 juta hektar; 3) Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa yang lestari dan berkelanjutan terealisasi Rp 1,73 Triliun atau 80,56% dari target Rp 2,15 Triliun; 4) Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan

pelaksanaan kinerja dan anggaran, yaitu blokir *Automatic Adjustment*, *top up* HLN, *top up* sumber dana PNBP, dan *top up* belanja pegawai. Blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp 80,85 M pada awal tahun 2023 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 20,94 M dan belanja non

Pemanfaatan TSL secara Lestari terealisasi Rp 185,75 Miliar atau 80,76% dari target Rp 230 Miliar; 5) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terealisasi 879 desa atau 87,90% dari target 1.000 desa; dan 6) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terealisasi 79,88 poin atau 102,41% dari target 78 poin.

Dalam pencapaian kinerja tersebut, KSDAE mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.670.370.392.000,- dengan realisasi Rp 1.643.990.813.378,- atau **98,42%**. Berdasarkan perbandingan persentase penyerapan anggaran dengan persentase rata-rata capaian kinerja sebesar **101,69%**, diperoleh nilai **0,97**, yang berarti Ditjen KSDAE efisien dalam penggunaan anggarannya untuk pencapaian kinerja.

Dalam perjalanannya, sepanjang tahun 2023 terdapat dinamika pagu anggaran Ditjen KSDAE yang mempengaruhi operasional sebesar Rp 59,92 M. Blokir AA non ops pada program PHB direlaksasi sebesar Rp 32 M yang digunakan untuk penanganan dampak *el nino* yaitu pada Kantor Pusat dan 37 UPT, sedangkan sisa blokir sebesar Rp 27,14 M dikembalikan ke BA BUN. Pada akhir

tahun 2023, juga terdapat revisi optimalisasi belanja pegawai dalam pemenuhan pembayaran gaji PPPK TA 2023 sebesar Rp 4,07 M.

Atas capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023, Ditjen KSDAE akan terus meningkatkan kinerja pembangunan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Kedepan, Ditjen KSDAE akan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, dengan melakukan transformasi tata kelola kawasan konservasi berbasis

lanskap, ekosistem dan masyarakat, sehingga didapatkan manfaat baik kelestarian alam maupun kesejahteraan masyarakat.

Sebagai akhir dari laporan kinerja ini, dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Ditjen KSDAE dapat meningkatkan sinkronisasi dan sinergi dengan seluruh pihak untuk dapat bersama-sama membangun tapak kawasan hutan serta bekerja sama dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2023 (Revisi)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. SATYAWAN PUDYATMOKO, S.Hut., M.Agr.Sc

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua,


Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,


Prof. Dr. SATYAWAN PUDYATMOKO, S.Hut., M.Agr.Sc
NIP. 19710809 199512 1 001

Sasaran Program : Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Indikator Kinerja Program : Nilai PNBP Fungsional KLHK

No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
d.	Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	230 Miliar Rupiah	230 Miliar Rupiah

Sasaran Program : Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
 Indikator Kinerja Program : Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat

No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
e.	Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	1.000 Desa	1.000 Desa

Sasaran Program : Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
 Indikator Kinerja Program : Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
f.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	78 Poin	78 Poin

Catatan:

1. Tidak terdapat perubahan volume target Perjanjian Kinerja pada Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 Indikator Kinerja Program : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a.	Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	10.000.000 Hektar	10.000.000 Hektar

Sasaran Program : Menurunnya laju penyusutan hutan
 Indikator Kinerja Program : Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan

No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
b.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	12.000.000 Hektar	12.000.000 Hektar

Sasaran Program : Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting
 Indikator Kinerja Program : Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting

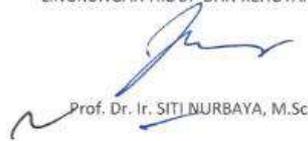
No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
c.	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	2,15 Triliun Rupiah	2,15 Triliun Rupiah

2. Terdapat perubahan kebijakan penganggaran yaitu: (i) penghapusan pagu blokir *Automatic Adjustment* pada belanja pegawai sebesar Rp20.935.188.000,-; (ii) penghapusan pagu blokir *Automatic Adjustment* pada non belanja pegawai sebesar Rp27.138.098.000,-; (iii) mendapatkan ABT PNPB pada Ditjen PHLHK sebesar Rp9.000.000.000,-; (iv) realokasi anggaran belanja pegawai dari BSI LHK total sebesar Rp5.597.774.000,-; (v) *top up* pagu HLN total sebesar Rp22.263.027.000,-

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	
		Semula	Menjadi
	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	562.645.515.000	571.570.941.000
1.	Perencanaan Kawasan konservasi		
2.	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik		
3.	Pengelolaan Kawasan Konservasi		
4.	Pemulihan Ekosistem		
5.	Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan Kawasan Konservasi		
	Kualitas Lingkungan Hidup	12.419.951.000	9.583.389.000
6.	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial		
	Dukungan Manajemen	1.092.718.645.000	1.075.417.296.000
7.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		
	JUMLAH	1.667.784.111.000	1.656.571.626.000

Jakarta, 27 Desember 2023

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM



Prof. Dr. SATYAWAN PUDYATMOKO, S.Hut., M.Agr.Sc
NIP. 19710809 199512 1 001

2. Realisasi anggaran Satker lingkup Ditjen KSDAE tahun 2023 (Sumber: OMSPAN Ditjen KSDAE)

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	BALAI TAMAN NASIONAL TAMBORA	11.231.787.000	11.211.885.502	99,82%
2	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DKI JAKARTA RAYA	17.192.249.000	16.968.457.271	98,70%
3	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT	34.853.736.000	34.255.375.269	98,28%
4	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH	28.140.582.000	27.890.721.371	99,11%
5	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM JAWA TIMUR	31.423.839.000	31.006.829.156	98,67%
6	BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN	13.455.456.000	13.278.790.913	98,69%
7	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NANGROE ACEH DARUSSALAM	25.526.338.000	24.836.089.324	97,30%
8	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA UTARA	38.394.863.000	37.289.327.442	97,12%
9	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT	20.496.149.000	19.699.614.656	96,11%
10	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU	29.931.194.000	28.981.629.777	96,83%
11	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAMBI	19.000.956.000	18.909.979.248	99,52%
12	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA SELATAN	32.104.821.000	31.257.018.788	97,36%
13	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN BARAT	21.320.065.000	20.833.328.123	97,72%
14	BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING	15.652.643.000	15.507.770.375	99,07%
15	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN	19.606.385.000	19.412.351.927	99,01%
16	BALAI TAMAN NASIONAL KUTAI	16.195.686.000	15.878.860.592	98,04%
17	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI UTARA	12.795.378.000	12.721.538.118	99,42%
18	BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM SULAWESI TENGAH	15.738.131.000	15.510.910.861	98,56%
19	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN	35.514.972.000	34.734.293.386	97,80%
20	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGGARA	18.265.611.000	18.220.214.693	99,75%
21	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MALUKU	20.184.774.000	20.160.583.687	99,88%
22	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BALI	15.494.190.000	15.272.547.874	98,57%
23	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA BARAT	18.445.780.000	18.237.122.458	98,87%
24	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BENGKULU	26.192.220.000	25.811.065.525	98,54%

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
25	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO	21.804.610.000	21.674.979.028	99,41%
26	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER	27.636.560.000	26.791.996.920	96,94%
27	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN	24.658.241.000	24.102.920.010	97,75%
28	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR	28.904.772.000	28.429.126.843	98,35%
29	BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO	17.664.702.000	17.564.406.493	99,43%
30	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA	29.989.414.000	29.422.269.315	98,11%
31	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA BARAT	26.873.365.000	26.559.606.439	98,83%
32	BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG	13.711.246.000	13.476.828.997	98,29%
33	BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON	17.978.293.000	17.811.413.466	99,07%
34	BALAI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE	16.001.760.000	15.524.117.406	97,02%
35	BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT	15.747.973.000	15.510.287.205	98,49%
36	BALAI TAMAN NASIONAL SEBANGAU	14.665.665.000	14.306.044.590	97,55%
37	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE	209.998.117.000	207.737.547.044	98,92%
38	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TENGAH	20.904.105.000	20.077.136.336	96,04%
39	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TIMUR	37.748.211.000	36.780.003.450	97,44%
40	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT	34.295.320.000	33.957.318.128	99,01%
41	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU	20.582.845.000	20.430.066.733	99,26%
42	BALAI TAMAN NASIONAL BATANG GADIS	11.254.096.000	11.231.079.547	99,80%
43	BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO	14.073.514.000	13.944.177.068	99,08%
44	BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT 12	14.073.363.000	13.992.803.114	99,43%
45	BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG CEREMAI	15.217.852.000	15.107.724.108	99,28%
46	BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI	13.784.772.000	13.701.908.504	99,40%
47	BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU	14.133.632.000	14.026.084.603	99,24%
48	BALAI TAMAN NASIONAL MANUPEU TANAH DARU DAN LAIWANGI WANGGAMETI	14.829.062.000	14.788.461.270	99,73%
49	BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN	10.765.761.000	10.712.104.951	99,50%
50	BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG-BULUSARAUNG	15.649.132.000	15.469.734.297	98,85%
51	BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE-LOLOBATA	11.132.679.000	10.957.083.306	98,42%
52	BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ	16.804.931.000	16.649.398.422	99,07%

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
53	BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI	13.959.949.000	13.872.286.098	99,37%
54	BALAI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS	37.405.850.000	35.481.052.146	94,85%
55	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU	24.699.319.000	24.492.220.561	99,16%
56	BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO	13.775.882.000	13.651.678.455	99,10%
57	BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN	10.673.089.000	10.577.727.383	99,11%
58	BALAI TAMAN NASIONAL KEP. SERIBU	13.017.841.000	12.874.525.039	98,90%
59	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH	26.147.994.000	25.882.102.699	98,98%
60	BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN	19.039.021.000	18.851.741.739	99,02%
61	BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUN JAWA	19.320.304.000	19.181.920.432	99,28%
62	BALAI TAMAN NASIONAL WASUR	15.843.945.000	15.484.418.240	97,73%
63	BALAI TAMAN NASIONAL SIBERUT	14.607.652.000	14.084.893.387	96,42%
64	BALAI TAMAN NASIONAL BERBAK DAN SEMBILANG	20.216.756.000	19.289.585.378	95,41%
65	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM	23.953.788.000	23.243.711.591	97,04%
66	BALAI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI	17.087.966.000	17.015.044.409	99,57%
67	BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU	10.070.393.000	10.009.061.523	99,39%
68	BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBI	18.807.368.000	18.720.976.608	99,54%
69	BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG	13.256.471.000	12.991.571.390	98,00%
70	BALAI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE	13.515.233.000	13.418.418.130	99,28%
71	BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH	15.394.328.000	15.242.623.189	99,01%
72	BALAI TAMAN NASIONAL MANUSELLA	14.475.431.000	14.343.151.397	99,09%
73	BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA BUKIT RAYA	12.217.776.000	12.190.393.076	99,78%
74	BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI	18.807.514.000	18.663.819.947	99,24%
75	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM D.I YOGYAKARTA	16.034.724.000	15.804.956.632	98,57%
TOTAL		1.670.370.392.000	1.643.990.813.378	98,42%

3. Rekapitulasi desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
A. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan konservasi					
1	BBTN Kerinci Seblat	Bioa Putiak	Pinang Belapis	Lebong	Bengkulu
2	BKSDA Sumatera Barat	Ampalu	Lareh Sago Halaban	Lima Puluh Kota	Sumatera Barat
3	BKSDA Sumatera Barat	Harau	Harau	Lima Puluh Kota	Sumatera Barat
4	BKSDA Sumatera Barat	Tanjung Bonai	Lintau Buo Utara	Tanah Datar	Sumatera Barat
5	BTN Gunung Merbabu	Lencoh	Selo	Boyolali	Jawa Tengah
6	BTN Gunung Merbabu	Wonolelo	Sawangan	Magelang	Jawa Tengah
7	BTN Gunung Merbabu	Wulunggunung	Sawangan	Magelang	Jawa Tengah
8	BTN Gunung Merbabu	Kaponan	Pakis	Magelang	Jawa Tengah
9	BTN Gunung Merbabu	Muneng	Pakis	Magelang	Jawa Tengah
10	BTN Gunung Merbabu	Jambewangi	Pakis	Magelang	Jawa Tengah
11	BTN Gunung Merbabu	Surodadi	Candimulyo	Magelang	Jawa Tengah
12	BTN Gunung Merbabu	Tejosari	Ngablak	Magelang	Jawa Tengah
13	BKSDA Kalimantan Selatan	Sungai Nipah	Kelumpang Selatan	Kotabaru	Kalimantan Selatan
14	BKSDA Kalimantan Selatan	Sangking Baru	Kelumpang Selatan	Kotabaru	Kalimantan Selatan
15	BKSDA Kalimantan Selatan	Batang Kulur	Kelumpang Barat	Kotabaru	Kalimantan Selatan
16	BKSDA Kalimantan Selatan	Tebing Tinggi	Kelumpang Tengah	Kotabaru	Kalimantan Selatan
17	BKSDA Kalimantan Selatan	Labuan Mas	Pulau Laut Selatan	Kotabaru	Kalimantan Selatan
18	BKSDA Kalimantan Selatan	Sepapah	Sampanahan	Kotabaru	Kalimantan Selatan
19	BKSDA Kalimantan Selatan	Basuang	Sampanahan	Kotabaru	Kalimantan Selatan
20	BKSDA Kalimantan Selatan	Teluk Sirih	Pulau Laut Selatan	Kotabaru	Kalimantan Selatan
21	BBTN Teluk Cenderawasih	Isenebuay	Rumberpon	Teluk Wondama	Papua Barat
22	BBTN Teluk Cenderawasih	Menarbu	Roon	Teluk Wondama	Papua Barat
23	BBTN Teluk Cenderawasih	Kaprus	Soug Jaya	Teluk Wondama	Papua Barat
24	BBTN Teluk Cenderawasih	Yeretuar	Teluk Umar	Nabire	Papua
25	BBTN Teluk Cenderawasih	Dotir	Wasior	Teluk Wondama	Papua Barat
26	BBTN Teluk Cenderawasih	Waprak	Roswar	Teluk Wondama	Papua Barat
27	BBTN Teluk Cenderawasih	Niab	Roon	Teluk Wondama	Papua Barat
28	BBTN Teluk Cenderawasih	Napan Yaur	Teluk Umar	Nabire	Papua

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
29	BTN Gunung Palung	Lamon Satong	Matan Hilir Utara	Ketapang	Kalimantan Barat
30	BTN Tesso Nilo	Sikijang	Logas Tanah Darat	Kuantan Singingi	Riau
31	BBTN Kerinci Seblat	Jernih Jaya	Gunung Tujuh	Kerinci	Jambi
32	BTN Tesso Nilo	Situgal	Logas Tanah Darat	Kuantan Singingi	Riau
33	BBTN Kerinci Seblat	Air Liki	Tabir Barat	Merangin	Jambi
34	BBKSDA Sulawesi Selatan	Rante Angin	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
35	BBKSDA Sulawesi Selatan	Mattaropuli	Bengo	Bone	Sulawesi Selatan
36	BBKSDA Sulawesi Selatan	Mario	Kulo	Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan
37	BBKSDA Sulawesi Selatan	Umpungeng	Lalabata	Soppeng	Sulawesi Selatan
38	BBKSDA Sulawesi Selatan	Tokalimbo	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
39	BBKSDA Sulawesi Selatan	Tawakua	Angkona	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
40	BBKSDA Sulawesi Selatan	Tarabbi	Malili	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
41	BBKSDA Sulawesi Selatan	Mahalona	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
42	BBKSDA Sulawesi Selatan	Loeha	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
43	BBKSDA Sulawesi Selatan	Kawata	Wasuponda	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
44	BBKSDA Sulawesi Selatan	Gattareng toa	Marioriwawo	Soppeng	Sulawesi Selatan
45	BBKSDA Sulawesi Selatan	Atue	Malili	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
46	BBTN Teluk Cenderawasih	Goni	Teluk Umar	Nabire	Papua
47	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Nangamiro	Pekat	Dompus	Nusa Tenggara Barat
48	BKSDA Yogyakarta	Jetis	Saptosari	Gunungkidul	Daerah Istimewa Yogyakarta
49	BTN Gunung Halimun Salak	Cibunian	Pamijahan	Bogor	Jawa Barat
50	BTN Gunung Halimun Salak	Puraseda	Leuwiliang	Bogor	Jawa Barat
51	BTN Gunung Halimun Salak	Lebakgedong	Lebakgedong	Lebak	Banten
52	BTN Gunung Halimun Salak	Cikarang	Muncang	Lebak	Banten
53	BTN Gunung Halimun Salak	Sukaesmi	Sobang	Lebak	Banten
54	BBTN Bukit Barisan Selatan	Pelita Jaya	Pesisir Selatan	Pesisir Barat	Lampung
55	BBTN Bukit Barisan Selatan	Teluk Brak	Pematang Sawa	Tanggamus	Lampung
56	BBTN Bukit Barisan Selatan	Tirom	Pematang Sawa	Tanggamus	Lampung

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
57	BBTN Bukit Barisan Selatan	Way Tias	Bangkunat	Pesisir Barat	Lampung
58	BKSDA Bengkulu	Lubuk Lagan	Seluma Barat	Seluma	Bengkulu
59	BKSDA Bengkulu	Nakau	Talang Empat	Bengkulu Tengah	Bengkulu
60	BKSDA Bengkulu	Padang Siring	Semidang Lagan	Bengkulu Tengah	Bengkulu
61	BKSDA Bengkulu	Teluk Sepang	Kampung Melayu	Kota Bengkulu	Bengkulu
62	BKSDA Bengkulu	Penago Baru	Iilir Talo	Seluma	Bengkulu
63	BKSDA Bengkulu	Lubuk Tapi	Ulu Manna	Bengkulu Selatan	Bengkulu
64	BKSDA Bengkulu	Lempuing	Ratu Agung	Kota Bengkulu	Bengkulu
65	BKSDA Bengkulu	Tedunan	Semidang Alas Maras	Seluma	Bengkulu
66	BTN Bukit Tiga Puluh	Pemayungan	Sumay	Tebo	Jambi
67	BTN Bukit Tiga Puluh	Lubuk Mandarsah	Tengah Iilir	Tebo	Jambi
68	BKSDA Sumatera Barat	Lubuk Tarantang	Kamang Baru	Sijunjung	Sumatera Barat
69	BKSDA Sumatera Barat	Taratak Sungai Lundang	Koto XI Tarusan	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
70	BKSDA Sumatera Barat	Pulasan	Tanjung Gadang	Sijunjung	Sumatera Barat
71	BKSDA Sumatera Barat	Kampung Baru Korong Nan Ampek	Koto XI Tarusan	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
72	BKSDA Sumatera Barat	Saniangbaka	X Koto Singkarak	Solok	Sumatera Barat
73	BKSDA Sumatera Barat	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	Sijunjung	Sumatera Barat
74	BTN Ujung Kulon	Tunggaljaya	Sumur	Pandeglang	Banten
75	BTN Boganinani Wartabone	Duminanga	Helumo	Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara
76	BTN Boganinani Wartabone	Konarom	Dumoga Tenggara	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
77	BTN Boganinani Wartabone	Wangga Baru	Dumoga Barat	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
78	BTN Boganinani Wartabone	Osion	Dumoga Tenggara	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
79	BTN Boganinani Wartabone	Toruakat	Dumoga	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
80	BTN Boganinani Wartabone	Ikuna	Dumoga Tenggara	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
81	BTN Boganinani Wartabone	Kosio	Dumoga tengah	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
82	BTN Boganinani Wartabone	Dumoga II	Dumoga Timur	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
83	BTN Boganinani Wartabone	Sauk	Lolak	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
84	BTN Boganinani Wartabone	Cempaka	Sang Tombolang	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
85	BBTN Kerinci Seblat	Koto Baru	Pauh Duo	Solok Selatan	Sumatera Barat
86	BBTN Kerinci Seblat	Kapau Alam Pauh Duo	Pauh Duo	Solok Selatan	Sumatera Barat
87	BBTN Kerinci Seblat	Suka Negeri	Topos	Lebong	Bengkulu
88	BBTN Kerinci Seblat	Gunung Alam	Tubei	Lebong	Bengkulu
89	BBTN Kerinci Seblat	Ketenong I	Pinang Belapis	Lebong	Bengkulu
90	BBTN Kerinci Seblat	Lubuk Ngin	Selangit	Musi Rawas	Sumatera Selatan
91	BBTN Kerinci Seblat	Mojorejo	Selupu Rejang	Rejang Lebong	Bengkulu
92	BBTN Kerinci Seblat	Tambang Saweak	Pinang Belapis	Lebong	Bengkulu
93	BBTN Kerinci Seblat	Tebat Tenong Luar	Bermani Ulu Raya	Rejang Lebong	Bengkulu
94	BBTN Kerinci Seblat	Ulak Surung	Lubuk Linggau Utara II	Kota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan
95	BBTN Kerinci Seblat	Lubuk Kumbang	Karang Jaya	Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan
96	BBTN Kerinci Seblat	Ulak Lebar	Lubuk Linggau Barat II	Kota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan
97	BBTN Kerinci Seblat	Muara Kulam	Ulu Rawas	Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan
98	BKSDA Kalimantan Tengah	Murung Paken	Dusun Selatan	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
99	BKSDA Sulawesi Tengah	Panjo	Pamona Selatan	Poso	Sulawesi Tengah
100	BKSDA Sulawesi Tengah	Pinjan	Toli-toli Utara	Toli Toli	Sulawesi Tengah
101	BKSDA Sulawesi Tengah	Malangga	Galang	Toli Toli	Sulawesi Tengah
102	BKSDA Sulawesi Tengah	Dadakitan	Baolan	Toli Toli	Sulawesi Tengah
103	BKSDA Sulawesi Tengah	Bolano Tengah	Bolano	Parigi Moutong	Sulawesi Tengah
104	BKSDA Sulawesi Tengah	Tuweley	Baolan	Toli Toli	Sulawesi Tengah
105	BKSDA Sulawesi Tengah	Kinopasan	Galang	Toli Toli	Sulawesi Tengah
106	BKSDA Sulawesi Tengah	Kamumu	Luwuk Utara	Banggai	Sulawesi Tengah
107	BKSDA Sulawesi Tengah	Moilong	Moilong	Banggai	Sulawesi Tengah
108	BKSDA Sulawesi Tengah	Lenyek	Luwuk Utara	Banggai	Sulawesi Tengah
109	BKSDA Sulawesi Tengah	Sinorang	Batui Selatan	Banggai	Sulawesi Tengah
110	BTN Sebangau	Sabaru	Sabangau	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
111	BTN Sebangau	Marang	Bukit Batu	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah
112	BTN Sebangau	Tumbang Bulan	Mendawai	Katingan	Kalimantan Tengah
113	BBKSDA Sulawesi Selatan	Nuha	Nuha	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
114	BBKSDA Sulawesi Selatan	Barugaya	Polombangkeng Utara	Takalar	Sulawesi Selatan
115	BBKSDA Sulawesi Selatan	Pappalluang	Bangkala Barat	Jeneponto	Sulawesi Selatan
116	BBKSDA Sulawesi Selatan	Malino	Tinggimoncong	Gowa	Sulawesi Selatan
117	BBKSDA Sulawesi Selatan	Ko'mara	Polombangkeng Utara	Takalar	Sulawesi Selatan
118	BKSDA Maluku	Gandasuli	Bacan Selatan	Halmahera Selatan	Maluku Utara
119	BKSDA Maluku	Kulur	Huamual	Seram Bagian Barat	Maluku
120	BKSDA Maluku	Liang	Salahutu	Maluku Tengah	Maluku
121	BKSDA Maluku	Lurang	Wetar Utara	Maluku Barat Daya	Maluku
122	BKSDA Maluku	Lokki	Huamual	Seram Bagian Barat	Maluku
123	BKSDA Maluku	Tawa	Bacan Timur Tengah	Halmahera Selatan	Maluku Utara
124	BKSDA Maluku	Eray	Wetar Utara	Maluku Barat Daya	Maluku
125	BKSDA Maluku	Allang Asaude	Huamual Belakang	Seram Bagian Barat	Maluku
126	BKSDA Maluku	Tulehu	Salahutu	Maluku Tengah	Maluku
127	BBTN Gunung Gede Pangrango	Kebonpeuteuy	Gekbrong	Cianjur	Jawa Barat
128	BBTN Gunung Gede Pangrango	Sudajayagirang	Sukabumi	Sukabumi	Jawa Barat
129	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cibeureum	Cisarua	Bogor	Jawa Barat
130	BBTN Gunung Gede Pangrango	Kuta	Megamendung	Bogor	Jawa Barat
131	BBTN Gunung Gede Pangrango	Nanggerang	Cicurug	Sukabumi	Jawa Barat
132	BBTN Gunung Gede Pangrango	Tangkil	Caringin	Bogor	Jawa Barat
133	BBTN Gunung Gede Pangrango	Sindangjaya	Cipanas	Cianjur	Jawa Barat
134	BBTN Gunung Gede Pangrango	Galudra	Cugenang	Cianjur	Jawa Barat
135	BBKSDA Jawa Barat	Cimanggung	Cimanggung	Sumedang	Jawa Barat
136	BBKSDA Jawa Barat	Sindulang	Cimanggung	Sumedang	Jawa Barat
137	BBKSDA Jawa Barat	Pasirnanjung	Cimanggung	Sumedang	Jawa Barat
138	BBKSDA Jawa Barat	Linggajaya	Cisitu	Sumedang	Jawa Barat
139	BBKSDA Jawa Barat	Cikondang	Ganeas	Sumedang	Jawa Barat

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
140	BBKSDA Jawa Barat	Cieunteung	Darmaraja	Sumedang	Jawa Barat
141	BBKSDA Jawa Barat	Jayagiri	Lembang	Bandung Barat	Jawa Barat
142	BBKSDA Jawa Barat	Sukajaya	Lembang	Bandung Barat	Jawa Barat
143	BBKSDA Jawa Barat	Bojong Timur	Bojong	Purwakarta	Jawa Barat
144	BBKSDA Jawa Barat	Cihanjavar	Bojong	Purwakarta	Jawa Barat
145	BBKSDA Jawa Barat	Pasanggrahan	Bojong	Purwakarta	Jawa Barat
146	BBKSDA Jawa Barat	Cibuntu	Wanayasa	Purwakarta	Jawa Barat
147	BBKSDA Papua	Obaat Trow	Jagebob	Merauke	Papua
148	BBKSDA Papua	Doromena	Depapre	Jayapura	Papua
149	BBKSDA Papua	Manunggal Jaya	Makimi	Nabire	Papua
150	BBKSDA Papua	Nggayu	Ulilin	Merauke	Papua
151	BBKSDA Papua	Nolokla	Sentani Timur	Jayapura	Papua
152	BBKSDA Papua	Ormuwari	Ravenirara	Jayapura	Papua
153	BBKSDA Papua	Selauw	Muting	Merauke	Papua
154	BBKSDA Papua	Jemunain Jaya	Jagebob	Merauke	Papua
155	BBKSDA Papua	Bayangkara	Jayapura Utara	Kota Jayapura	Papua
156	BBKSDA Jawa Barat	Cikawunggading	Cipatujah	Tasikmalaya	Jawa Barat
157	BBKSDA Jawa Barat	Sukarame	Pacet	Bandung	Jawa Barat
158	BBKSDA Jawa Barat	Cipaku	Cipaku	Ciamis	Jawa Barat
159	BBKSDA Jawa Barat	Mandalare	Panjalu	Ciamis	Jawa Barat
160	BBKSDA Jawa Barat	Linggamekar	Cilimus	Kuningan	Jawa Barat
161	BBKSDA Jawa Barat	Mekarjaya	Sukaresmi	Garut	Jawa Barat
162	BBKSDA Jawa Barat	Kramatwangi	Cisurupan	Garut	Jawa Barat
163	BBKSDA Jawa Barat	Cikembang	Kertasari	Bandung	Jawa Barat
164	BTN Manusela	Hatu	Tehoru	Maluku Tengah	Maluku
165	BTN Manusela	Hatuolo	Seram Utara	Maluku Tengah	Maluku
166	BTN Manusela	Horale	Seram Utara Barat	Maluku Tengah	Maluku
167	BTN Manusela	Kaloa	Seram Utara	Maluku Tengah	Maluku
168	BTN Manusela	Maneoratu	Telutih	Maluku Tengah	Maluku
169	BTN Manusela	Telutih Baru	Tehoru	Maluku Tengah	Maluku
170	BBKSDA Sumatera Utara	Lumban Gaol	Habinsaran	Toba Samosir	Sumatera Utara

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
171	BBKSDA Sumatera Utara	Parsoburan Tengah	Habinsaran	Toba Samosir	Sumatera Utara
172	BKSDA Sumatera Selatan	Sawah	Muara Pinang	Empat Lawang	Sumatera Selatan
173	BKSDA Sumatera Selatan	Pangkalan Bulian	Batang Hari Leko	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
174	BKSDA Sumatera Selatan	Tampang Baru	Bayung Lencir	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
175	BKSDA Sumatera Selatan	Talang Buluh	Batang Hari Leko	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
176	BKSDA Sumatera Selatan	Sungai Napal	Batang Hari Leko	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
177	BKSDA Sumatera Selatan	Saut	Batang Hari Leko	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
178	BKSDA Sumatera Selatan	Pangkalan Tungkal	Tungkal Jaya	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
179	BKSDA Sumatera Selatan	Bukit Sejahtera	Batang Hari Leko	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
180	BKSDA Sumatera Selatan	Berlian Jaya	Tungkal Jaya	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
181	BKSDA Sumatera Selatan	Ulak Bandung	Pajar Bulan	Lahat	Sumatera Selatan
182	BKSDA Sumatera Selatan	Tanjung Kurung	Kikim Selatan	Lahat	Sumatera Selatan
183	BKSDA Sumatera Selatan	Sumur	Pajar Bulan	Lahat	Sumatera Selatan
184	BKSDA Sumatera Selatan	Pulau Beringin	Kikim Selatan	Lahat	Sumatera Selatan
185	BKSDA Sumatera Selatan	Sido Mulyo	Tungkal Jaya	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
186	BTN Kayan Mentarang	Buduk Kubul	Krayan Barat	Nunukan	Kalimantan Utara
187	BTN Kayan Mentarang	Pa' Nado	Krayan	Nunukan	Kalimantan Utara
188	BTN Kayan Mentarang	Pa' Kemut	Krayan Barat	Nunukan	Kalimantan Utara
189	BTN Kayan Mentarang	Pa' Raye	Krayan Timur	Nunukan	Kalimantan Utara
190	BTN Kayan Mentarang	Pa' Api	Krayan	Nunukan	Kalimantan Utara
191	BTN Kayan Mentarang	Wa' Laya	Krayan	Nunukan	Kalimantan Utara
192	BTN Kayan Mentarang	Lembada	Krayan Barat	Nunukan	Kalimantan Utara
193	BBKSDA Jawa Barat	Cikakak	Cikakak	Sukabumi	Jawa Barat
194	BBKSDA Jawa Barat	Citasuk	Padarincang	Serang	Banten
195	BBKSDA Jawa Barat	Gunungsari	Gunung sari	Serang	Banten
196	BBKSDA Jawa Barat	Mekarsari	Naringgul	Cianjur	Jawa Barat
197	BBKSDA Jawa Barat	Jayanti	Palabuhanratu	Sukabumi	Jawa Barat

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
198	BKSDA Sulawesi Tenggara	Tambea	Pomalaa	Kolaka	Sulawesi Tenggara
199	BKSDA Sulawesi Tenggara	Raimuna	Maligano	Muna	Sulawesi Tenggara
200	BKSDA Sulawesi Tenggara	Kampoh Bunga	Wawolesea	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara
201	BKSDA Sulawesi Tenggara	Barasanga	Wawolesea	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara
202	BKSDA Sulawesi Tenggara	Wonua Jaya	Moramo	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
203	BKSDA Sulawesi Tenggara	Watumotobe	Kapontori	Buton	Sulawesi Tenggara
204	BKSDA Sulawesi Tenggara	Gunung Sari	Bonegunu	Buton Utara	Sulawesi Tenggara
205	BKSDA Sulawesi Tenggara	Lawele	Lasalimu	Buton	Sulawesi Tenggara
206	BKSDA Sulawesi Tenggara	Eelahaji	Kulisusu	Buton Utara	Sulawesi Tenggara
207	BKSDA Sulawesi Tenggara	Puupi	Kolono	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
208	BKSDA Aceh	Kute Rayang	Linge	Aceh Tengah	Aceh
209	BKSDA Aceh	Owaq	Linge	Aceh Tengah	Aceh
210	BKSDA Aceh	Serule	Bintang	Aceh Tengah	Aceh
211	BKSDA Aceh	Rantau Panjang	Simpang Jernih	Aceh Timur	Aceh
212	BKSDA Aceh	Pantan Nangka	Linge	Aceh Tengah	Aceh
213	BKSDA Aceh	Umang	Linge	Aceh Tengah	Aceh
214	BKSDA Aceh	Dedamar	Bintang	Aceh Tengah	Aceh
215	BKSDA Aceh	Ise-ise	Linge	Aceh Tengah	Aceh
216	BKSDA Aceh	Iboih	Sukakarya	Kota Sabang	Aceh
217	BTN Gunung Palung	Gunungsembilan	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
218	BTN Gunung Palung	Sempurna	Sungai Laur	Ketapang	Kalimantan Barat
219	BTN Gunung Palung	Harapan Mulia	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
220	BTN Gunung Palung	Sutera	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
221	BBTN Teluk Cenderawasih	Yariari	Rumberpon	Teluk Wondama	Papua Barat
222	BBTN Teluk Cenderawasih	Yembekiri I	Rumberpon	Teluk Wondama	Papua Barat
223	BBKSDA Papua Barat	Kaliam	Salawati Barat	Raja Ampat	Papua Barat
224	BBKSDA Papua Barat	Dulbatan	Salawati Selatan	Sorong	Papua Barat
225	BTN Berbak dan Sembilang	Sungai Aur	Kumpeh	Muaro Jambi	Jambi
226	BTN Berbak dan Sembilang	Tanah Pilih	Banyuasin II	Banyuasin	Sumatera Selatan
227	BTN Berbak dan Sembilang	Remau Baku Tuo	S a d u	Tanjung Jabung Timur	Jambi

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
228	BTN Berbak dan Sembilang	Labuhan Pering	S a d u	Tanjung Jabung Timur	Jambi
229	BTN Gunung Palung	Batu Barat	Simpang Hilir	Kayong Utara	Kalimantan Barat
230	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Bali Loku	Wanokaka	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur
231	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Wudi Pandak	Tabundung	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
232	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Laputi	Tabundung	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
233	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Watubukul	Tabundung	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
234	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Persiapan Waikalimbung	Matai Lapau	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
235	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Kangeli	Lewa Tidahu	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
236	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Rewa Rara	Wanokaka	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur
237	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Malinjak	Katiku Tana Selatan	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur
238	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Modu Waimaringu	Kota Waikabubak	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur
239	BTN Wakatobi	Liya Bahari Indah	Wangi Wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
240	BTN Wakatobi	Liya Onemaelangka	Wangi Wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
241	BTN Wakatobi	Liya Togo	Wangi Wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
242	BTN Wakatobi	Kapota	Wangi Wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
243	BTN Wakatobi	Kapota Utara	Wangi Wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
244	BTN Wakatobi	Kabita	Wangi Wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
245	BTN Wakatobi	Kabita Togo	Wangi Wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
246	BTN Wakatobi	Waiti	Tomia	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
247	BTN Wakatobi	Waitii Barat	Tomia	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
248	BTN Wakatobi	Lewuto	Kaledupa	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
249	BTN Wakatobi	Tanomeha	Kaledupa Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
250	BTN Wakatobi	Waha	Tomia	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
251	BTN Wakatobi	Dete	Tomia Timur	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
252	BTN Wakatobi	Teemoane	Tomia	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
253	BTN Wakatobi	Olo	Kaledupa	Wakatobi	Sulawesi Tenggara

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
254	BTN Wakatobi	Tanjung	Kaledupa Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
255	BTN Gunung Ciremai	Padamatang	Pasawahan	Kuningan	Jawa Barat
256	BTN Gunung Ciremai	Sangkanerang	Jalaksana	Kuningan	Jawa Barat
257	BTN Gunung Halimun Salak	Pasirangka	Muncang	Lebak	Banten
258	BTN Gunung Halimun Salak	Ciladaeun	Lebakgedong	Lebak	Banten
259	BTN Gunung Halimun Salak	Jatake	Panggarangan	Lebak	Banten
260	BTN Gunung Halimun Salak	Banjaririgasi	Lebakgedong	Lebak	Banten
261	BTN Gunung Halimun Salak	Wangunjaya	Cigemplong	Lebak	Banten
262	BTN Gunung Halimun Salak	Leuwicoo	Muncang	Lebak	Banten
263	BTN Gunung Halimun Salak	Jagaraksa	Muncang	Lebak	Banten
264	BTN Gunung Halimun Salak	Hariang	Sobang	Lebak	Banten
265	BTN Gunung Halimun Salak	Cipelang	Cijeruk	Bogor	Jawa Barat
266	BTN Gunung Halimun Salak	Pasawahan	Cicurug	Sukabumi	Jawa Barat
267	BTN Gunung Halimun Salak	Cisaat	Cicurug	Sukabumi	Jawa Barat
268	BTN Gunung Halimun Salak	Girijaya	Cidahu	Sukabumi	Jawa Barat
269	BTN Gunung Halimun Salak	Cidahu	Cidahu	Sukabumi	Jawa Barat
270	BTN Gunung Ciremai	Teja	Rajagaluh	Majalengka	Jawa Barat
271	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Bungan Jaya	Putussibau Selatan	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
272	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Labian Ira'ang	Batang Lupar	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
273	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Tanjunglolang	Putussibau Selatan	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
274	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Jongkong Kiri Hilir	Jongkong	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
275	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Nanga Suhaid	Suhaid	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
276	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Madang Permai	Suhaid	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
277	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Padua Mendalam	Putussibau Utara	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
278	BBTN Teluk Cenderawasih	Syabes	Roon	Teluk Wondama	Papua Barat
279	BKSDA Kalimantan Timur	Muara Bunyut	Melak	Kutai Barat	Kalimantan Timur
280	BKSDA Kalimantan Timur	Maruat	Long Ikis	Paser	Kalimantan Timur
281	BKSDA Kalimantan Timur	Padang Pengrapat	Tanah Grogot	Paser	Kalimantan Timur
282	BKSDA Kalimantan Timur	Muara Kaman Ilir	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
283	BKSDA Kalimantan Timur	Tanjung Batu	Pulau Derawan	Berau	Kalimantan Timur
284	BKSDA Kalimantan Timur	Ngayau	Muara Bengkal	Kutai Timur	Kalimantan Timur
285	BKSDA Kalimantan Timur	Senambah	Muara Bengkal	Kutai Timur	Kalimantan Timur
286	BKSDA Kalimantan Timur	Mulupan	Muara Bengkal	Kutai Timur	Kalimantan Timur

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
287	BKSDA Kalimantan Timur	Kelinjau Ulu	Muara Ancalong	Kutai Timur	Kalimantan Timur
288	BKSDA Kalimantan Timur	Muara Bengkal Ulu	Muara Bengkal	Kutai Timur	Kalimantan Timur
289	BKSDA Kalimantan Timur	Sumber Agung	Long Mesangat	Kutai Timur	Kalimantan Timur
290	BKSDA Kalimantan Timur	Bohe Silian	Maratua	Berau	Kalimantan Timur
291	BKSDA Kalimantan Timur	Payung-Payung	Maratua	Berau	Kalimantan Timur
292	BKSDA Kalimantan Timur	Teluk Alulu	Maratua	Berau	Kalimantan Timur
293	BBKSDA Jawa Timur	Guwoterus	Montong	Tuban	Jawa Timur
294	BBKSDA Jawa Timur	Tingkis	Singgahan	Tuban	Jawa Timur
295	BBKSDA Jawa Timur	Peromaan	Tambak	Gresik	Jawa Timur
296	BBKSDA Jawa Timur	Kedungpengaron	Kejayan	Pasuruan	Jawa Timur
297	BBKSDA Jawa Timur	Kalianan	Krucil	Probolinggo	Jawa Timur
298	BBKSDA Jawa Timur	Tamankursi	Sumbermalang	Situbondo	Jawa Timur
299	BBKSDA Jawa Timur	Garahan	Silo	Jember	Jawa Timur
300	BBKSDA Jawa Timur	Pakel	Licin	Banyuwangi	Jawa Timur
301	BBKSDA Jawa Timur	Balikterus	Sangkapura	Gresik	Jawa Timur
302	BBKSDA Jawa Timur	Sapulante	Pasrepan	Pasuruan	Jawa Timur
303	BBKSDA Jawa Timur	Bermi	Krucil	Probolinggo	Jawa Timur
304	BBKSDA Jawa Timur	Ampel Sari	Pasrepan	Pasuruan	Jawa Timur
305	BBKSDA Jawa Timur	Sidomulyo	Silo	Jember	Jawa Timur
306	BKSDA Sumatera Barat	Lambung Bukik	Pauh	Kota Padang	Sumatera Barat
307	BKSDA Sumatera Barat	Lubuk Minturun	Koto Tangah	Kota Padang	Sumatera Barat
308	BKSDA Sumatera Barat	Aie Angek	X Koto	Tanah Datar	Sumatera Barat
309	BKSDA Sumatera Barat	Koto Baru	X Koto	Tanah Datar	Sumatera Barat
310	BKSDA Sumatera Barat	Padang Laweh	Sungai Pua	Agam	Sumatera Barat
311	BKSDA Sumatera Barat	Salibutan Lubuk Alung	Lubuk Alung	Padang Pariaman	Sumatera Barat
312	BKSDA Sumatera Barat	Salimpaung	Salimpaung	Tanah Datar	Sumatera Barat
313	BKSDA Sumatera Barat	Tambangan	X Koto	Tanah Datar	Sumatera Barat
314	BKSDA Sumatera Barat	Tarantang	Harau	Lima Puluh Kota	Sumatera Barat
315	BTN Gunung Rinjani	Pengadangan	Pringgasele	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
316	BTN Gunung Rinjani	Toya	Aikmel	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
317	BTN Gunung Rinjani	Tetebatu Selatan	Sikur	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
318	BTN Gunung Rinjani	Sembalun	Sembalun	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
319	BTN Gunung Rinjani	Jurit Baru	Pringgasele	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
320	BTN Gunung Rinjani	Jenggik Utara	Montong Gading	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
321	BTN Gunung Rinjani	Aik Prapa	Aikmel	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
322	BKSDA Jawa Tengah	Pringamba	Sigaluh	Banjarnegara	Jawa Tengah
323	BKSDA Jawa Tengah	Kaligarang	Keling	Jejara	Jawa Tengah
324	BKSDA Jawa Tengah	Clering	Donorojo	Jejara	Jawa Tengah
325	BKSDA Kalimantan Barat	Bengkawan	Seluas	Bengkayang	Kalimantan Barat
326	BKSDA Kalimantan Barat	Tempapan Hulu	Galing	Sambas	Kalimantan Barat
327	BKSDA Kalimantan Barat	Bangkal Serai	Kendawangan	Ketapang	Kalimantan Barat
328	BKSDA Kalimantan Barat	Cempaka Putih	Suti Semarang	Bengkayang	Kalimantan Barat
329	BKSDA Kalimantan Barat	Sagu	Galing	Sambas	Kalimantan Barat
330	BBTN Kerinci Seblat	Renah Kasah	Kayu Aro	Kerinci	Jambi
331	BBTN Kerinci Seblat	Muara Hemat	Batang Merangin	Kerinci	Jambi
332	BBTN Kerinci Seblat	Pal VIII	Bermani Ulu Raya	Rejang Lebong	Bengkulu
333	BTN Rawa Aopa Watumohai	Pudambu	Angata	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
334	BTN Rawa Aopa Watumohai	Mataiwoi	Angata	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
335	BTN Rawa Aopa Watumohai	Matabondu	Angata	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
336	BTN Rawa Aopa Watumohai	Sonai	Puriala	Konawe	Sulawesi Tenggara
337	BTN Rawa Aopa Watumohai	Langkowala	Lantari Jaya	Bombana	Sulawesi Tenggara
338	BTN Rawa Aopa Watumohai	Lambodi Jaya	Lalembuu	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
339	BTN Rawa Aopa Watumohai	Mokupa Jaya	Lalembuu	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
340	BTN Rawa Aopa Watumohai	Lere Jaya	Lambandia	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara
341	BTN Rawa Aopa Watumohai	Iwoimea Jaya	Aere	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara
342	BTN Rawa Aopa Watumohai	Roko-roko	Tirawuta	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara
343	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Nuapin	Fatumnasi	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur
344	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Kelapa Lima	Kelapa Lima	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur
345	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Namosain	Alak	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
346	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Fatuneno	Miomafo Barat	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
347	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Eban	Miomafo Barat	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
348	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Sallu	Miomafo Barat	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
349	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Noepesu	Miomafo Barat	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
350	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Saenam	Miomafo Barat	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
351	BBKSDA Sumatera Utara	Perolihen	Sitelu Tali Urang Jehe	Pakpak Bharat	Sumatera Utara
352	BBKSDA Sulawesi Selatan	Lilina Ajangale	Ulaweng	Bone	Sulawesi Selatan
353	BBKSDA Sulawesi Selatan	Pekalao	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
354	BBKSDA Sulawesi Selatan	Parumpanai	Wasuponda	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
355	BBKSDA Sulawesi Selatan	Margolembo	Mangkutana	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
356	BBKSDA Sulawesi Selatan	Mantadulu	Angkona	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
357	BBKSDA Sulawesi Selatan	Bantilang	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
358	BBKSDA Sulawesi Selatan	Pattondon Salu	Maiwa	Enrekang	Sulawesi Selatan
359	BBKSDA Sulawesi Selatan	Cinenung	Palakka	Bone	Sulawesi Selatan
360	BBKSDA Sulawesi Selatan	Barana	Bangkala Barat	Jeneponto	Sulawesi Selatan
361	BBKSDA Sulawesi Selatan	Tana Karaeng	Manuju	Gowa	Sulawesi Selatan
362	BBKSDA Sulawesi Selatan	Tarang Towaya	Polongbengkeng Utara	Takalar	Sulawesi Selatan
363	BBKSDA Sulawesi Selatan	Buluttana	Tinggimoncong	Gowa	Sulawesi Selatan
364	BBKSDA Sulawesi Selatan	Kale Lantang	Polongbengkeng Selatan	Takalar	Sulawesi Selatan
365	BBKSDA Sulawesi Selatan	Gantarang	Tinggimoncong	Gowa	Sulawesi Selatan
366	BBKSDA Sulawesi Selatan	Gandang Dewata	Tabulahan	Mamasa	Sulawesi Barat
367	BBKSDA Sulawesi Selatan	Talopak	Tabulahan	Mamasa	Sulawesi Barat
368	BBKSDA Sulawesi Selatan	Saluleang	Tabulahan	Mamasa	Sulawesi Barat
369	BBKSDA Sulawesi Selatan	Peu'	Tabulahan	Mamasa	Sulawesi Barat
370	BBKSDA Sulawesi Selatan	Periangan	Tabulahan	Mamasa	Sulawesi Barat
371	BBKSDA Sulawesi Selatan	Bonto Lerung	Tinggimoncong	Gowa	Sulawesi Selatan
372	BBKSDA Sulawesi Selatan	Salutambun	Buntumalangka	Mamasa	Sulawesi Barat
373	BBKSDA Sulawesi Selatan	Salutambun Timur	Buntumalangka	Mamasa	Sulawesi Barat
374	BBKSDA Sulawesi Selatan	Ranteberan	Buntumalangka	Mamasa	Sulawesi Barat

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
375	BBKSDA Sulawesi Selatan	Kebanga	Buntumalangka	Mamasa	Sulawesi Barat
376	BBKSDA Sulawesi Selatan	Kabae	Buntumalangka	Mamasa	Sulawesi Barat
377	BBKSDA Sulawesi Selatan	Buttuada	Bonehau	Mamuju	Sulawesi Barat
378	BBKSDA Sulawesi Selatan	Banuada	Bonehau	Mamuju	Sulawesi Barat
379	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cipetir	Kadudampit	Sukabumi	Jawa Barat
380	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cikahuripan	Kadudampit	Sukabumi	Jawa Barat
381	BBTN Gunung Gede Pangrango	Perbawati	Sukabumi	Sukabumi	Jawa Barat
382	BTN Batang Gadis	Guo Batu	Batang Natal	Mandailing Natal	Sumatera Utara
383	BTN Batang Gadis	Tor Naincat	Batang Natal	Mandailing Natal	Sumatera Utara
384	BTN Batang Gadis	Huta Bargot Setia	Huta Bargot	Mandailing Natal	Sumatera Utara
385	BTN Batang Gadis	Mondan	Huta Bargot	Mandailing Natal	Sumatera Utara
386	BTN Batang Gadis	Longat	Panyabungan Barat	Mandailing Natal	Sumatera Utara
387	BTN Batang Gadis	Sibanggor Tonga	Puncak Sorik Marapi	Mandailing Natal	Sumatera Utara
388	BTN Batang Gadis	Padang Sanggar	Tambangan	Mandailing Natal	Sumatera Utara
389	BTN Batang Gadis	Angin Barat	Tambangan	Mandailing Natal	Sumatera Utara
390	BTN Batang Gadis	Simpang Pining	Ulu Pungkut	Mandailing Natal	Sumatera Utara
391	BTN Batang Gadis	Simpang Tolang Jae	Kotanopan	Mandailing Natal	Sumatera Utara
392	BTN Batang Gadis	Tanjung Sialang	Siabu	Mandailing Natal	Sumatera Utara
393	BKSDA Bengkulu	Kali Padang	Selupu Rejang	Rejang Lebong	Bengkulu
394	BKSDA Bengkulu	Barat Wetan	Kebawetan	Kepahiang	Bengkulu
395	BKSDA Bengkulu	Suka Maju	Marga Sakti Sebelat	Bengkulu Utara	Bengkulu
396	BKSDA Bengkulu	Air Hitam	Pondok Suguh	Muko muko	Bengkulu
397	BKSDA Bengkulu	Sumber Urip	Selupu Rejang	Rejang Lebong	Bengkulu
398	BKSDA Bengkulu	Retak Ilir	Ipuh	Muko muko	Bengkulu
399	BBKSDA Riau	Petai	Singingi Hilir	Kuantan Singingi	Riau
400	BBKSDA Riau	Kuntu	Kampar	Kampar Kiri	Riau
401	BBKSDA Riau	Tanjung Balam	Siak Hulu	Kampar	Riau
402	BBKSDA Riau	Redang	Rengat Barat	Indragiri Hulu	Riau

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
403	BBKSDA Riau	Teluk Binjai	Teluk Meranti	Pelalawan	Riau
404	BBKSDA Riau	Pulau Gelang	Kuala Cenaku	Indragiri Hulu	Riau
405	BBKSDA Riau	Pekan Heran	Rengat Barat	Indragiri Hulu	Riau
406	BBKSDA Riau	Mak Teduh	Kerumutan	Pelalawan	Riau
407	BBKSDA Riau	Danau Baru	Rengat Barat	Indragiri Hulu	Riau
408	BTN Kelimutu	Woloara	Kelimutu	Ende	Nusa Tenggara Timur
409	BTN Kelimutu	Ndito	Detusoko	Ende	Nusa Tenggara Timur
410	BTN Boganinani Wartabone	Dataran Hijau	Pinogu	Bone Bolango	Gorontalo
411	BTN Boganinani Wartabone	Babo	Sang Tombolang	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
412	BTN Boganinani Wartabone	Tanoyan Utara	Lolayan	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
413	BTN Boganinani Wartabone	Butu	Tilongkabila	Bone Bolango	Gorontalo
414	BTN Boganinani Wartabone	Pinogu Permai	Pinogu	Bone Bolango	Gorontalo
415	BKSDA Jawa Tengah	Tawangmangu	Tawangmangu	Karanganyar	Jawa Tengah
416	BKSDA Jawa Tengah	Suntri	Gunem	Rembang	Jawa Tengah
417	BKSDA Jawa Tengah	Menjing	Jenawi	Karanganyar	Jawa Tengah
418	BKSDA Jawa Tengah	Karangmalang	Kedungbanteng	Tegal	Jawa Tengah
419	BKSDA Jawa Tengah	Dieng	Kejajar	Wonosobo	Jawa Tengah
420	BKSDA Sumatera Barat	Batu Palano	Sungai Pua	Agam	Sumatera Barat
421	BTN Bukit Duabelas	Batu Sawar	Maro Sebo Ulu	Batanghari	Jambi
422	BTN Bukit Duabelas	Padang Kelapo	Maro Sebo Ulu	Batanghari	Jambi
423	BTN Bukit Duabelas	Hajran	Batin XXIV	Batanghari	Jambi
424	BTN Bukit Duabelas	Pematang Kabau	Air Hitam	Sarolangun	Jambi
425	BTN Bukit Duabelas	Sungai Jernih	Muara Tabir	Tebo	Jambi
426	BKSDA Jawa Tengah	Dieng Kulon	Batur	Banjarnegara	Jawa Tengah
427	BTN Sebangau	Jahanjang	Kampiang	Katingan	Kalimantan Tengah
428	BTN Sebangau	Paduran Mulya	Sebangau Kuala	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah
429	BTN Aketajawe Lolobata	Dodaga	Wasile Timur	Halmahera Timur	Maluku Utara
430	BTN Aketajawe Lolobata	Woekob	Weda Tengah	Halmahera Tengah	Maluku Utara
431	BTN Aketajawe Lolobata	Maratana Jaya	Maba Tengah	Halmahera Timur	Maluku Utara

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
432	BKSDA Sulawesi Utara	Buhu	Tibawa	Gorontalo	Gorontalo
433	BKSDA Sulawesi Utara	Bongkudai Baru	Mooat	Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara
434	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Madawau	Madapangga	Bima	Nusa Tenggara Barat
435	BKSDA Kalimantan Selatan	Sungaidua	Simpang Empat	Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan
436	BKSDA Kalimantan Selatan	Mulyodadi	Pamukan Selatan	Kotabaru	Kalimantan Selatan
437	BKSDA Kalimantan Selatan	Karangsari Indah	Pulau Laut Timur	Kotabaru	Kalimantan Selatan
438	BKSDA Kalimantan Selatan	Gunung Batu Besar	Sampanahan	Kotabaru	Kalimantan Selatan
439	BKSDA Kalimantan Selatan	Oka-oka	Pulau Laut Kepulauan	Kotabaru	Kalimantan Selatan
440	BKSDA Kalimantan Selatan	Sang-sang	Kelumpang Tengah	Kotabaru	Kalimantan Selatan
441	BKSDA Kalimantan Selatan	Tamiang Bakung	Kelumpang Tengah	Kotabaru	Kalimantan Selatan
442	BKSDA Kalimantan Selatan	Tanjung Pengharapan	Pulau Laut Timur	Kotabaru	Kalimantan Selatan
443	BBKSDA Sumatera Utara	Mahala	Tinada urang jehe	Pakpak Bharat	Sumatera Utara
444	BBKSDA Sumatera Utara	Perolihen	Sitellu tari urang jehe	Pakpak Bharat	Sumatera Utara
445	BBKSDA Sumatera Utara	Tanjung mulia	Sitellu tari urang jehe	Pakpak bharat	Sumatera Utara
446	BBKSDA Sumatera Utara	Majanggut I	Kerajaan	Pakpak bharat	Sumatera Utara
447	BBKSDA Sumatera Utara	Simerpara	Pergetteng-getteng	Pakpak bharat	Sumatera Utara
448	BBKSDA Sumatera Utara	Salak I	Salak	Pakpak bharat	Sumatera Utara
449	BBKSDA Sumatera Utara	Parpulungan	Kerajaan	Pakpak bharat	Sumatera Utara
450	BBKSDA Sumatera Utara	Perjaga	Sitellu tari urang jehe	Pakpak bharat	Sumatera Utara
451	BBKSDA Sumatera Utara	Kuta Dame	Kerajaan	Pakpak Bharat	Sumatera Utara
452	BBKSDA Sumatera Utara	Pantai cermin	Tanjung pura	Langkat	Sumatera Utara

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
453	BBKSDA Sumatera Utara	Pematang cengal	Tanjung pura	Langkat	Sumatera Utara
454	BBKSDA Sumatera Utara	Pantai gading	Secanggang	Langkat	Sumatera Utara
455	BBKSDA Sumatera Utara	Pematang purba	Purba	Simalungun	Sumatera Utara
456	BBKSDA Sumatera Utara	Rahut Bosi onan	Pangaribuan	Tapanuli utara	Sumatera Utara
457	BBKSDA Sumatera Utara	Meranti tengah	Pintu pohan meranti	Toba Samosir	Sumatera Utara
458	BBKSDA Sumatera Utara	Meranti utara	Pintu pohan meranti	Toba Samosir	Sumatera Utara
459	BBKSDA Sumatera Utara	Sitaratoit	Angkola barat	Tapanuli selatan	Sumatera Utara
460	BBKSDA Sumatera Utara	Marancar godang	Marancar	Tapanuli selatan	Sumatera Utara
461	BBKSDA Sumatera Utara	Gapuk tua	Marancar	Tapanuli Selatan	Sumatera Utara
462	BBKSDA Sumatera Utara	Luat lombang	Sipirok	Tapanuli Selatan	Sumatera Utara
463	BBKSDA Sumatera Utara	Arse	Arse	Tapanuli Selatan	Sumatera Utara
464	BBKSDA Sumatera Utara	Aek nabara	Marancar	Tapanuli Selatan	Sumatera Utara
465	BBKSDA Sumatera Utara	Simardona	Batang onang	Padang lawas utara	Sumatera Utara
466	BBKSDA Sumatera Utara	Manunggang Jae	Padangsidimpuan Tenggara	Kota Padang Sidempuan	Sumatera Utara
467	BBKSDA Sumatera Utara	Siundol Julu	Sosopan	Padang Lawas	Sumatera Utara
468	BBKSDA Sumatera Utara	Pangkal dolok lama	Batang onang	Padang lawas utara	Sumatera Utara
469	BBKSDA Sumatera Utara	Siundol Dolok	Sosopan	Padang lawas	Sumatera Utara
470	BBKSDA Sumatera Utara	Pagaranbira Jae	Sosopan	Padang lawas	Sumatera Utara
471	BBKSDA Sumatera Utara	Batu nanggar	Batang onang	Padang lawas utara	Sumatera Utara
472	BBKSDA Sumatera Utara	Huta bargot	Sosopan	Padang lawas	Sumatera Utara
473	BBKSDA Sumatera Utara	Tatengger	Angkola Muara Tais	Tapanuli Selatan	Sumatera Utara

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
B. Kegiatan Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional					
474	BTN Bukit Duabelas	Jeluith	Tebo Ilir	Batang Hari	Jambi
475	BTN Aketajawe Lolobata	Kulo Jaya	Weda Tengah	Halmahera Tengah	Maluku Utara
476	BTN Siberut	Malancan	Siberut Utara	Kep Mentawai	Sumatera Barat
477	BTN Lorentz	Senogolik	Taelarek	Jayawijaya	Papua Pegunungan
478	BTN Lorentz	Bokiem	Taelarek	Jayawijaya	Papua Pegunungan
479	BTN Lorentz	Huluaima	Taelarek	Jayawijaya	Papua Pegunungan
480	BTN Lorentz	Yoman Weya	Taelarek	Jayawijaya	Papua Pegunungan
481	BTN Lorentz	Iyora	Taelarek	Jayawijaya	Papua Pegunungan
482	BTN Lorentz	Taelarek	Taelarek	Jayawijaya	Papua Pegunungan
483	BTN Lorentz	Budiem	Taelarek	Jayawijaya	Papua Pegunungan
484	BTN Lorentz	Entagekooma	Taelarek	Jayawijaya	Papua Pegunungan
485	BKSDA Maluku	Eti	Seram Barat	Seram Bagian Barat	Maluku
486	BKSDA Maluku	Piru	Seram Barat	Seram Bagian Barat	Maluku
487	BTN Matalawa	Wudi Pandak	Tabundung	Sumba Timur	NTT
488	BTN Matalawa	Persiapan Laputi	Tabundung	Sumba Timur	NTT
489	BTN Matalawa	Watubokul	Tabundung	Sumba Timur	NTT
490	BTN Matalawa	Persiapan Lainyanar	Pinu Pahar	Sumba Timur	NTT
491	BTN Wakatobi	Tanjung	Kaledupa Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
492	BTN Wakatobi	Ollo	Kaledupa	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
493	BKSDA Sulawesi Tenggara	Barasanga	Wawolesea	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara
494	BKSDA Sulawesi Tenggara	Kampoh Bunga	Wawolesea	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
495	BKSDA Sulawesi Tenggara	Konawehea	Samaturu	Kolaka	Sulawesi Tenggara
496	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	Nanga Leboyan	Selimbau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
C. Kegiatan Peningkatan Usaha Kemitraan Konservasi					
497	BTN Tesso Nilo	Lubuk Kembang Bunga	Ukui	Pelalawan	Riau
498	BTN Tesso Nilo	Bagan Limau	Ukui	Pelalawan	Riau
499	BTN Tesso Nilo	Pontian Mekar	Lubuk Batu Jaya	Inhu	Riau
500	BTN Bantimurung Bulusaraung	Labuaja	Cenrana	Maros	Sulawesi Selatan
501	BTN Bantimurung Bulusaraung	Barugae	Mallawa	Maros	Sulawesi Selatan
502	BTN Bantimurung Bulusaraung	Mattampawalie	Lappariaja	Bone	Sulawesi Selatan
503	BTN Bantimurung Bulusaraung	Rompegading	Cenrana	Maros	Sulawesi Selatan
504	BTN Bantimurung Bulusaraung	Wanua Waru	Mallawa	Maros	Sulawesi Selatan
505	BTN Bantimurung Bulusaraung	Patanyamang	Camba	Maros	Sulawesi Selatan
506	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bentenge	Mallawa	Maros	Sulawesi Selatan
507	BTN Gunung Palung	Benawai Agung	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
508	BTN Gunung Palung	Pangkalan Buton	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
509	BTN Gunung Palung	Pampang Harapan	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
510	BTN Gunung Palung	Gunung Sembilan	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
511	BTN Gunung Palung	Harapan Mulia	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
512	BTN Gunung Palung	Sempurna	Sungai Laur	Ketapang	Kalimantan Barat
513	BTN Gunung Palung	Sutera	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
514	BTN Gunung Palung	Sejahtera	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
515	BTN Gunung Palung	Laman Satong	Matan Hilir Utara	Ketapang	Kalimantan Barat
516	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Pulau Majang	Badau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
517	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Nanga Leboyan	Selimbau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
518	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Tempurau	Selimbau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
519	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Lubuk Pengail	Suhaid	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
520	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Melemba	Batang Lupar	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
521	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Vega	Selimbau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
522	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Tanjung Lasa	Putussibau Utara	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
523	BTN Berbak dan Sembilang	Rantau Panjang	Kumpeh	Muaro Jambi	Jambi
524	BTN Berbak dan Sembilang	Sungai Bungur	Kumpeh	Muaro Jambi	Jambi
525	BTN Berbak dan Sembilang	Sogo	Kumpeh	Muaro Jambi	Jambi
526	BTN Berbak dan Sembilang	Kelurahan Tanjung	Kumpeh	Muaro Jambi	Jambi
527	BTN Berbak dan Sembilang	Telago Limo	Berbak	Tanjung Jabung Timur	Jambi
528	BTN Berbak dan Sembilang	Tanah Pilih	Banyuasin II	Banyuasin	Sumatera Selatan
529	BTN Berbak dan Sembilang	Air Hitam Laut	Sadu	Tanjung Jabung Timur	Jambi
530	BTN Sebangau	Habaring Hurung	Bukit Batu	Palangka Raya	Kalteng
531	BTN Sebangau	Sebangau Permai	Sebangau Kuala	Pulang Pisau	Kalteng
532	BTN Sebangau	Mendawai	Mendawai	Katingan	Kalteng
533	BTN Sebangau	Tumbang Bulan	Mendawai	Katingan	Kalteng
534	BTN Bukit Tiga Puluh	Siambul	Batang Gangsal	Indragiri Hulu	Riau
535	BTN Bukit Tiga Puluh	Rantau Langsung	Batang Gangsal	Indragiri Hulu	Riau
536	BTN Rawa Aopa Watumohai	Laloonaha	Puriala	Konawe	Sulawesi Tenggara

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
537	BTN Rawa Aopa Watumohai	Unggulino	Puriala	Konawe	Sulawesi Tenggara
538	BTN Rawa Aopa Watumohai	Akuni	Tinanggea	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
539	BTN Rawa Aopa Watumohai	Roraya	Tinanggea	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
540	BTN Rawa Aopa Watumohai	Lantari	Lantari Jaya	Bombana	Sulawesi Tenggara
541	BTN Rawa Aopa Watumohai	Lanowulu	Tinanggea	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
542	BKSDA Sulawesi Tenggara	Barasanga	Wawolesea	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara
543	BKSDA Sulawesi Tenggara	Kampoh	Wawolesea	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara
544	BKSDA Sulawesi Tenggara	Konawehea	Samaturu	Kolaka	Sulawesi Tenggara
545	BKSDA Sulawesi Tenggara	Tambea	Pomalaa	Kolaka	Sulawesi Tenggara
546	BKSDA Maluku	Nusantara	Banda neira	Maluku Tengah	Maluku
547	BKSDA Maluku	Piru	SeramBarat	Seram Bagian Barat	Maluku
548	BKSDA Maluku	Eti	SeramBarat	Seram Bagian Barat	Maluku
549	BKSDA Maluku	Waesala	Huamual Belakang	Seram Bagian Barat	Maluku
550	BKSDA Maluku	Kawa	SeramBarat	Seram Bagian Barat	Maluku
551	BBTN Teluk Cenderawasih	Yaur	Yaur	Nabire	Papua Tengah
552	BBTN Teluk Cenderawasih	Menarbu	Roon	Teluk Wondama	Papua Barat
553	BBTN Teluk Cenderawasih	Yomakan	Rumberpon	Teluk Wondama	Papua Barat
554	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Hupumada	Wanokaka	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur
555	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Manurara	Katikutana Selatan	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur
556	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Tanamodu	Katikutana Selatan	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
557	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Okawacu	Katikutana Selatan	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur
558	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Umbu Langgang	Umbu Ratu Nggay Barat	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur
559	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Maradesa Selatan	Umbu Ratu Nggay Barat	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur
560	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Pindu Wangga Wundut	Lewa	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
561	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Kambatawundut	Lewa	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
562	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Umamanu	Lewa Tidahu	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
563	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Mondulambi	Lewa Tidahu	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
564	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Padiratana	Umbu Ratu Nggay	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
565	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Pre Komba	Tabundung	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
566	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Lailunggi	Pinu Pahar	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
567	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Katikuwai	Matawai Lapau	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
568	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Mahaniwa	Pinu Pahar	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
569	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Ramuk	Pinu Pahar	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
570	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Wanggameti	Matawai Lapau	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
571	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Wanggabewa	Pinu Pahar	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
572	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Tandula Jangga	Karera	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
573	BKSDA Bengkulu	Sukasari	Kaba Wetan	Kepahiang	Bengkulu
574	BKSDA Bengkulu	Bandung Jaya	Kaba Wetan	Kepahiang	Bengkulu
575	BKSDA Bengkulu	IV Suku Menanti	Sindang Dataran	Rejang Lebong	Bengkulu
576	BKSDA Bengkulu	Sindang Jaya	Sindang Kelingi	Rejang Lebong	Bengkulu
577	BKSDA Bengkulu	Kutai Donok	Lebong Selatan	Lebong	Bengkulu
578	BKSDA Bengkulu	TES	Lebong Selatan	Lebong	Bengkulu
579	BBKSDA Sulawesi Selatan	Bulue	Marioriawa	Soppeng	Sulawesi Selatan
580	BBKSDA Sulawesi Selatan	Battang Barat	Wara Barat	Kota Palopo	Sulawesi Selatan
581	BBKSDA Sulawesi Selatan	Timampu	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
582	BBKSDA Sulawesi Selatan	Pekaloa	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
583	BBKSDA Sulawesi Selatan	Tokalimbo	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
584	BBKSDA Sulawesi Selatan	Loeha	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
585	BBKSDA Sulawesi Selatan	Bantilang	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
586	BTN Manusela	Kalao	Seram Utara	Maluku Tengah	Maluku
587	BTN Manusela	Elemata	Seram Utara	Maluku Tengah	Maluku
588	BTN Bali Barat	Gilimanuk	Melaya	Jembrana	Bali
589	BTN Bali Barat	Sumberklampok	Gerokgak	Buleleng	Bali
590	BTN Aketajawe Lolobata	Gosale	Oba Utara	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara
591	BTN Aketajawe Lolobata	Woekob dan Kulo Jaya	Weda Tengah	Halmahera Tengah	Maluku Utara
592	BTN Taka Bonerate	Tambuna	Taka Bonerate	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
593	BTN Taka Bonerate	Khusus Pasitallu Timur	Taka Bonerate	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
594	BTN Taka Bonerate	Latondu	Taka Bonerate	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
595	BTN Taka Bonerate	Rajuni	Taka Bonerate	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
596	BTN Taka Bonerate	Tarupa	Taka Bonerate	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
597	BTN Gunung Rinjani	Loloan	Bayan	Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat
598	BTN Gunung Rinjani	Pesanggrahan	Montong Gading	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
599	BTN Gunung Rinjani	Jenggik Utara	Montong Gading	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
600	BTN Gunung Rinjani	Tetebatu	Sikur	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
601	BTN Gunung Rinjani	Jurit Baru	Pringgasea	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
602	BTN Gunung Rinjani	Pengadangan Barat	Pringgasea	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
603	BTN Gunung Rinjani	Timbanuh	Pringgasea	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
604	BTN Gunung Rinjani	Toya	Aikmel	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
605	BTN Gunung Rinjani	Bebidas	Wanasaba	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
606	BBKSDA Papua	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	Papua
607	BBKSDA Papua	Sereh	Sentani Timur	Kab. Jayapura	Papua
608	BBKSDA Papua	Sabron Sari	Sentani Barat	Kab. Jayapura	Papua
609	BBKSDA Papua	Necheibe	Ravenirara	Kab. Jayapura	Papua
610	BBKSDA Papua	Angkasapura	Jayapura Utara	Kab. Jayapura	Papua
611	BTN Ujung Kulon	Kertamukti	Sumur	Pandeglang	Banten
612	BBKSDA Riau	Dayun	Dayun	Siak	Riau
613	BBKSDA Riau	Rawa Mekar Jaya	Sungai Apit	Siak	Riau

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
614	BTN Siberut	Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat
615	BTN Siberut	Simatalu	Siberut Barat	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat
616	BBTN Bromo Tengger Semeru	Sumber Mujur	Candipuro	Lumajang	Jawa Timur
617	BBTN Bromo Tengger Semeru	Gucialit	Gucialit	Lumajang	Jawa Timur
618	BBTN Bromo Tengger Semeru	Pasrujambe	Pasrujambe	Lumajang	Jawa Timur
619	BBTN Bromo Tengger Semeru	Ranupani	Senduro	Lumajang	Jawa Timur
620	BBTN Bromo Tengger Semeru	Argosari	Senduro	Lumajang	Jawa Timur
621	BBTN Bromo Tengger Semeru	Supit urang	Pronojiwo	Lumajang	Jawa Timur
622	BBTN Bromo Tengger Semeru	Wonokitri	Tosari	Pasuruan	Jawa Timur
623	BBTN Bromo Tengger Semeru	Taman Satriyan	Tirtoyudo	Malang	Jawa Timur
624	BBTN Bromo Tengger Semeru	Blarang	Tutur	Pasuruan	Jawa Timur
625	BBTN Bromo Tengger Semeru	Pronojiwo	Pronojiwo	Lumajang	Jawa Timur
626	BTN Gunung Halimun Salak	Tenjolaya	Cicurug	Sukabumi	Jawa Barat
627	BTN Gunung Halimun Salak	Cikelat	Cisolok	Sukabumi	Jawa Barat
628	BTN Gunung Halimun Salak	Ridogalih	Cikakak	Sukabumi	Jawa Barat
629	BTN Gunung Halimun Salak	Sirnarasa	Cikakak	Sukabumi	Jawa Barat
630	BTN Gunung Halimun Salak	Wanasari	Cibeber	Lebak	Banten
631	BTN Gunung Halimun Salak	Cisungsang	Cibeber	Lebak	Banten
632	BTN Gunung Halimun Salak	Malasari	Nanggung	Bogor	Jawa Barat
633	BTN Gunung Halimun Salak	Purwabakti	Pamijahan	Bogor	Jawa Barat
634	BTN Gunung Halimun Salak	Purasari	Leuwiliang	Bogor	Jawa Barat
635	BTN Gunung Halimun Salak	Tamansari	Tamansari	Bogor	Jawa Barat

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
636	BTN Gunung Halimun Salak	Gunung Malang	Tenjolaya	Bogor	Jawa Barat
637	BTN Gunung Halimun Salak	Tapos 1	Tenjolaya	Bogor	Jawa Barat
638	BTN Gunung Halimun Salak	Kutajaya	Cicurug	Sukabumi	Jawa Barat
639	BTN Gunung Halimun Salak	Cihambali	Cibeber	Lebak	Banten
640	BKSDA Jambi	Betung Bedarah Barat	Tebo Ilir	Tebo	Jambi
641	BTN Kep. Seribu	Pulau Panggang	Kepulauan Seribu Utara	Administrasi Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
642	BBTN Gunung Gede Pangrango	Watesjaya	Cigombong	Bogor	Jawa Barat
643	BBTN Gunung Gede Pangrango	Basir Buncir	Caringin	Bogor	Jawa Barat
644	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cibedug	Ciawi	Bogor	Jawa Barat
645	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cihanyawar	Nagrak	Sukabumi	Jawa Barat
646	BBTN Gunung Gede Pangrango	Tangkil	Caringin	Bogor	Jawa Barat
647	BBTN Gunung Gede Pangrango	Ginjar	Ciambar	Sukabumi	Jawa Barat
648	BBTN Gunung Gede Pangrango	Ambarjaya	Ciambar	Sukabumi	Jawa Barat
649	BBTN Gunung Gede Pangrango	Babakan Panjang	Nagrak	Sukabumi	Jawa Barat
650	BBTN Gunung Gede Pangrango	Sukagalih	Megamendung	Bogor	Jawa Barat
651	BBKSDA Jawa Barat	Sukamaju	Cihaurbeuti	Ciamis	Jawa Barat
652	BTN Karimun Jawa	Parang	Karimun Jawa	Jepara	Jawa Tengah
653	BTN Karimun Jawa	Kemujan	Karimun Jawa	Jepara	Jawa Tengah
654	BTN Karimun Jawa	Karimunjawa	Karimun Jawa	Jepara	Jawa Tengah
655	BTN Gunung Merbabu	Tejosari	Ngablak	Magelang	Jawa Tengah
656	BTN Gunung Merbabu	Batur	Getasan	Semarang	Jawa Tengah

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
657	BTN Gunung Merbabu	Munengwarangan	Pakis	Magelang	Jawa Tengah
658	BTN Gunung Merbabu	Jambewangi	Pakis	Magelang	Jawa Tengah
659	BTN Gunung Merbabu	Gondangsari	Pakis	Magelang	Jawa Tengah
660	BTN Batang Gadis	Kelurahan Longat	Panyabungan Barat	Mandailing Natal	Sumatera Utara
661	BTN Batang Gadis	Sirambas	Panyabungan Barat	Mandailing Natal	Sumatera Utara
662	BTN Batang Gadis	Pastap Julu	Tambangan	Mandailing Natal	Sumatera Utara
663	BTN Batang Gadis	Hutalombang	Puncak Sorik Marapi	Mandailing Natal	Sumatera Utara
664	BTN Batang Gadis	Ampung Padang	Batang Natal	Mandailing Natal	Sumatera Utara
665	BTN Batang Gadis	Lumban Dolok	Panyabungan Selatan	Mandailing Natal	Sumatera Utara
666	BTN Batang Gadis	Muara Batang Angkola	Siabu	Mandailing Natal	Sumatera Utara
667	BBTN Gunung Leuser	Suka Damai	Lembah Sabil	Aceh Barat Daya	Aceh
668	BBTN Gunung Leuser	Alue Sungai Pinang	Jeumpa	Aceh Barat Daya	Aceh
669	BBTN Gunung Leuser	Blang Dalam	Babah Rot	Aceh Barat Daya	Aceh
670	BBTN Gunung Leuser	Bineh Krueng	Tangan-Tangan	Aceh Barat Daya	Aceh
671	BBTN Gunung Leuser	Pasie Lembang	Kluet Selatan	Aceh Selatan	Aceh
672	BBTN Gunung Leuser	Pasie Lembang	Kluet Selatan	Aceh Selatan	Aceh
673	BBTN Gunung Leuser	Ujung Mangki	Bakongan	Aceh Selatan	Aceh
674	BBTN Gunung Leuser	Indra Damai	Kluet Selatan	Aceh Selatan	Aceh
675	BBTN Gunung Leuser	Pucuk Lembang	Kluet Timur	Aceh Selatan	Aceh
676	BBTN Gunung Leuser	Seunebok Keuranji	Kota Bahagia	Aceh Selatan	Aceh
677	BBTN Gunung Leuser	Uning Pune	Putri Betung	Gayo Lues	Aceh
678	BBTN Gunung Leuser	Kutelengat Sepakat	Putri Betung	Gayo Lues	Aceh

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
679	BBTN Gunung Leuser	Meloak Sepakat	Putri Betung	Gayo Lues	Aceh
680	BBTN Gunung Leuser	Blang Temung	Dabun Gelang	Gayo Lues	Aceh
681	BBTN Gunung Leuser	Ekan	Pining	Gayo Lues	Aceh
682	BBTN Gunung Leuser	Aunan Sepakat	Ketambe	Aceh Tenggara	Aceh
683	BBTN Gunung Leuser	Ketambe	Ketambe	Aceh Tenggara	Aceh
684	BBTN Gunung Leuser	Tanjung Leuser	Darul Hasanah	Aceh Tenggara	Aceh
685	BBTN Gunung Leuser	Tanjung Aman	Darul Hasanah	Aceh Tenggara	Aceh
686	BBTN Gunung Leuser	Rambung Jaya	Darul Hasanah	Aceh Tenggara	Aceh
687	BBTN Gunung Leuser	Salim Pipit	Babul Rahmah	Aceh Tenggara	Aceh
688	BBTN Gunung Leuser	Alur Baning	Babul Rahmah	Aceh Tenggara	Aceh
689	BBTN Gunung Leuser	Putri Betung	Putri Betung	Gayo Lues	Aceh
690	BBTN Gunung Leuser	Uning Pune	Putri Betung	Gayo Lues	Aceh
691	BBTN Gunung Leuser	Gumpang Pekan	Putri Betung	Gayo Lues	Aceh
692	BBTN Gunung Leuser	Kuta Lengat Sepakat	Putri Betung	Gayo Lues	Aceh
693	BBTN Gunung Leuser	Singah Mulo	Putri Betung	Gayo Lues	Aceh
694	BBTN Gunung Leuser	Marpunge Pintu Gayo	Putri Betung	Gayo Lues	Aceh
695	BBTN Gunung Leuser	Suka Makmur	Kutalimbaru	Deli Serdang	Sumatera Utara
696	BBKSDA Sumatera Utara	Morang	Batang Onang	Padang Lawas Utara	Sumatera Utara
697	BBKSDA Sumatera Utara	Labuhan Rasoki	Padangsidimpuan Tenggara	Padang sidimpuan	Sumatera Utara
698	BBKSDA Sumatera Utara	Tapak Kuda	Tanjung Pura	Langkat	Sumatera Utara
699	BBKSDA Sumatera Utara	Karya Maju	Tanjung Pura	Langkat	Sumatera Utara
700	BBKSDA Sumatera Utara	Karang Gading	Labuhan Deli	Deli Serdang	Sumatera Utara

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
701	BBKSDA Sumatera Utara	Suka Maju	Tanjung Pura	Langkat	Sumatera Utara
702	BBKSDA Sumatera Utara	paluh kurau	hamparan perak	Deli Serdang	Sumatera Utara
703	BBKSDA Sumatera Utara	Torganda	Torgamba	Labuhan Batu Selatan	Sumatera Utara
704	BBTN Lore Lindu	Tuare	Lore Barat	Poso	Sulawesi Tengah
705	BBTN Lore Lindu	Kageroa	Lore Barat	Poso	Sulawesi Tengah
706	BBTN Lore Lindu	Kolori	Lore Barat	Poso	Sulawesi Tengah
707	BBTN Lore Lindu	Lelio	Lore Barat	Poso	Sulawesi Tengah
708	BBTN Lore Lindu	Lengkeka	Lore Barat	Poso	Sulawesi Tengah
709	BBTN Lore Lindu	Doda	Lore Tengah	Poso	Sulawesi Tengah
710	BBTN Lore Lindu	Lempe	Lore Tengah	Poso	Sulawesi Tengah
711	BBTN Lore Lindu	Bariri	Lore Tengah	Poso	Sulawesi Tengah
712	BBTN Lore Lindu	Toro	Kulawi	Sigi	Sulawesi Tengah
713	BBTN Lore Lindu	Baleura	Lore Tengah	Poso	Sulawesi Tengah
714	BBTN Lore Lindu	Betue	Lore Piore	Poso	Sulawesi Tengah
715	BBTN Lore Lindu	Lawua	Kulawi Selatan	Sigi	Sulawesi Tengah
716	BBTN Lore Lindu	Rompo	Lore Tengah	Poso	Sulawesi Tengah
717	BBTN Lore Lindu	Talabosa	Lore Piore	Poso	Sulawesi Tengah
718	BBTN Lore Lindu	Torire	Lore Tengah	Poso	Sulawesi Tengah
719	BBTN Lore Lindu	Hangira	Lore Tengah	Poso	Sulawesi Tengah
720	BBTN Lore Lindu	Puroo	Lindu	Sigi	Sulawesi Tengah
721	BBTN Lore Lindu	Langko	Lindu	Sigi	Sulawesi Tengah

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
722	BBTN Lore Lindu	Tomado	Lindu	Sigi	Sulawesi Tengah
723	BBTN Lore Lindu	Anca	Lindu	Sigi	Sulawesi Tengah
724	BBTN Lore Lindu	Olu	Lindu	Sigi	Sulawesi Tengah
725	BBTN Lore Lindu	Tongoa	Palolo	Sigi	Sulawesi Tengah
726	BBTN Lore Lindu	Karunia	Palolo	Sigi	Sulawesi Tengah
727	BBTN Lore Lindu	Sedoa	Lore Utara	Poso	Sulawesi Tengah
728	BBTN Lore Lindu	Watumaeta	Lore Utara	Poso	Sulawesi Tengah
729	BBTN Lore Lindu	Wuasa	Lore Utara	Poso	Sulawesi Tengah
730	BBTN Lore Lindu	Kaduwa	Lore Utara	Poso	Sulawesi Tengah
731	BBTN Lore Lindu	Dodolo	Lore Utara	Poso	Sulawesi Tengah
732	BBTN Lore Lindu	Sintuwu	Palolo	Sigi	Sulawesi Tengah
733	BBTN Lore Lindu	Bulili	Nokilalaki	Sigi	Sulawesi Tengah
734	BBTN Lore Lindu	Kadidia	Nokilalaki	Sigi	Sulawesi Tengah
735	BBTN Lore Lindu	Omu	Gumbasa	Sigi	Sulawesi Tengah
736	BBTN Lore Lindu	Pakuli	Gumbasa	Sigi	Sulawesi Tengah
737	BBTN Lore Lindu	Pakuli Utara	Gumbasa	Sigi	Sulawesi Tengah
738	BBTN Lore Lindu	Simoro	Gumbasa	Sigi	Sulawesi Tengah
739	BBTN Lore Lindu	Tuva	Gumbasa	Sigi	Sulawesi Tengah
740	BBTN Lore Lindu	Wanga	Lore Piore	Poso	Sulawesi Tengah
741	BBTN Lore Lindu	Siliwanga	Lore Piore	Poso	Sulawesi Tengah
742	BBTN Lore Lindu	Watutau	Lore Piore	Poso	Sulawesi Tengah

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
743	BBTN Lore Lindu	Bunga	Palolo	Sigi	Sulawesi Tengah
744	BBTN Lore Lindu	Kapiroe	Palolo	Sigi	Sulawesi Tengah
745	BBTN Lore Lindu	Sigimpu	Palolo	Sigi	Sulawesi Tengah
746	BBTN Lore Lindu	Bakubakulu	Palolo	Sigi	Sulawesi Tengah
747	BBTN Lore Lindu	Bobo	Palolo	Sigi	Sulawesi Tengah
748	BBTN Lore Lindu	Bolapapu	Kulawi	Sigi	Sulawesi Tengah
749	BBTN Lore Lindu	Salua	Kulawi	Sigi	Sulawesi Tengah
750	BBTN Lore Lindu	Namo	Kulawi	Sigi	Sulawesi Tengah
751	BBTN Lore Lindu	Mataue	Kulawi	Sigi	Sulawesi Tengah
752	BBTN Lore Lindu	Sungku	Kulawi	Sigi	Sulawesi Tengah
753	BBTN Lore Lindu	Marena	Kulawi	Sigi	Sulawesi Tengah
754	BBTN Lore Lindu	O'o	Kulawi Selatan	Sigi	Sulawesi Tengah
755	BBTN Lore Lindu	Watukilo	Kulawi Selatan	Sigi	Sulawesi Tengah
756	BBTN Lore Lindu	Tompi Bugis	Kulawi Selatan	Sigi	Sulawesi Tengah
757	BBTN Lore Lindu	Gimpu	Kulawi Selatan	Sigi	Sulawesi Tengah
758	BBTN Lore Lindu	Pilimakujawa	Kulawi Selatan	Sigi	Sulawesi Tengah
759	BBTN Lore Lindu	Moa	Kulawi Selatan	Sigi	Sulawesi Tengah
760	BBTN Kerinci Seblat	Pal VIII	Bermani Ulu Raya	Rejang Lebong	Bengkulu
761	BBTN Kerinci Seblat	Sungai Lisai	Pinang Belapis	Lebong	Bengkulu
762	BBTN Kerinci Seblat	Petanang Ulu	Lubuklinggau Utara I	Lubuklinggau	Sumatera Selatan
763	BBTN Kerinci Seblat	Sukau Datang	Tubei	Lebong	Bengkulu

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
764	BBTN Kerinci Seblat	Bukit Ulu	Karang Jaya	Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan
765	BBTN Kerinci Seblat	Suka Negeri	Topos	Lebong	Bengkulu
766	BBTN Kerinci Seblat	Pasenan	STL Ulu Terawas	Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan
767	BBTN Kerinci Seblat	Batu Gane	Selangit	Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan
768	BBTN Kerinci Seblat	Sebelat Ulu	Piang Belapis	Lebong	Bengkulu
769	BBTN Kerinci Seblat	Lubuk Mentilin	Jangkat	Merangin	Jambi
D. Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)					
770	BBKSDA Jawa Timur	Sidomulyo	Silo	Jember	Jawa Timur
771	BBKSDA Sulawesi Selatan	Leling Utara	Tommo	Mamuju	Sulawesi Barat
772	BBKSDA Sulawesi Selatan	Nuha	Nuha	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
773	BBKSDA Sulawesi Selatan	Tellu Boccoe	Ponre	Bone	Sulawesi Selatan
774	BBKSDA Sulawesi Selatan	Lembanna	Tinggi Moncong	Gowa	Sulawesi Selatan
775	BBKSDA Sulawesi Selatan	Kelurahan Pattapang	Tinggi Moncong	Gowa	Sulawesi Selatan
776	BBKSDA Sulawesi Selatan	Nikkel	Nuha	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
777	BBKSDA Sulawesi Selatan	Kelurahan Magani	Nuha	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
778	BBKSDA Sulawesi Selatan	Sorowako	Nuha	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
779	BBKSDA Sulawesi Selatan	Matano	Nuha	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
780	BKSDA Bengkulu	Sumber Urip	Slupu Rejang	Rejang Lebong	Bengkulu
781	BKSDA Jawa Tengah	Dieng Kulon	Batur	Banjarnegara	Jawa Tengah
782	BKSDA Kalimantan Selatan	Tinggiran II Luar	Tamban	Barito Kuala	Kalimantan Selatan
783	BKSDA Kalimantan Selatan	Beringin	Alalak	Barito Kuala	Kalimantan Selatan

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
784	BKSDA Kalimantan Selatan	Batakan	Panyipatan	Tanah Laut	Kalimantan Selatan
785	BKSDA Kalimantan Selatan	Pulau Burung	Simpang Empat	Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan
786	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Mertak	Pujut	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
787	BKSDA Sulawesi Utara	Kelurahan Kasawari	Aertembaga	Kota Bitung	Sulawesi Utara
788	BKSDA Sulawesi Utara	Kelurahan Batuputih	Ranowulu	Kota Bitung	Sulawesi Utara
789	BKSDA Sumatera Barat	Padang Laweh	Sungai Puar	Agam	Sumatera Utara
790	BKSDA Sumatera Barat	Aie Angek	X Koto	Tanah Datar	Sumatera Utara
791	BKSDA Sumatera Barat	Koto Baru	X Koto	Tanah Datar	Sumatera Utara
792	BKSDA Sumatera Barat	Batu Palano	Sungai Pua	Agam	Sumatera Utara
793	BKSDA Sumatera Barat	Pariangan	Pariangan	Tanah Datar	Sumatera Utara
794	BKSDA Sumatera Barat	Singgalang	X Koto	Tanah Datar	Sumatera Utara
795	BKSDA Sumatera Barat	Tarantang	Harau	Lima Puluh Kota	Sumatera Utara
796	BBTN Teluk Cenderawasih	Yende	Wasior	Teluk Wondama	Papua Barat
797	BBTN Teluk Cenderawasih	Mena	Wasior	Teluk Wondama	Papua Barat
798	BBTN Teluk Cenderawasih	Menarbu	Wasior	Teluk Wondama	Papua Barat
799	BBTN Teluk Cenderawasih	Yopanggar	Wasior	Teluk Wondama	Papua Barat
800	BBTN Teluk Cenderawasih	Aisandami	Wasior	Teluk Wondama	Papua Barat
801	BBTN Teluk Cenderawasih	Dotir	Wasior	Teluk Wondama	Papua Barat
802	BTN Baluran	Wonorejo	Banyuputih	Situbondo	Jawa Timur
803	BTN Bukit Duabelas	Pematang Kabau	Air Hitam	Sarolangun	Jambi
804	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Rantau Malam	Serawai	Sintang	Kalimantan Barat

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
805	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Tumbang Habangoi	Bukit Raya	Katingan	Kalimantan Tengah
806	BTN Bunaken	Kelurahan Anung Banua	Bunaken Kepulauan	Kota Manado	Sulawesi Utara
807	BTN Bunaken	Raprap	Tatapaan	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
808	BTN Bunaken	Sondaken	Tatapaan	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
809	BTN Bunaken	Wori	Wori	Minahasa Utara	Sulawesi Utara
810	BTN Ciremai	Padabeunghar	Pasawahan	Kuningan	Jawa Barat
811	BTN Ciremai	Pasawahan	Pasawahan	Kuningan	Jawa Barat
812	BTN Ciremai	Padamatang	Pasawahan	Kuningan	Jawa Barat
813	BTN Ciremai	Cibuntu	Pasawahan	Kuningan	Jawa Barat
814	BTN Ciremai	Singkup	Pasawahan	Kuningan	Jawa Barat
815	BTN Ciremai	Kaduela	Pasawahan	Kuningan	Jawa Barat
816	BTN Ciremai	Paniis	Pasawahan	Kuningan	Jawa Barat
817	BTN Ciremai	Trijaya	Mandiracan	Kuningan	Jawa Barat
818	BTN Ciremai	Randobawagiran g	Mandiracan	Kuningan	Jawa Barat
819	BTN Ciremai	Linggajati	Cilimus	Kuningan	Jawa Barat
820	BTN Ciremai	Linggasana	Cilimus	Kuningan	Jawa Barat
821	BTN Ciremai	Setianagara	Cilimus	Kuningan	Jawa Barat
822	BTN Ciremai	Bandarosa Kulon	Cilimus	Kuningan	Jawa Barat
823	BTN Ciremai	Sankanerang	Jalaksana	Kuningan	Jawa Barat
824	BTN Ciremai	Sayana	Jalaksana	Kuningan	Jawa Barat
825	BTN Ciremai	Pajambon	Kramatmulya	Kuningan	Jawa Barat
826	BTN Ciremai	Cigugur	Cigugur	Kuningan	Jawa Barat

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
827	BTN Ciremai	Cisantana	Cigugur	Kuningan	Jawa Barat
828	BTN Ciremai	Puncak	Cigugur	Kuningan	Jawa Barat
829	BTN Ciremai	Gunung Sirah	Darma	Kuningan	Jawa Barat
830	BTN Ciremai	Karangsari	Darma	Kuningan	Jawa Barat
831	BTN Ciremai	SagaraHiang	Darma	Kuningan	Jawa Barat
832	BTN Ciremai	Bantaragung	Sindangwangi	Majalengka	Jawa Barat
833	BTN Ciremai	Padaherang	Sindangwangi	Majalengka	Jawa Barat
834	BTN Ciremai	Argalingga	Argapura	Majalengka	Jawa Barat
835	BTN Ciremai	Cikaracak	Argapura	Majalengka	Jawa Barat
836	BTN Ciremai	Argamukti	Argapura	Majalengka	Jawa Barat
837	BTN Ciremai	Payung	Raja Galuh	Majalengka	Jawa Barat
838	BTN Ciremai	Sangiang	Banjaran	Majalengka	Jawa Barat
839	BTN Ciremai	Cipulus	Cikijing	Majalengka	Jawa Barat
840	BTN Ciremai	Gunung Manik	Talaga	Majalengka	Jawa Barat
841	BTN Ciremai	Maniskidul	Jalaksana	Kuningan	Jawa Barat
842	BTN Ciremai	Babakan Mulya	Jalaksana	Kuningan	Jawa Barat
843	BTN Gunung Merapi	Ngargosuko	Srumbung	Magelang	Jawa Tengah
844	BTN Gunung Merapi	Tegalrandu	Srumbung	Magelang	Jawa Tengah
845	BTN Gunung Merapi	Umbul Harjo	Cangkringan	Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta
846	BTN Gunung Merapi	Sidorejo	Kemalang	Klaten	Jawa Tengah
847	BTN Gunung Merapi	Tegal Mulyo	Kemalang	Klaten	Jawa Tengah
848	BTN Gunung Merbabu	Pogalan	Pakis	Magelang	Jawa Tengah

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
849	BTN Gunung Merbabu	Kopeng	Getasan	Semarang	Jawa Tengah
850	BTN Gunung Palung	Sedahan Jaya	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
851	BTN Gunung Palung	Sutera	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
852	BTN Gunung Palung	Laman Satong	Matan Hilir Utara	Ketapang	Kalimantan Barat
853	BTN Gunung Palung	Riam Berasap	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
854	BTN Gunung Palung	Gunung Sembilan	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
855	BTN Gunung Palung	Batu Barat	Simpang Hilir	Kayong Utara	Kalimantan Barat
856	BTN Gunung Palung	Sejahtera	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
857	BTN Karimunjawa	Karimunjawa	Karimun Jawa	Jepara	Jawa Tengah
858	BTN Kayan Mentarang	Apau Ping	Bahau Hulu	Malinau	Kalimantan Utara
859	BTN Kayan Mentarang	Pa Kidang	Krayan Barat	Nunukan	Kalimantan Utara
860	BTN Taka Bonerate	Pasitallu Timur	Taka Bonerate	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
861	BTN Taka Bonerate	Kayuadi	Taka Bonerate	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
862	BTN Taka Bonerate	Jinato	Taka Bonerate	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
863	BTN Taka Bonerate	Tarupa	Taka Bonerate	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
864	BTN Taka Bonerate	Latondu	Taka Bonerate	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
865	BTN Taka Bonerate	Rajuni	Taka Bonerate	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
866	BTN Taka Bonerate	Tambuna	Taka Bonerate	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
867	BTN Tambora	Sori Tatanga	Pekat	Dompu	Nusa Tenggara Barat
868	BTN Tanjung Putting	Sungai Sekonyer	Kumai	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
869	BTN Wakatobi	Mola Nelayan Bakti	Wangi-wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
870	BTN Wakatobi	Sombu	Wangi-wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
871	BTN Wakatobi	Lagiwae	Kaledupa	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
872	BTN Wakatobi	Kulati	Tomia Timur	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
873	BBKSDA Riau	Kelurahan Kibing	Batu Aji	Batam	Kepulauan Riau
874	BBKSDA Riau	Buluh Cina	Siak Hulu	Kampar	Riau
875	BTN Kerinci Seblat	Kelurahan Ulak Surung	Lubuklinggau Utara II	Lubuklinggau	Sumatera Selatan
876	BTN Kerinci Seblat	Lubuk Gadang Tenggara	Sangir	Solok Selatan	Sumatera Barat
877	BTN Kerinci Seblat	Salido Sari Bulan	IV Jurai	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
878	BTN Kerinci Seblat	Lubuk Gadang Selatan	Sangir	Solok Selatan	Sumatera Barat
879	BTN Kerinci Seblat	Sungai Gambir Sako Tapan	Ranah IV Hulu	Pesisir Selatan	Sumatera Barat

4. Data penerimaan PNBP dari Tumbuhan dan Satwa Liar Per Satker Ditjen KSDAE Tahun 2023

NO	SATKER	PNBP TSL (Rp)	NO	SATKER	PNBP TSL (Rp)
1	Direktorat KKHSG	15.183.136.857	35	BTN Bali Barat	4.550.000
2	BTN Tambora	1.400.000	36	BTN Sebangau	5.400.000
3	BKSDA DKI Jakarta Raya	67.981.200	37	BKSDA Kalimantan Tengah	699.306.025
4	BBKSDA Jawa Barat	1.256.166.499	38	BKSDA Kalimantan Timur	177.759.150
5	BKSDA Jawa Tengah	217.609.880	39	BBTN Kerinci Seblat	13.900.000
6	BBKSDA Jawa Timur	1.711.739.978	40	BBTN Bromo Tengger Semeru	50.000
7	BTN Baluran	300.000	41	BTN Batang Gadis	250.000
8	BKSDA Nangroe Aceh Darussalam	74.625.300	42	BTN Tesso Nilo	715.000
9	BBKSDA Sumatera Utara	414.183.800	43	BTN Bukit 12	13.950.000
10	BKSDA Sumatera Barat	248.033.625	44	BTN Gunung Ceremai	2.850.000
11	BBKSDA Riau	267.915.875	45	BTN Gunung Merapi	250.000

NO	SATKER	PNBP TSL (Rp)	NO	SATKER	PNBP TSL (Rp)
12	BKSDA Jambi	68.476.840	46	BTN Gunung Merbabu	1.350.000
13	BKSDA Sumatera Selatan	1.048.710.208	47	BTN Bantimurung Bulusaraung	55.600.000
14	BKSDA Kalimantan Barat	305.818.400	48	BTN Aketajawe Lolobata	20.400.000
15	BTN Tanjung Puting	10.000.000	49	BTN Meru Betiri	1.950.000
16	BKSDA Kalimantan Selatan	94.679.000	50	BBTN Lore Lindu	2.750.000
17	BTN Kutai	4.051.875	51	BTN Alas Purwo	4.250.000
18	BKSDA Sulawesi Utara	187.231.000	52	BTN Bunaken	1.200.000
19	BKSDA Sulawesi Tengah	145.418.681	53	BTN Kep. Seribu	4.085.000
20	BBKSDA Sulawesi Selatan	559.628.234	54	BBTN Teluk Cenderawasih	1.600.000
21	BKSDA Sulawesi Tenggara	137.046.268	55	BTN Gunung Halimun	17.665.500
22	BKSDA Maluku	488.634.225	56	BTN Karimun Jawa	3.150.000
23	BKSDA Bali	18.609.000	57	BTN Siberut	750.000
24	BKSDA Nusa Tenggara Barat	30.855.059	58	BTN Berbak Dan Sembilang	1.150.000
25	BKSDA Bengkulu	161.908.332	59	BBTN Betung Kerihun Dan Danau Sentarum	300.000
26	BBTN Gunung Gede Pangrango	28.800.000	60	BTN Rawa Aopa Watumohai	700.000
27	BBTN Gunung Leuser	365.227.375	61	BTN Kelimutu	800.000
28	BBTN Bukit Barisan Selatan	3.950.000	62	BTN Wakatobi	1.270.000
29	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	132.828.700	63	BTN Gunung Palung	13.300.000
30	BBKSDA Papua	3.503.287.375	64	BTN Bukit Tiga Puluh	650.000
31	BBKSDA Papua Barat	325.962.550	65	BTN Manusela	1.500.000
32	BTN Kayan Mentarang	1.350.000	66	BTN Gunung Rinjani	4.797.500
33	BTN Ujung Kulon	173.943.750	67	BKSDA D.I Yogyakarta	68.850.130
34	BTN Bogani Nani Wartabone	350.000	TOTAL		28.366.908.191



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
JL. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telp. +62 21 5730301 - 5730316
Fax +62 21 5733437

Foto : Susur Sungai Simpang Malaka - BTN Berbak dan Sembilang